



**SEJARAH PERJUANGAN RAKYAT TIMOR TIMUR
UNTUK
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)**



**Direktorat
Kebudayaan**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
PROYEK PENINGKATAN SLTP TIMOR TIMUR
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**



**SEJARAH PERJUANGAN RAKYAT TIMOR TIMUR
UNTUK
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)**

Penulis

Drs. Yusmar Basri

Cetakan ke - 2

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
PROYEK PENINGKATAN SLTP TIMOR TIMUR
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

KATA PENGANTAR

Buku Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur ini ditulis berdasarkan Surat Keputusan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud RI NO. 482/C/Kep/1992, dimaksudkan sebagai buku pelengkap mata pelajaran sejarah bagi siswa-siswa di Propinsi Timor Timur. Buku ini disusun sesuai dengan jenjang pendidikan yaitu sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas. Penulisan buku ini sangat penting karena belum ada buku pelajaran yang menampung sejarah Timor-Timur bagi siswa-siswa khususnya di Propinsi Timor Timur. Materi pelajaran yang ditulis dalam buku ini memperlihatkan bahwa Timor Timur merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Indonesia lainnya sejak zaman prasejarah. Karena itu ruang lingkup pembahasan buku pelajaran ini dimulai dari masa prasejarah sampai periode Pembangunan Nasional (sekitar 1988).

Setelah melakukan penelitian kepustakaan, naskah pertama ditulis oleh sebuah tim untuk masing-masing buku. Draft pertama itu kemudian diseminarkan di Dili pada bulan Januari 1993. Dalam seminar pertama ini hadir pelbagai pihak termasuk para pelaku, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah yang telah memberikan pelbagai data dan informasi tentang pelbagai peristiwa, baik yang menyangkut periode pemerintahan Portugal maupun proses integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia, serta data tentang pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya, tim penulis menyempurnakan naskah dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari seminar pertama itu. Penyempurnaan draft pertama juga ditunjang dengan hasil yang diperoleh dari lapangan oleh Tim Pengumpul Data Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Timor Timur.

Penulisan kembali dengan menggunakan informasi-informasi tersebut di atas pada akhirnya berhasil menyelesaikan naskah draft kedua. Sebagai mana ketentuan proyek, draft kedua dicetak dalam

jumlah terbatas untuk bahan uji coba. Setelah uji coba dilaksanakan, diperoleh gambaran bahwa secara umum, ketiga buku ini, baik untuk Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama maupun Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dapat dipahami oleh pembaca dan tidak terdapat kesalahan prinsipial. Walaupun demikian, dari hasil uji coba itu diperoleh pula beberapa saran yang patut mendapat perhatian tim penulis.

Selanjutnya tim penulis kembali mengolah draft kedua untuk menjadi draft ketiga berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh dari hasil uji coba serta sumber-sumber tertulis yang diperoleh kemudian.

Setelah bekerja beberapa waktu, draft ketiga berhasil diselesaikan. Sebenarnya draft ketiga ini akan diseminarkan di Dili, tetapi karena kesalahan teknis, maka draft ketiga tidak dapat dibagikan. Untuk mengatasi masalah ini kemudian dibagikan naskah yang telah dicetak untuk diujicobakan.

Pada awal bulan Nopember 1993, diadakan seminar kedua. Seminar ini juga dihadiri oleh pelbagai pihak termasuk para pelaku, bupati dan pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Suasana seminar cukup tegang karena terjadi perbedaan pendapat di antara peserta seminar, bahkan ada yang menghendaki agar buku ini jangan dulu diedarkan. Akhirnya seminar kedua ini memperoleh kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

1. perubahan judul, dari Sejarah Perjuangan Timor Timur menjadi Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur.
2. perbaikan kerangka penulisan, dan
3. penambahan anggota tim penulis dalam rangka penyempurnaan draft ketiga; anggota tim yang dimaksud harus putra daerah Timor Timur.

Disamping itu peserta seminar menyarankan agar dapat segera ditulis sebuah buku sejarah Timor Timur, yaitu "Sejarah Induk"

Anggota tim putra daerah yang ditunjuk oleh Gubernur Timor-Timur dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Timor Timur adalah :

1. Domingos M. Dores Soares, SH, MS
2. Pe. Jose Antonio da Costa
3. Drs. Florentino Sarmiento

Dalam perkembangan kemudian Drs. Florentino Sarmiento mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Selanjutnya tim penulis, bersama kedua putra daerah itu melakukan perbaikan-perbaikan untuk menghasilkan naskah draft keempat. Perbaikan yang prinsipial ialah pada penulisan nama-nama tokoh dan istilah-istilah tertentu yang dianggap kurang tepat.

Demikianlah, buku ini disusun melalui proses kerja yang cukup memakan waktu dan tenaga dari tim penulis.

Pada akhirnya tim penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan buku ini. Kritik dan saran yang bersifat membangun kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Jakarta, 22 Januari 1995

Tim Penulis

**SAMBUTAN
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI TIMOR TIMUR**

Dengan berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita telah dapat menyelesaikan penyempurnaan Buku Sejarah Perjuangan Timor Timur (yang telah dicetak pada tahun anggaran 1992/1993) menjadi Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur.

Buku yang diterbitkan kali ini adalah hasil akhir dari segala upaya yang telah ditempuh oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Timor Timur.

Namun kami tetap menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan baik yang menyangkut materi, pencetakan maupun ilustrasi yang ada.

Untuk itu kepada para pembaca/pemakai buku ini kami mohon untuk tetap memberikan sumbang saran maupun kritik yang membangun demi makin sempurnanya buku ini.

Kepada semua pihak dan khususnya anggota Tim Penulis yang telah berpartisipasi dalam upaya menyempurnakan dan menerbitkan buku Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Semoga buku ini banyak manfaatnya dalam rangka pembangunan bangsa.



Dili, 8 Januari 1994

Kepala Kantor Wilayah

R. TRI SUWARTANTA
NIP. 130163013

SAMBUTAN
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI TIMOR TIMUR

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, telah dapat dicetak ulang buku Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur untuk pegangan para siswa SD, SMP, dan SLTA di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Timor Timur.

Di samping untuk pegangan siswa SD, SMP, dan SLTA, maksud dari penulisan buku Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur adalah untuk memberikan pengertian serta wawasan yang benar tentang perjuangan Rakyat Timor Timur dalam usaha membebaskan diri dari cengkeraman penjajah.

Disamping itu buku ini juga dimaksudkan untuk merekam kejadian yang nyata, sehingga pada waktu yang akan datang tidak diputar balikkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, karena sejarah adalah rekaman kejadian nyata yang harus diketahui dan dihayati oleh generasi berikutnya.

Pada cetakan kedua ini dicetak seluruhnya 15.000 buku untuk tingkat SD, SMP, dan SLTA dengan beberapa perbaikan berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan dan perbaikan kepada Tim Penulis buku Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur.

Kami menyadari meskipun pada cetakan yang kedua ini telah ada perbaikan-perbaikan namun pasti masih ada kekurangan-kekurangan. Untuk itu masukan dari berbagai pihak demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini masih kami harapkan.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembangunan bangsa, khususnya di Propinsi Timor Timur tercinta. semoga Tuhan selalu memberkati usaha-usaha mulia ini.



Dili, Januari 1995
Kepala Kantor Wilayah,

Drs. M. Soekarman S., M. Ed
NIP. 130 160 743

SAMBUTAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR

Atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur, kami menyambut baik atas usaha-usaha yang telah ditempuh oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Propinsi Timor Timur, yang dengan segala daya dan upaya telah dapat menyempurnakan Draft Buku Sejarah Perjuangan Timor Timur, menjadi Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur.

Kami berterima kasih pula kepada Pemerintah, khususnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang telah berkenaan mengangkat 3 (tiga) orang putera daerah sebagai anggota Tim Penulis, sehingga lebih memperkuat dan dapat menambah bobot isi buku ini.

Memang sampai saat ini, belum ada Buku Sejarah Timor Timur atau semacamnya yang dapat dipergunakan sebagai pegangan yang pasti bagi para pendidik maupun para siswa di Propinsi Timor Timur.

Oleh karena itu, kami anjurkan buku ini agar dimanfaatkan untuk mengisi kekosongan yang ada bagi sekolah-sekolah di Propinsi Timor Timur.

Kami memahami bahwa buku ini masih banyak kekurangannya, untuk itu kepada para pembaca/pemakai buku ini diharapkan untuk dapat memberikan sumbang saran maupun kritik demi kesempurnaan buku ini.

Kepada semua pihak dan khususnya kepada Tim Penulis buku ini, kami sampaikan ucapan terima kasih atas segala upaya dan dayanya demi terwujudnya buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Timor Timur guna menyongsong hari esok yang lebih cerah.



Dili, 12 Januari 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
TIMOR-TIMUR

ABILIO JOSE OSORJO SOARES



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR**

Jln. Kaikoli Baru Telp. 21445. 21691. 21427.

D I L I

Nomor : 400/12/PIME.DPRD/I/1995
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pencetakan ulang
dan Penerbitan Buku Sejarah
Perjuangan Rakyat Timor Timur.

Dili, 26 Januari 1995.-

K e p a d a
Yth. Sdr. Kakanwil Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Timor Timur
di -

D i l i.

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami setelah melihat pentingnya Buku Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur untuk segera dapat disebar luaskan kepada para siswa dan berdasarkan masukan-masukan dan perbaikan dari berbagai pihak maka kami menyetujui Pencetakan ulang dan Penerbitan Buku Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur.

Demikian surat persetujuan ini disampaikan untuk segera dapat dilaksanakan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR



Tembusan :

1. Gubernur KDH Tk. I Timor Timur;
2. Kajati Timor Timur;
3. Danrem 164/AD;
4. Kapolwil Timor Timur.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR PENULIS	i
KATA SAMBUTAN KAKANWIL DEPDIKBUD TIM TIM ...	v
KATA SAMBUTAN KAKANWIL DEPDIKBUD TIM TIM ...	vii
KATA SAMBUTAN GUBERNUR KDH TK. I TIM TIM	ix
SURAT PERSETUJUAN DPRD TK I TIM TIM	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. LATAR BELAKANG	1
1. Lingkungan Alam dan Penduduk	1
2. Pra Sejarah	12
3. Kerajaan-kerajaan Tradisional	15
BAB II. PENJAJAHAN PORTUGIS	25
1. Kedatangan Portugis	25
2. Penjajahan Portugis	28
3. Perkembangan Agama Katolik	41
BAB III. PERLAWANAN RAKYAT TERHADAP PORTUGIS	47
1. Perjuangan Rakyat Oekusi (1767-1768).....	47
2. Perjuangan Rakyat Luca (1779-1785)	49
3. Perjuangan Manufahi (1911-1913).....	49
4. Perjuangan Viqueque (tahun 1959).....	52
BAB IV. PROSES PENENTUAN NASIB SENDIRI.....	59
1. Masalah Dekolonisasi.....	59
2. Pembentukan Partai - Partai.....	61
3. Pendekatan Melalui Perundingan.....	68
4. Perang Saudara.....	73

BAB V.	KEMBALI KE PANGKUAN IBU PERTIWI	83
	1. Proklamasi Balibo	83
	2. Pemerintahan Sementara Timor Timur	88
	3. Pembentukan Propinsi ke 27	92
BAB VI.	PEMBANGUNAN TIMOR TIMUR	97
	1. Bidang Pemerintahan	97
	2. Bidang Ekonomi	101
	3. Bidang Kesejahteraan Rakyat	105
	SUMBER PENULISAN.....	115
	LAMPIRAN	119

BAB I

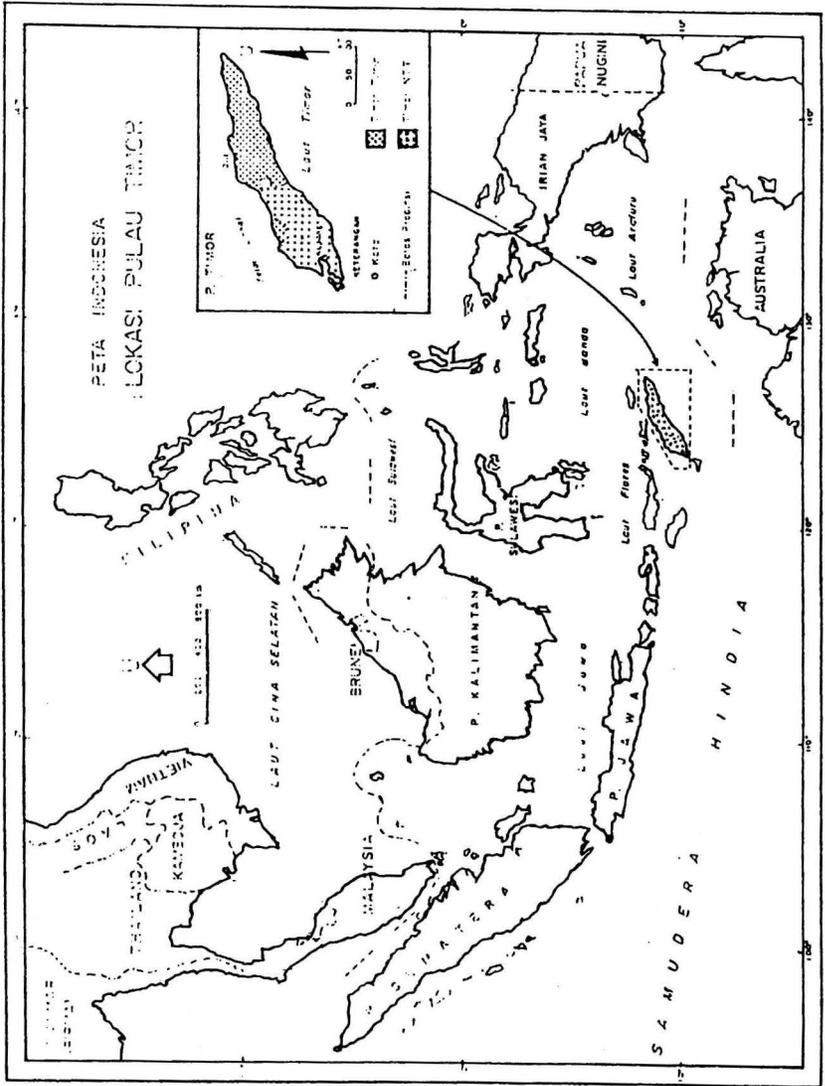
LATAR BELAKANG

1. Lingkungan Alam dan Penduduk

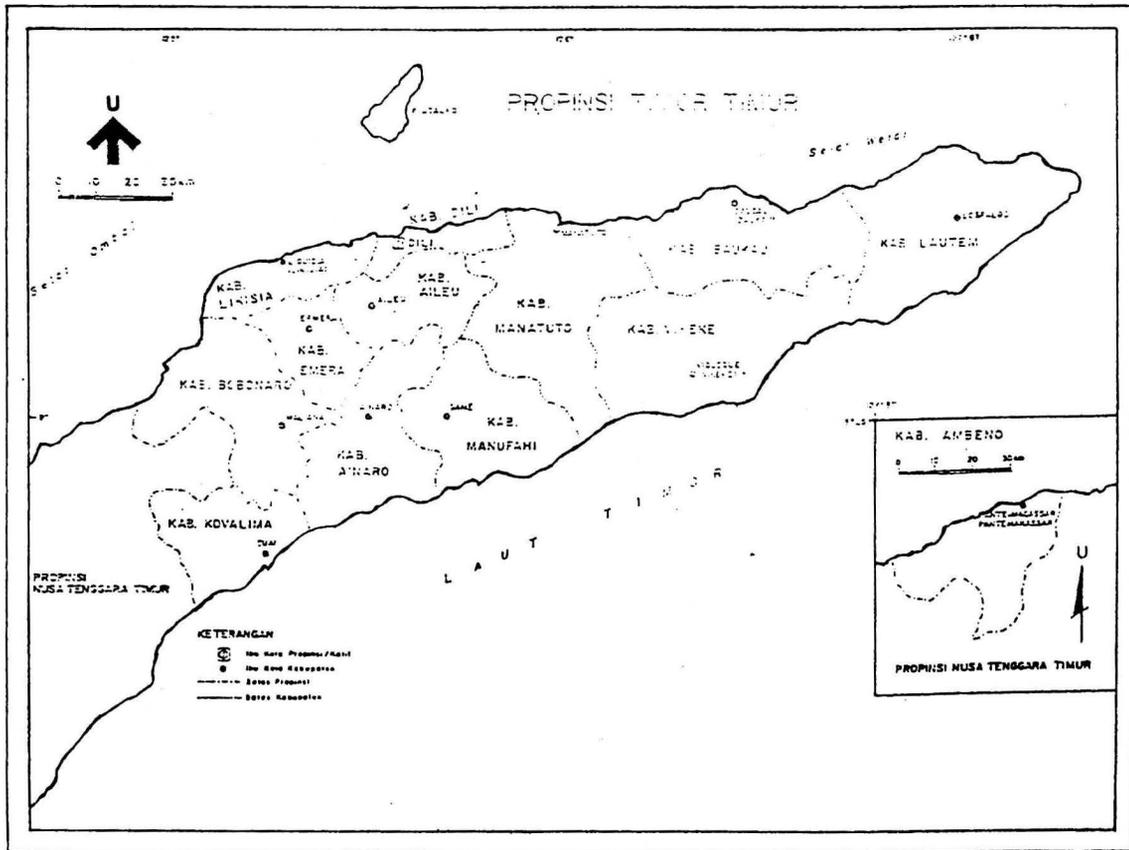
a. *Lingkungan Alam*

Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, besar dan kecil kurang lebih 17.508 pulau. Oleh karena itu, Indonesia sering juga disebut Nusantara. Wilayah ini terletak di antara benua Asia dan Australia dan sering juga dinamai "zamrut khatulistiwa". Nama itu diberikan karena kepulauan Indonesia begitu indah dan menarik, ibarat batu permata zamrut, serta kaya dengan hasil buminya. Sebagian besar pulau-pulau itu sangat subur. Di sana tumbuh bermacam jenis pohon yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Pohon-pohon yang terkenal seperti cengkeh, pala, cendana, dan lada dapat menghasilkan uang banyak bagi pemiliknya. Hasil pohon-pohon itu terkenal sebagai rempah-rempah yang laku keras sebagai komoditi perdagangan sampai di negara-negara Eropa. Karena menguntungkan, maka banyak pedagang luar negeri berdagang ke Indonesia.

Pulau Timor adalah salah satu dari ribuan pulau itu. Dalam administrasi pemerintahan, Pulau Timor dibagi atas dua wilayah. Bagian barat dengan ibu kota Kupang merupakan bagian dari wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Bagian timur merupakan wilayah Propinsi Timor Timur dengan ibu kota Dili. Wilayah Timor Timur terdiri atas wilayah daratan (± 14.609 km²) termasuk wilayah Ambeno atau Oekusi (± 778 km²), Pulau Atauro atau Pulau Kambing (± 150 km²) dan pulau Jako (11 km²). Bila dibandingkan dengan luas Indonesia, maka luas Propinsi Timor Timur sama dengan 0.77% luas wilayah darat seluruh Indonesia.



Peta Indonesia



Peta Provinsi Timor Timur

Propinsi Timor Timur terletak pada 8° 17' sampai 10° 22' Lintang Selatan dan 123° 25' sampai 127°19' Bujur Timur. Bagian utara dibatasi oleh Selat Ombai dan Selat Wetar; sebelah timur oleh Laut Banda, sebelah selatan oleh Laut Timor dan sebelah barat oleh Propinsi Nusa Tenggara Timur. Laut di sekitar Timor Timur termasuk laut yang dalam. Di dalam laut hidup bermacam jenis ikan seperti tuna dan cakalang. Bahkan di Laut Timor ditemukan cadangan minyak, yang apabila ditambang tentu menghasilkan uang yang besar bagi negara.

Di Timor Timur ditemui banyak pegunungan. Misalnya:

- 1) Pegunungan Ramelau yang membatasi Kabupaten Ermera dengan Ainaro.
- 2) Pegunungan Sorolau di daerah perbatasan Kabupaten Ainaro, Manufahi dan Aileu.
- 3) Pegunungan Gerigi di batas barat Kabupaten Manatuto.
- 4) Pegunungan Perdio di batas Kabupaten Viqueque (Vikeke) dan Baucau (Baukau)
- 5) Pegunungan Matabian di bagian Timur Baucau.

Pegunungan ini sebenarnya dikenal sebagai busur luar Pegunungan Sunda. Ia menyambung ke barat ke Pulau Rote, Sumba dan bergabung dengan pegunungan Sumbawa, Lombok, Bali, Jawa dan Sumatera. Jalur pegunungan dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok Sumbawa, Flores, Solor, Alor, Wetar, Damar, Banda, Haruku, disebut busur dalam Pegunungan Sunda. Umumnya busur dalam ini banyak gunung berapinya. Di tempat-tempat yang ada gunung apinya, biasanya tanahnya subur.

Di sepanjang pegunungan itu muncul beberapa gunung seperti Gunung Tatamailau (2.963m), Gunung Usululi (2.620), Gunung Hutapai (2.293 m), dan Gunung Lakulo (2.050 m), di Kabupaten Ermera; Gunung Sabiria (2.495 m); di Kabupaten Ainaro; Gunung Kablaki (2.459 m) di Kabupaten Manufahi; dan Gunung Matabean (2.373) di Kabupaten Baucau. Akan tetapi, gunung-gunung itu bukan merupakan gunung berapi sehingga tidak memberikan kesuburan

bagi daerah sekitarnya. Apalagi tanah daratan umumnya terdiri atas batukapur. Dengan banyaknya pegunungan tersebut, maka luas dataran rendah hanya seperlima dari luas propinsi ini. Dataran rendah hanya ditemui di daerah sepanjang pantai.

Kondisi alam seperti tersebut di atas menyebabkan sungai-sungai yang mengalir ke pantai utara dan selatan alirannya deras. Bila hujan, sering timbul air bah. Meskipun ditemui banyak sungai, tetapi tidak semua sungai mengalir sepanjang tahun. Hanya ada beberapa sungai yang mengalir sepanjang tahun. Sungai-sungai tersebut ialah sungai Lois, Lacro, Lalea, dan Seisal yang mengalir ke utara, sedangkan sungai Belulik, Laclodome, Sahem, Luka, dan Dilar mengalir ke pantai selatan. Oleh karena itu, sungai-sungai tersebut tidak begitu banyak manfaatnya bagi pertanian, kecuali apabila sudah dibuat suatu bendungan.

Sedikitnya sungai-sungai yang mengalir sepanjang tahun juga dipengaruhi oleh angin muson. Angin muson timur yang berasal dari Australia kurang mengandung hujan. Musim panas yang paling kering berlangsung pada bulan Agustus - September. Sebaliknya, angin muson barat yang berasal dari Asia mengandung hujan walaupun tidak banyak. Hujan terbanyak turun pada bulan Februari - Maret. Namun demikian, bila dibandingkan rata-rata curah hujan di Indonesia, daerah Timor Timur berada jauh di bawah. Pada umumnya curah hujan daerah lain di Indonesia berada di atas 1.000 mm, bahkan ada yang di atas 2.000 mm per tahun. Sebaliknya, curah hujan di Dili hanya 985 mm dan Baukau 828 mm per tahun.

Pada masa dahulu kapal-kapal masih merupakan kapal layar sehingga angin muson dimanfaatkan untuk pelayaran dan perdagangan. Pada muson timur, kapal-kapal berlayar dari arah timur ke barat. Sebaliknya, pada muson barat kapal-kapal berlayar dari arah barat ke timur. Keadaan ini juga dimanfaatkan oleh penduduk Timor Timur, seperti juga penduduk daerah-daerah lain di Indonesia dalam berhubungan dengan daerah atau pulau lainnya. Beberapa pelabuhan yang digunakan saat itu, antara lain Pante Makasar, Lifau, Batugede, Baucau, dan Dili.

Oleh karena suhu udara yang tinggi dan kurang hujan, maka flora utama di Timor Timur adalah padang rumput yang diselengi pohon. Hamparan padang rumput ini disebut sabana. Padang rumput ini dimanfaatkan oleh penduduk sebagai padang penggembalaan ternak. Kadang-kadang juga sebagai tempat perburuan bagi rakyat terhadap binatang-binatang seperti rusa.

Di Timor Timur juga ditemukan beberapa jenis bahan tambang. Emas, perak, dan tembaga ditemukan di daerah Baucau. Keramik dan fosfat ditemukan di Baucau, Maliana, Same, Aileu, dan Ainaro. Di samping itu, juga ditemukan marmer di Manatuto, dan mangan di Baucau dan Viqueque. Akan tetapi, saat ini bahan tambang tersebut belum diolah atau ditambang sehingga belum dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

b. *Penduduk*

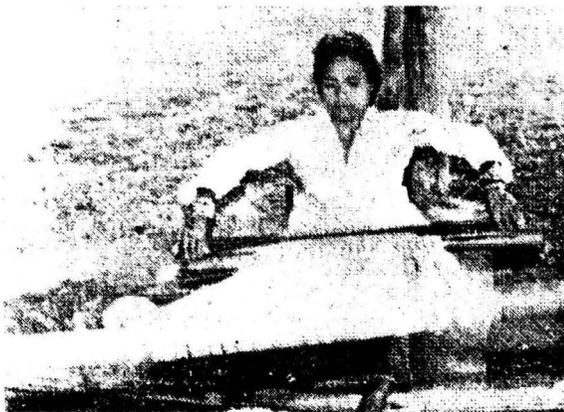
Penduduk yang ada di Timor Timur tidak muncul begitu saja. Setelah diteliti oleh para ahli ada beberapa gelombang migrasi yang datang ke Indonesia, termasuk Timor. Gelombang migrasi pertama merupakan penduduk tipe Vedo-Australoid. Ciri-ciri penduduk ini ada persamaannya dengan orang Veda di Srilangka dan penduduk asli (Aborigin) di Australia. Meskipun ada kemiripan tidak berarti penduduk Timor Timur sama dengan penduduk kedua daerah tersebut. Bahasa-bahasa daerah yang dipakai Timor Timur tidak menunjukkan pertalian dengan bahasa-bahasa asli di Australia. Sebaliknya, ada persamaan dengan bahasa daerah di Indonesia, misalnya dengan bahasa Jawa. Contoh: *asu* (anjing), *manu* (burung), *udan* (hujan), *dalan* (jalan), *watu* (batu), dan lain sebagainya.

Migrasi kedua memperlihatkan penduduk tipe Papua Melanesia dengan ciri *Negroid* (bangsa berkulit hitam). Tipe penduduk ini banyak ditemukan di bagian barat Timor, sedangkan di Timor Timur ditemui di daerah pegunungan. Tipe penduduk ini oleh ahli purbakala dihubungkan dengan kebudayaan kapak lonjong yang masuk ke sini bersamaan dengan migrasi orang-orang *Melanesia*. Para ahli tata bahasa (Linguistik) berpendapat ada tiga bahasa daerah di Timor Timur yang disebut masuk bahasa pre-Austronesia. Ketiga bahasa

itu adalah bahasa Makasai (di daerah Baucau dan Viqueque), bahasa Fataluco (di daerah Lautem), dan bahasa Bunac (di daerah Bobonaro, Fatululik, dan Zumalai).

Migrasi berikutnya adalah penduduk yang berbahasa Austronesia. Ada dua gelombang kedatangan ke Timor. Gelombang pertama ialah Melayu-tua (*proto-Melayu*) dan gelombang kedua ialah Melayu-muda (*deutero-Melayu*).

Gelombang migrasi ini biasa pula disebut migrasi Austronesia, yang sekarang menjadi penduduk/bangsa Indonesia. Percampuran antara Melayu Muda dengan orang Melanesia melahirkan penduduk yang kini kita temukan sebagai penduduk Indonesia Timur seperti yang ada di sekitar Timor (Nusa Tenggara) dan Maluku. Selain itu, sebagian bahasa daerah yang digunakan di Timor Timur termasuk rumpun bahasa Austronesia, misalnya bahasa Tetum, Mambai, Galole, dan Tokodede. Itulah sebabnya banyak persamaan antara bahasa yang digunakan di Timor Timur seperti bahasa Tetum dan Mambai dengan bahasa suku bangsa lain di Indonesia. Bahasa daerah yang tidak termasuk Austronesia ialah Bunak, Kemak, Makasai, Dagala, Idate, Kairui dan Midiki.



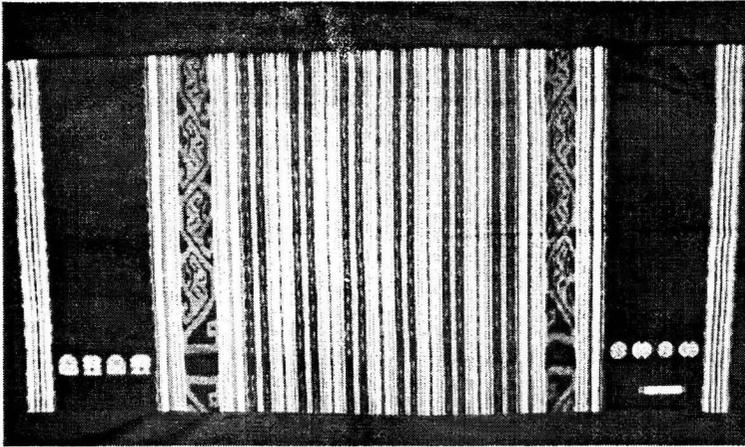
Alat tenun bukan mesin (ATBN), suatu tradisi di Timor Timur yang sama dengan tradisi di NTT, Jawa dan propinsi lain di Indonesia

Kesamaan lain dari pengaruh migrasi Austronesia adalah dalam hal budaya. Di banyak daerah kita temukan persamaan dalam hal teknik persawahan, penggunaan alat-alat bambu, kerajinan tangan seperti tenunan, anyaman dan barang tembikar. Contoh, corak kain tais Timor Timur banyak persamaannya dengan tenunan di pulau-pulau lain di Nusa Tenggara.

Propinsi Timor Timur, meskipun luas wilayahnya tidak terlalu besar, tetapi dihuni oleh lebih dari 20 suku bangsa. Melihat banyaknya suku bangsa itu, dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata tiap suku bangsa itu berjumlah puluhan ribu orang. Bahkan ada suku bangsa yang jumlahnya hanya ratusan jiwa saja. Meskipun demikian hubungan antarsuku bangsa berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh dasar budaya dan asal-usul yang sama, tidak hanya untuk wilayah Timor keseluruhan, bahkan sebagian besar suku bangsa di Indonesia. Hubungan baik yang berlangsung ribuan tahun itu baru berubah sejak masuknya orang Barat, terutama Portugis dan Belanda. Mereka mengotak-kotakan rakyat yang hidup berdampingan secara damai itu sesuai dengan kepentingan kolonialisme.

Sejarah suku bangsa dan kebudayaan Timor Timur memang tidak dapat dipisahkan dari Pulau Timor secara keseluruhan serta pulau-pulau lain di sekitar Timor. Sejarah perkembangan suku bangsa dan kebudayaan suku-suku bangsa asli di Timor bagian timur dan bagian barat hanya terhalang karena politik kolonialisme Portugis dan Belanda.

Apabila kita memperhatikan ciri-ciri fisik manusia dan kebudayaan berbagai suku bangsa di Timor, kita melihat banyak sekali persamaannya dengan suku-suku bangsa lain di kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku serta Irian Jaya. Bukti-bukti persamaan itu terlihat pada bahasa, peninggalan kapak lonjong, serpihan bilah, alat tulang, gerabah, tradisi mengukir patung kayu, dan kepercayaan asli. Juga ada persamaan dalam bertani, bertenun, dan membuat tembikar.



Contoh Kain Tais dari Timor Timur

Khusus untuk bertenun, nyata benar adanya persamaan teknik menenun kain Timor atau tais dengan tradisi tenunan suku-suku bangsa di Sumba, Flores, dan Maluku Tenggara. Suku-suku bangsa yang dianggap ada kaitannya dengan kebudayaan Papua-Melanesia antara lain suku Makassar, Fataluku, dan Bunak.

Dari sudut bahasa, mayoritas suku-suku bangsa menggunakan bahasa-bahasa yang masuk rumpun bahasa Austronesia. Hal itu terlihat pada bahasa Tetum, Mambai, Kemak, Tokodede, Galole, Idate, Lacolei, dan Naueti. Ada 12 bahasa yang digunakan penduduk, yang terbagi atas 35 dialek atau subdialek. Dalam perkembangannya, bahasa Tetum banyak digunakan oleh penduduk Timor sebagai bahasa pengantar. Tidak hanya dalam pergaulan sehari-hari tetapi juga dalam penyebaran agama. Pada masa penjajahan, bahasa ini banyak terpengaruh oleh bahasa Portugis. Semenjak Timor Timur menjadi propinsi RI ke-27, bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa pengantar.

Mengenal lingkungan sendiri adalah hal yang baik dalam kehidupan ini. Jadi, baik sekali kita mengenal suku bangsa yang hidup di Timor Timur. Sejumlah suku bangsa yang sudah diteliti tentang kehidupannya, yaitu sebagai berikut.

- 1) Suku bangsa Belu, juga disebut suku bangsa Tetum. Suku ini berdiam di Kabupaten Suai, Ermera, Dili, dan Vikeke (Viqueque), dan merupakan suku bangsa terbesar di Timor Timur (berjumlah \pm 300.000 jiwa).
- 2) Suku bangsa Fataluku, juga disebut suku bangsa Dagada sesuai dengan bahasa yang digunakan. Mereka berdiam di kabupaten Lautem. Arsitektur rumah adat Fataluku yang disebut *fiale* (rumah ijuk) terkenal kemegahannya sehingga sering dijadikan simbol daerah Timor Timur.



Rumah Adat Lospalos

- 3) Suku bangsa Makasai. Mereka berdiam di Kabupaten Baucau dan Kabupaten Vikeke (Viqueque).
- 4) Suku bangsa Bunak atau Marae. Mereka berdiam di Kabupaten Kovalima, dan Kabupaten Bobonaro.

- 5) Suku bangsa Kemak. Mereka berdiam di Kabupaten Maliana.
- 6) Suku bangsa Idate. Mereka berdiam di Kabupaten Manatuto dan Kabupaten Manufahi.
- 7) Suku bangsa Ilimana, di Kabuapten Manatuto.
- 8) Suku bangsa Samoro, di Kabupaten Manatuto.
- 9) Suku bangsa Adabe, di Pulau Atauro.
- 10) Suku bangsa Baba, di Pulau Atauro.
- 11) Suku bangsa Hahak, di Pulau Atauro.
- 12) Suku bangsa Galoli, di Kabupaten Manatuto.
- 13) Suku bangsa Kairui, di Kabupaten Baucau.
- 14) Suku Bangsa Lakalei, di Kabupaten Manufahi.
- 15) Suku bangsa Makua, di Kabupaten Lautem.
- 16) Suku bangsa Mambai, di Kabupaten Ermera dan Kabupaten Ainaro.
- 17) Suku bangsa Naueti, di Kabupaten Lautem.
- 18) Suku bangsa Tokodede, di Kabupaten Likisa (Liquica).
- 19) Suku bangsa Waima'a, di Kabupaten Baucau.

Kedatangan orang Portugis ke Timor Timur juga mempengaruhi kepercayaan yang dianut penduduk. Semula mereka menganut kepercayaan animisme, yaitu pemujaan terhadap roh-roh halus dan benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib.

Kepercayaan orang Tetum adalah pemujaan terhadap matahari, bulan dan roh-roh nenek moyang. Mereka menamakan roh nenek moyang dengan sebutan *bian* sedangkan roh orang mati disebut *mate klamar*. Di samping, itu ada roh-roh yang mendiami tempat-tempat tertentu atau benda-benda keramat yang disebut *rai na'in*. Ada juga roh-roh yang jahat yang tinggal di hutan, yaitu *buan*. Roh jahat yang selalu mengembara dan mengganggu manusia disebut *suanggi*. Untuk menghadapi roh-roh tersebut, hanya tokoh *matan dook* yang mampu. Upacara yang menyangkut kepercayaan dipimpin oleh *makair lulik*. Sekarang sebagian besar penduduk menganut agama Katolik. Sebagian lain ada yang tetap menganut animisme; juga ada yang beragama Islam, yaitu keturunan Melayu dan Arab.

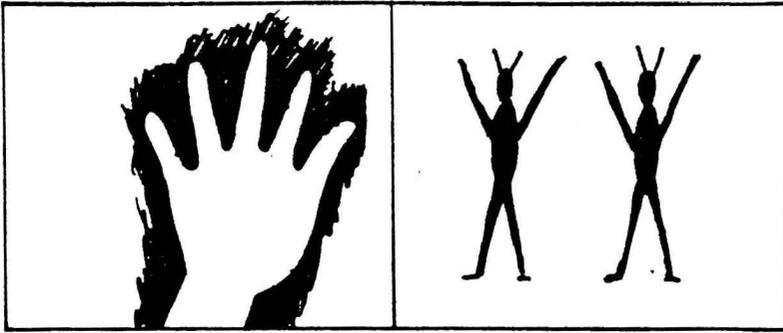
Berkembangnya hubungan dengan orang luar Timor Timur, pada abad-abad yang lalu menyebabkan di sini juga ditemukan keturunan pendatang dari Portugis, Cina, India, Arab, dan Negro Afrika. Mereka itu sekarang sudah berbaur dengan penduduk asli dan pendatang lainnya dari daerah Indonesia. Pembauran itu memperkokoh rasa persatuan di antara mereka.

Dibandingkan dengan penduduk daerah lain di Indonesia kepadatan penduduk Timor Timur termasuk jarang. Hasil sensus penduduk tahun 1990 menunjukkan bahwa jumlah penduduk seluruhnya 747.750 jiwa. Jika dihitung dengan luas wilayah Timor Timur yang 14.874 km², maka kepadatan penduduk per km² adalah 53.3 jiwa. Dibandingkan dengan rata-rata kepadatan penduduk Indonesia tahun 1990, yaitu 93.4 jiwa per km²; jelas sebaran penduduk Timor Timur amat jarang. Hal ini berkaitan dengan ketidaksuburan tanah di sini. Sebaliknya, pertumbuhan penduduk di Timor Timur lebih tinggi dari rata-rata nasional. Untuk periode 1980-1990 laju pertumbuhan penduduk Timor Timur adalah 3.02%, sedangkan nasional hanya 1.97%.

2. Pra Sejarah

Dari hasil penelitian diketahui bahwa daerah Timor telah dihuni manusia sejak zaman dahulu kala. Hal itu dapat diketahui dari peninggalan alat-alat yang dipergunakan penduduk waktu itu, yang disebut artefak. Juga ditemukan beberapa lukisan pada dinding gua batu di beberapa daerah di Timor Timur tentang manusia, binatang, dan barang-barang yang diperlukan seperti perahu. Artefak, yang digolongkan alat *paleolitik* yang berhubungan dengan zaman batu awal, ditemukan dekat Danau Gasiliu di daerah Laga, di Maliana dan di Suai.

Di Atambua dan Kefamenanu ditemukan pula alat batu berupa alat-alat serpih berbentuk kapak perimbas. Jenis ini juga ditemukan di luar Timor seperti di Flores. Alat-alat seperti itu juga ditemukan di gua-gua di daerah Baucau dan di Venilale pada tahun 1967. Alat serpih bilah meliputi jenis lancip bertangkai, serut samping, sejenis kapak yang diserpih, penusuk, dan beberapa jenis alat batu.



Lukisan dinding Gua Ili Kere-kere

Yang jelas, alat-alat tersebut digunakan untuk mengerjakan benda-benda yang berasal dari kayu.

Alat neolitik di Timor Timur ditemukan di Kompleks Gua Tirilolo, Kabupaten Baucau. Di sungai Lalea, Kabupaten Manatuto, ditemukan juga pecahan gerabah berhias. Peninggalan prasejarah yang umurnya lebih muda ditemukan dalam gua di daerah Amanulan pada tahun 1935. Di gua itu ditemukan kerewang, pisau besi, dan piringan (piring) keramik. Benda sejenis itu ditemukam juga di Gua Tirilolo dan di Sungai Laklo, Manatuto.

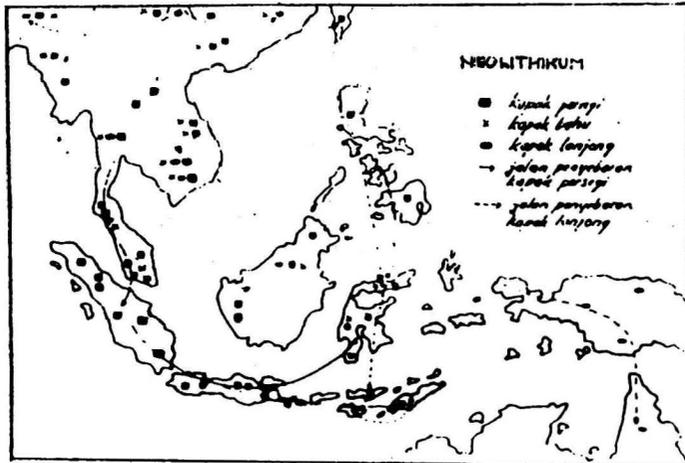
Di lapis yang lebih dalam, ditemukan pula alat-alat seperti disebut di atas ditambah benda-benda seperti gerabah berhias, pisau-pisau bergagang, batu lancip, dan sejenis kerang yang digunakan sebagai alat tiup.

Dari penemuan tersebut terlihat bahwa temuan prasejarah di Timor Timur ada hubungannya dengan temuan sejenis di tempat-



Temuan pecahan gerabah di Manatuto

tempat lain di Indonesia. Kenyataan itu menunjukkan adanya hubungan dan persamaan antara penduduk di berbagai daerah di Indonesia. Akan tetapi, dari temuan itu saja kita tidak cukup mengetahui corak kehidupan masyarakatnya.



Peta penyebaran kapak zaman Neolitikum

3. Kerajaan-Kerajaan Tradisional

a. Hubungan dengan Luar Timor

Daerah Timor sudah lama dikenal oleh penduduk Nusantara dan dunia. Hal itu berarti bahwa hubungan antara daerah itu dengan daerah lain di Nusantara telah terjalin erat. Hubungan itu berjalan lancar karena banyak persamaan kebudayaan dan kepentingan ekonomi di antara mereka. Hubungan tidak hanya terjalin dengan daerah-daerah di Nusa Tenggara yang dekat dengan Timor, tetapi juga dengan daerah lain seperti Sulawesi Selatan.

Dalam riwayat orang Bugis, disebutkan bahwa daerah Timor juga menjadi tujuan para pelaut dan pedagang Bugis. Bahkan hubungan pemerintahan pun ada di antara kedua daerah tersebut. Salah satu bukti hubungan tersebut, di daerah Oekusi ada nama tempat "Pante Makassar".

Dalam buku *Negarakertagama*, yang ditulis pada pertengahan abad ke-14 oleh Empu Prapanca, tercantum nama Pulau Timor. Buku itu menyebutkan bahwa Timor dan pulau lainnya di sebelah timur pulau Jawa mengirim upeti, yaitu pemberian sebagai tanda kesetiaan, kepada kerajaan Majapahit. Pengiriman upeti itu menunjukkan adanya hubungan antardaerah atau kerajaan. Akan tetapi, hal itu dapat pula ditafsirkan bahwa daerah atau kerajaan pengirim upeti adalah daerah atau kerajaan yang dilindungi bahkan daerah taklukan kerajaan yang dikirim upeti.

Berita tertulis lainnya berasal dari Cina pada tahun 1225, yang menyebutkan bahwa penduduk Timur (Timor) telah mengadakan hubungan dengan kerajaan di pulau Jawa. Di samping itu, juga disebutkan bahwa daerah itu menghasilkan banyak kayu cendana yang menjadi bahan perdagangan utama.

b. Persatuan Kerajaan

Kita mengetahui daerah Timor dihuni oleh sejumlah suku bangsa. Biasanya setiap suku bangsa membuat pemerintahan atau kerajaan sendiri. Sering juga dalam satu suku bangsa itu berdiri beberapa kerajaan. Biasanya kerajaan-kerajaan itu muncul pada

tempat-tempat strategis, seperti persimpangan lalu lintas, muara sungai, dan teluk. Kemudian, tempat-tempat itu berkembang karena menjadi tempat perdagangan. Tentu ada kerajaan yang kecil dan kerajaan yang besar. Berkembangnya kerajaan itu juga bergantung pada keadaan alamnya. Umpamanya, di daerah Belu Selatan daerahnya subur dan terdapat sebuah sungai besar. Oleh karena itu, di Belu terdapat suatu kerajaan yang cukup kuat dan mempengaruhi banyak daerah di Timor. Memang agak sulit mengetahui bilamana kerajaan-kerajaan itu berdiri dan berkembang serta bagaimana pemerintahannya. Hal itu terjadi karena sangat terbatasnya sumber informasi tertulis. Kebanyakan sumber informasi berasal dari ceritera-ceritera rakyat. Biasanya informasi yang didapat cerita rakyat sudah dibumbui dengan hal-hal lain yang sulit dibuktikan kebenarannya.

Selain dari kerajaan yang ada di Belu, menurut cerita ada kerajaan-kerajaan kecil lainnya seperti Suai, Miomafo, Fatuleu, Mallo, Amfoang, Sonba'i, Amanaban, Ambeno, Biboki, dan Manutun. Kerajaan-kerajaan kecil itu sering menyatakan ada hubungan dengan kerajaan di Belu Selatan. Tampaknya mereka diatur oleh suatu pemerintah pusat. Oleh karena itu, ada dugaan bahwa rakyat Timor dahulu kala pernah mengenal sistem pemerintahan dengan pucuk kekuasaan tunggal (kekuasaan dari Maromak O'an).

Pemerintahan terpusat itu bukan berarti kekuasaan mutlak dengan wewenang penuh, tetapi lebih merupakan suatu simbol kesatuan. Kesatuan itu terwujud dalam ritual kepercayaan, tata cara dan tata krama di antara kelompok suku bangsa yang berlainan. Tidak dapat dipastikan apakah semua suku bangsa mengakui kekuasaan pusat tersebut. Namun, menurut penelitian, baik suku bangsa Atoni maupun Belu, dua suku bangsa terbesar di Timor, mengakui adanya kekuasaan tunggal itu. Di daerah Atoni kekuasaan tunggal itu dikenal sebagai *Liurai-Sonbai*. Bahkan sebagian besar rakyat Timor menganggap dirinya berasal dari Wehale, suatu daerah di Belu Selatan.

Ada dugaan bahwa penduduk di Timor adalah orang Atoni. Ketika orang Belu atau Tetum datang ke Timor, orang Atoni mulai terdesak ke daerah pedalaman. Orang Belu kemudian mendirikan kerajaan Wehale pada abad ke-14. Selama beberapa abad, kerajaan

ini mendominasi kerajaan-kerajaan kecil lainnya di Timor. Hal itu menunjukkan bahwa kerajaan Wehale memegang peranan penting dalam menyatukan kerajaan-kerajaan di pulau Timor di bawah satu kekuasaan tunggal.

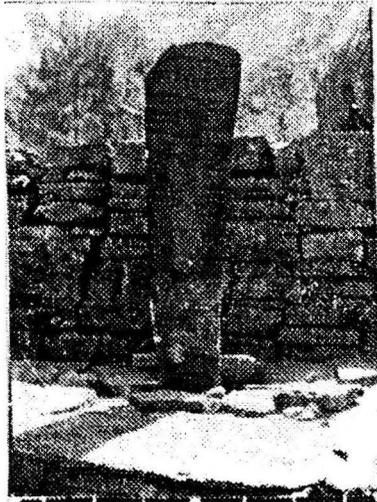
Sehubungan dengan kekuasaan tunggal itu, sumber Portugis pada awal abad ke-16 menyebutkan bahwa di sebelah timur pulau Jawa terdapat pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Di antaranya ada sebuah pulau yang mereka namakan Timor, yang mempunyai seorang raja yang berdiri sendiri. Dapat ditafsirkan bahwa ada suatu kerajaan besar atau kuat yang mempersatukan sejumlah kerajaan kecil.

Dalam laporan yang dibuat oleh Pigafetta (orang Spanyol) tahun 1522, ketika berlabuh di Batugede, ia mendengar bahwa di pedalaman terdapat empat bersaudara yang menjadi raja di Timor. Keempat kerajaan itu bernama Oibich, Lichana, Suai, dan Kamanasa. Oibich ditafsirkan sebagai Waiwiku, Lichana mungkin Tusana, sedangkan Suai dan Kamanasa adalah dua daerah di bagian selatan Timor Timur. Laporan Pigafetta itu bila dibandingkan dengan cerita rakyat ternyata tidak bertentangan. Cerita rakyat tentang kerajaan yang berpusat di Waiwiku-Wehale tempat kedudukan Maromak O'an (putra Tuhan) yang berasal dari langit terkait erat dengan tiga kerajaan lainnya yaitu Futu-Aonim di utara Wehale dan Insana, Sonbai di daerah orang Atoni dan Suai-Cabanasa di sebelah timur Wehale.

Seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin pemerintahan atau kerajaan tentu ada syarat-syaratnya. Pada masa dahulu seorang pemimpin suku, di samping mampu memimpin kelompoknya, juga harus berperan dalam pelaksanaan upacara penghormatan pada arwah nenek moyang. Sebagai tanda kepemimpinannya, ia membangun tempat-tempat pemujaan lengkap dengan dolmen dan menhir. Dolmen adalah bangunan dari batu yang bentuknya seperti meja dan digunakan sebagai peti mayat. Menhir adalah sebuah tugu dari batu tunggal yang didirikan untuk upacara menghormati roh nenek moyang. Melalui arwah nenek moyang, ia berhubungan dengan Tuhan, meminta perlindungan dan kesejahteraan dalam hidupnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, di antara para kepala suku itu akan muncul seorang raja atau *Liurai*. Seorang raja diakui karena ia mempunyai kelebihan dalam beberapa hal, seperti:

- 1) mempunyai lebih banyak benda-benda pusaka peninggalan nenek moyang yang sangat berperan dalam memelihara kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan alam serta lingkungan; dan
- 2) ia dianggap lebih arif dan bijaksana dalam memelihara kerukunan dan perdamaian di antara suku-suku yang mengakuinya di wilayah kekuasaannya.



Contoh Menhir di Bobonaro

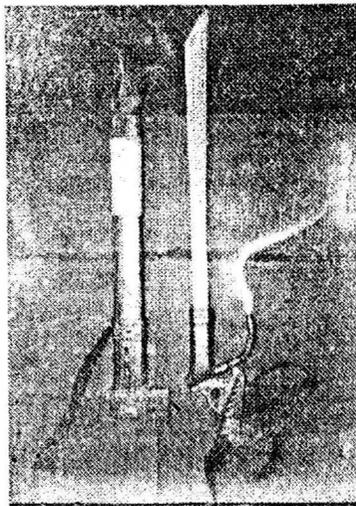
Untuk mengatur kehidupan masyarakat, pemimpin berpegang pada norma-norma adat istiadat. Untuk memulai suatu pekerjaan, masyarakat selalu terikat pada adat istiadat dan pemimpinnya. Misalnya, bila akan mulai berladang mereka harus mendapat tanda dan restu dulu dari pemimpin masyarakatnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa semua tata kehidupan masyarakat bersendi kepada adat istiadat yang umumnya tidak tertulis, tetapi dipatuhi oleh anggota

masyarakat. Keadaan itu, dalam beberapa kegiatan, sampai kini masih tetap berlaku di masyarakat. Hal serupa juga berlaku di berbagai daerah di Indonesia.

Dari kenyataan tersebut terlihat bahwa pengaruh raja (*liurai*) sangat besar dan mempunyai kedudukan yang kuat. Sebaliknya, rakyat sangat setia kepada raja sehingga sulit untuk menarik kesetiannya itu. Kenyataan itu masih berlaku sampai sekarang.

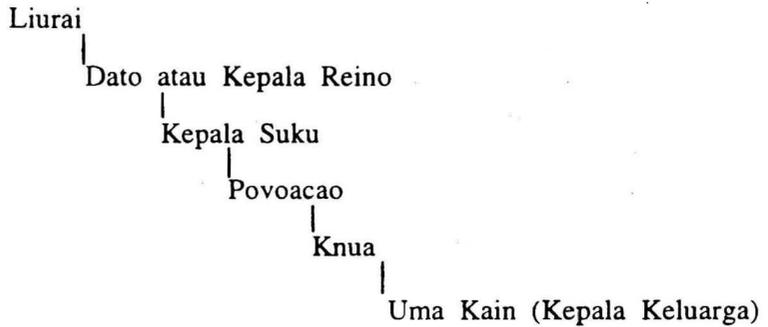
Unit politik yang paling luas wilayahnya dan besar kuasanya adalah kerajaan. Sebuah kerajaan dipimpin oleh seorang raja (*liurai*). Jabatan *liurai* itu umumnya turun-temurun. Adakalanya bila calon *liurai* belum tersedia, raja daerah lain dapat diminta untuk diangkat sebagai raja.

Kalau diteliti lebih lanjut, kerajaan-kerajaan di Timor Timur berbeda dengan yang ada di wilayah Indonesia Barat. Di samping wilayahnya sangat terbatas, kerajaan di daerah itu lebih bersifat sebagai sarana kesatuan pemerintahan adat. Kerajaan itu juga memiliki kekuatan bersenjata.



Jenis senjata pedang, yang digunakan oleh raja-raja di Timor-Timur

Dalam tata kehidupan masyarakat Timor Timur mengenal tiga lapisan masyarakat. Lapisan itu ialah *dasi*, *dato*, dan *ema reino*. Namun, pelapisan itu bukan berarti terdapat kasta dalam masyarakat. Dalam pembagian kekuasaan terdapat tingkatan sebagai berikut :



Di dalam setiap kerajaan terdapat dua orang penguasa yang masing-masing dinamakan *makair fukun* dan *dato uain*. Kedua tokoh itu masing-masing berasal dari dua keluarga bangsawan yang ada di kerajaan tersebut, tetapi tinggal di desa-desa yang berbeda. Kedua penguasa itu membawahkan sejumlah kepala keluarga yang memimpin berbagai kelompok seketurunan.

Makair fukun dan dato uain kedua-duanya duduk dalam berbagai pertemuan yang diadakan oleh kerajaan. Keduanya bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Di samping itu, keduanya juga mempunyai peranan sebagai hakim di dalam wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Keduanya tidak berkuasa secara sewenang-wenang, melainkan secara musyawarah dengan para orang tua terutama dari golongan bangsawan dalam segala keputusan dan tindakan-tindakan yang diambilnya. Bentuk pengambilan keputusan melalui musyawarah itu ditemukan pula di berbagai wilayah Indonesia. Bentuk itu adalah pencerminan dari demokrasi yang kita anut, yaitu demokrasi Pancasila.

Dalam setiap kerajaan, yang bertanggung jawab terhadap pemerintah adalah kepala desa. (Pada masa Portugis, pemerintah diwakili oleh seorang pejabat pemerintah yang setingkat dengan

Camat yaitu *chefe de posto*). Ia mengadakan hubungan-hubungan langsung dengan seorang pejabat yang dinamakan *chefe do suco*. Kedudukan *chefe do suco* sebetulnya sama dengan kedudukan pimpinan eksekutif kerajaan, yaitu makair fukun dan datu uain. Akan tetapi, di dalam kenyataannya peranan makair fukun dan datu uain lebih efektif daripada *chefe de suku* dalam hal mengatur dan mengurus masalah-masalah pemerintahan yang ada di wilayah desa. Hendaknya dipahami bahwa raja berkuasa secara simbolik dan tidak secara langsung mengatur pemerintahan di dalam kerajaannya..

Mengenai pemerintahan ini, beberapa cerita rakyat menyebutkan bahwa Maromak O'an berasal dari langit. Jadi, ia "Putra Tuhan". Oleh karena itu, ia dianggap sakral (suci) pula. Penguasa aktif yang menjalankan pemerintahan adalah *liurai*. Orang Wehale menganggap ada tiga *liurai*. Pertama yang berkedudukan di Fatu Aruin (sebelah utara Wehale), kedua Sonbai (pemimpin orang Atoni) dan ketiga yang berkedudukan di Suai - Kamanasa (daerah Belu yang terletak di Timor Timur). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa istilah *Liurai Sonbai* merupakan gabungan atau federasi dari wilayah kekuasaan Belu dan Atoni. Dengan kata lain, federasi daerah yang dikuasai *Liurai* (orang Belu) dengan daerah yang dikuasai Sonbai (orang Atoni); sekarang sebagian tinggal di daerah Oekusi.

Dalam melaksanakan pemerintahan, *Liurai* bertindak sebagai penguasa tertinggi di daerah masing-masing. Besar-kecilnya kekuasaan bergantung pada kondisi setempat (lokal) dan kepribadian individu *liurai* itu sendiri. Pemerintahan dijalankan bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang bertindak sebagai penasihat raja. Keputusan penting diambil setelah mendengar pendapat penasihat. Ada kalanya apabila *liurai* lemah, penasihat lebih berperan dalam pemerintahan. Dari pelaksanaan jalannya pemerintahan itu dapat ditafsirkan, bahwa demokrasi juga sudah dilaksanakan di Timor.

Kekuasaan tertinggi yang berpusat di Wehale jatuh pada tahun 1642. Kejatuhannya disebabkan oleh serangan orang Tupas yang dibantu oleh tentara Portugis dan kaum penginjil Ordo Dominikan. Sejak itu tidak lagi ditemui adanya suatu kekuasaan atau pemerintahan merdeka yang dapat menyatukan kerajaan-kerajaan.

Pada masa kekuasaan Portugis, kedudukan liurai makin mundur. Campur tangan asing itu jelas merugikan kemerdekaan dan kebebasan raja-raja untuk menentukan masa depan kerajaan dan rakyatnya. Kedaulatan tidak lagi berada di tangan rakyat Timor Timur, tetapi pada orang asing, yaitu Portugis. Apalagi liurai yang boleh menjalankan pemerintahan adalah liurai yang mau mengakui kedaulatan Portugis. Kekuasaan mereka akan diakui setelah diangkat oleh Gubernur Portugis. Selanjutnya, para penasihat dan pembesar lainnya juga diangkat oleh pemerintah kolonial setelah ada persetujuan liurai.

RANGKUMAN

1. Timor Timur adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Indonesia. Dari segi fisik, ia bersatu dengan Timor Barat dan merupakan bagian dari busur luar pegunungan Sunda. Oleh karena pengaruh iklim, di Timor Timur jarang turun hujan sehingga menyulitkan usaha pertanian. Kesulitan itu ditambah lagi oleh sifat tanahnya yang berkapur. Bentuk pertanian yang sesuai bagi daerah ini adalah peladangan, peternakan, dan perkebunan seperti kebun kopi yang tidak membutuhkan banyak air.
2. Asal-usul penduduk Timor tidak berbeda dengan penduduk di daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, ciri fisiknya tidak berbeda dengan ciri fisik suku-suku bangsa di Nusa Tenggara dan Maluku, bahkan di Irian Jaya. Begitu pula bahasa dan budayanya yang termasuk rumpun Austronesia, yang tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia sekarang.
3. Bentuk dan corak kehidupan ekonomi rakyat Timor Timur juga tidak berbeda dengan kehidupan ekonomi rakyat Indonesia lainnya. Sebagian besar adalah para petani yang menggantungkan hidupnya pada pengaruh alam. Hasil yang diperoleh sering tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Meskipun begitu mereka telah melakukan hubungan dagang dengan suku-suku bangsa lain di Nusantara bahkan dengan pedagang asing.

4. Ada puluhan suku bangsa di Timor Timur. Ada yang jumlah populasinya besar, tetapi tidak kurang pula ada suku bangsa yang jumlahnya hanya ratusan orang. Meskipun terdiri dari berbagai suku bangsa, mereka tetap bersatu sesuai dengan motto lambang Negara Republik Indonesia, *Bhinneka Tunggal Ika*.
5. Timor ternyata telah lama dikenal oleh masyarakat di Nusantara, bahkan oleh orang asing seperti Cina dan Portugis. Dalam hubungan dengan kerajaan Majapahit, ada dugaan berdasarkan bukti-bukti sejarah bahwa daerah ini merupakan bagian dari kesatuan wilayah kerajaan besar tersebut.
6. Berbeda dengan beberapa daerah di Indonesia, kerajaan-kerajaan di Timor tidaklah sebesar dan seluas kerajaan seperti di Jawa atau di Sumatra. Kerajaan di wilayah ini lebih bersifat kesatuan adat. Akan tetapi, persatuan dari kerajaan-kerajaan yang merdeka itu telah melahirkan satu kerajaan yang berpusat di Weihale, di Belu Selatan. Kerajaan itu begitu berpengaruh sehingga banyak kerajaan lain yang muncul kemudian, merasa mempunyai hubungan dengan Weihale. Persatuan kerajaan-kerajaan merdeka ini akhirnya terganggu perkembangannya ketika Portugis masuk ke Timor. Semenjak Portugis mencengkramkan kekuasaan kolonialnya, kekuasaan raja menjadi lemah.

LATIHAN

A. Pernyataan

1. Apakah yang dimaksud dengan pegunungan Sunda ?
2. Mengapa pertanian yang dilakukan rakyat sulit mendatangkan hasil yang memadai ?
3. Apa yang kamu ketahui tentang artefak ?
4. Coba kamu jelaskan mengapa bahasa pengantar itu perlu dalam kehidupan masyarakat !
5. Mengapa dalam perdagangan dan pelayaran masa lalu perubahan angin muson sangat diperhatikan ?

6. Banyaknya suku bangsa bukan halangan untuk menciptakan kerukunan bangsa. Coba terangkan !
7. Coba kamu jelaskan apa arti suatu prasasti atau laporan bagi pembuktian sejarah suatu tempat.
8. Dalam memajukan suatu kerajaan, apakah diperlukan persatuan rakyatnya? Jelaskan alasanmu!
9. Coba sebutkan beberapa nama kerajaan yang ada di Timor pada abad ke-16 dan ke-17. Kerajaan apakah yang ada di Sumatera, Jawa, dan Maluku pada waktu yang sama?
10. Mengapa pada umumnya kerajaan-kerajaan muncul di tepi-tepi sungai besar, di teluk atau di lingkungan daerah yang subur tanahnya ?
11. Apakah musyawarah-mufakat juga dilaksanakan dalam pemerintahan raja-raja di Timor Timur ?

B. Tugas

1. Coba kamu buat peta Propinsi Timor Timur, berikut dengan pembagian wilayah kabupaten dan tanda-tanda penting lainnya seperti sungai, jalan, dan ibu kota kabupaten!
2. Buatlah karangan pendek tentang Timor Timur sehubungan dengan isi bab ini !
3. Coba kamu buat suatu bagan tentang urutan pemegang kekuasaan adat yang ada di daerahmu! Coba kamu bandingkan dengan pemerintahan yang sekarang ada di daerahmu !
4. Buatlah silsilah tentang keluargamu dan ceritakan masing-masing secara singkat !

BAB II

PENJAJAHAN PORTUGIS

1. Kedatangan Portugis

Kekayaan tanah air Indonesia sejak dahulu sangat menarik minat orang asing untuk datang ke negeri ini. Mula-mula kedatangan mereka hanya sekadar berdagang rempah-rempah yang menjadi daya tarik utama, seperti pala, bunga pala (fuli), cengkeh, dan lada. Tentu saja masih ada hasil bumi lain yang menarik perhatian mereka, seperti cendana, kayu manis, kapur barus, dan emas. Kedatangan orang-orang asing itu semula diterima dengan tangan terbuka oleh bangsa Indonesia. Salah satu dari bangsa Barat yang datang untuk berdagang ke Indonesia ialah bangsa Portugis.

Kehadiran para pedagang bangsa Barat sudah tentu menimbulkan persaingan di antara mereka. Untuk memperoleh keleluasaan berdagang dengan penduduk setempat, tidak jarang mereka melakukan politik adu-domba di antara rakyat, pemuka adat, atau raja. Akibatnya, banyak rakyat yang menderita oleh perlakuan para pedagang asing itu. Bahkan sering juga mereka berusaha mencegah rakyat berdagang dengan orang asing lainnya. Usaha untuk menguasai perdagangan tersebut dinamakan monopoli.

Kerja sama perdagangan antara pedagang asing dengan rakyat di suatu daerah tidak dapat dipertahankan selamanya. Hal itu terjadi oleh banyak sebab. Misalnya, monopoli perdagangan yang dipaksakan pedagang asing sangat tidak disetujui rakyat karena merugikan mereka. Cara monopoli menyebabkan rakyat tidak bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang diinginkan. Oleh karena itu, ada kerajaan yang memanfaatkan persaingan sesama pedagang asing itu. Contohnya para pedagang Portugis yang terusir dari berbagai daerah di Indonesia karena kalah bersaing dengan para pedagang Belanda.

Kehadiran bangsa Portugis di Timor pada abad ke-16 adalah

dalam rangka menguasai jalur dagang rempah-rempah dari Asia ke Eropa dan menyebarkan agama Kristen-Katolik. Dengan mendapatkan rempah-rempah itu langsung dari daerah penghasilnya, mereka tentu membelinya dengan harga yang jauh lebih murah. Sehubungan dengan itu, pulau Timor sebagai penghasil kayu cendana diduga diketahui oleh orang Portugis dari berita-berita para pedagang Asia. Hal itu terjadi setelah Portugis merebut Goa di India pada tahun 1509 dan Malaka pada tahun 1511.

Penamaan pulau ini pada masa itu bermula dari adanya istilah "timur". Lambat laun istilah timur dalam ejaan Portugis berubah menjadi timor. Akhirnya, menjadi ejaan tetap bagi nama pulau ini, yaitu pulau Timor.

Kedatangan orang Portugis ke pulau Timor antara lain juga berkat jasa seorang pemandu pelayaran bangsa Melayu bernama Ismail. Ia bersama armada Portugis yang dipimpin oleh Antonio de Brito dan Limao Abreau mengadakan perjalanan dari Malaka ke Maluku melalui perairan di Nusa Tenggara. Namun, nama pulau Timor pertama kali muncul dalam sebuah buku yaitu *Suma Oriental* tahun 1514. Buku ini ditulis oleh seorang penulis Portugis bernama Tome Pires. Disebutkan bahwa dalam sebuah dokumen Portugis bertanggal 6 Januari 1514, yaitu surat kapitan Malaka kepada raja Manuel di Lisboa menyebut bahwa Timor adalah pulau besar yang menghasilkan cendana, madu, dan lilin. Untuk pergi ke pulau itu, menurutnya diperlukan kapal besar berukuran 500 ton. Keinginan Portugis untuk segera datang ke Timor baru terwujud pada tahun 1515 (18 Agustus) ketika mereka mendarat di Lifau, Oekusi.

Bahwa Pulau Timor banyak juga dikunjungi para pedagang dapat diketahui dari laporan-laporan lain. Duarte Barbosa seorang Portugis, menceritakan bahwa saat itu banyak kapal dari Jawa dan Arab berdagang ke Timor untuk membeli cendana. Begitu pula Pigafetta (orang Spanyol) ketika singgah di Batugede pada tahun 1522 menyebutkan bahwa ia melihat di sana sebuah kapal dari Luzon, Pilipina, yang sedang berlabuh memuat cendana. Demikian pula diketahui bahwa pelabuhan-pelabuhan Kupang, Lifau, Mena, Batugede, dan Manatuto banyak dikunjungi kapal-kapal asing.



Tugu Lifau di Oekusi - Ambeno

Pada tahun 1598 timbul pemberontakan rakyat pertama terhadap orang-orang Portugis di Pulau Solor dan Timor. Pemberontakan untuk membebaskan diri itu muncul karena waktunya dipandang tepat. Saat itu Portugis mendapat serangan dari Belanda. Masa itu terdapat persaingan antara Belanda dan Portugis untuk menguasai tempat-tempat strategis di Indonesia, terutama ditinjau dari ekonomi, masih berlangsung.

Kontak Portugis dengan rakyat di Nusa Tenggara makin meningkat ketika pada tahun 1641 pelabuhan Malaka direbut oleh Belanda. Oleh karena itu, pada tahun 1642 Portugis mendirikan bandar dan benteng di Solor sebagai pusat kekuasaannya. Dari tempat itu mereka mengadakan kunjungan ke Timor, baik untuk perdagangan maupun penginjilan. Masyarakat Kristen yang kemudian muncul di kalangan rakyat setelah Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur, dikenal dengan nama *Tupas*. Sering juga mereka disebut

gente de chapeu atau orang yang bertopi. Mereka ini adalah keturunan yang berdarah "berdarah campuran" dari pada pengikut Portugis, yaitu bekas budak, pembantu pedagang, dan sebagainya. Para pengikut itu berasal dari daerah jajahan Portugis di Afrika, India, Malaka, dan sebagainya. Orang Belanda menyebut mereka *Portugis Hitam*. Meskipun mereka telah berbaur dengan penduduk setempat dan sebagian besar bukan keturunan Portugis, orientasi mereka adalah kebudayaan Portugis. Mereka beragama Katolik, berbahasa Portugis, dan memakai nama orang Portugis. Dalam perkembangannya kemudian, *Tupas* memegang peranan penting dalam sejarah kepulauan Nusa Tenggara Timur (Pulau Flores, Pulau Solor, Pulau Alor, dan Pulau Timor).

Sejak semula, rakyat sudah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap kedatangan Portugis. Tidak saja karena Portugis mengganggu perdagangan tetapi juga mengganggu keamanan rakyat. Dalam persaingan sesama pedagang asing, pada tahun 1613 Belanda berhasil mengusir Portugis dari benteng Solor. Tidak lama kemudian, Larantuka di Flores menjadi pusat kegiatan Portugis di Nusa Tenggara.

2. Penjajahan Portugis

Pemekaran wilayah Portugis di Timor tidak berjalan lancar karena semula daerah ini dianggap kurang baik dan kurang menguntungkan bila ditinjau dari segi ekonomi. Pada tahun 1633 seorang pendeta, Miguel Rangel, berhasil mengadakan usaha pemukiman di Silabau, sebelah barat Atapupu. Selanjutnya, ia mengadakan penginjilan di Amahai, sebelah timur Kupang. Pendekatan alami melalui agama ini menyebabkan hubungan Portugis dengan raja-raja Timor bertambah baik.

Pada tahun 1641, raja-raja Mena, Lifau dan Amanuban mengadakan perjanjian dengan Portugis, yaitu para misionaris Khatolik Dominikan. Perjanjian itu menyebutkan bahwa Portugis akan membaptis raja-raja dan keluarganya menjadi Kristen, sedangkan raja-raja itu mengizinkan Portugis menebang kayu cendana.

Perjanjian berikutnya diadakan oleh raja-raja Luca dan Batimau (Fatumean). Lambat-laun, tidak hanya raja-raja dan keluarganya saja tetapi para penguasa daerah taklukan juga memeluk agama Kristen Katolik. Akhirnya, rakyat pun ikut menganut agama Katolik.

Ada penilaian bahwa sejak perjahjian-perjanjian itu dilakukan, semua kerajaan tersebut telah menjadi sekutu Portugis. Oleh karena itu, semua raja merasa tidak perlu lagi membayar upeti kepada Wehale dan Sonbai. Ketika Portugis melakukan ekspedisi militer pertama ke pedalaman Timor untuk menaklukkan raja Wehale, mereka dibantu oleh pasukan-pasukan dari Mena dan Lifau. Raja Wehale dapat ditaklukkan pada tahun 1642. Dengan demikian, lenyaplah pusat pemerintahan tradisional. Kemudian, keluarga raja itu juga memeluk agama Kristen Katolik.

Jatuhnya bandar Malaka ke tangan Belanda pada tahun 1641 adalah penyebab makin banyaknya orang-orang Portugis bergerak di daerah Nusa Tenggara. Di Pulau Timor mereka mulai menetap di Mena dan Lifau. Bahkan pada tahun 1645 benteng Portugis pertama berdiri di Timor, yaitu di Kupang.

Bertahun-tahun lamanya berbagai usaha dilakukan Belanda untuk mengusir Portugis dari daerah Nusa Tenggara, tetapi tidak berhasil. Hal itu disebabkan antara lain oleh perlawanan kepala-kepala golongan *Tupas*, yaitu Mateus da Costa dan Antonio de Hornay, yang dapat dianggap berhasil. Akhirnya, pada tahun 1662 Belanda mengadakan perjanjian damai dengan Portugis

Sejalan dengan meluasnya kekuasaan Portugis, golongan *Tupas* berusaha untuk menyusun kekuatan di bidang politik baik di Solor, Flores maupun kemudian di Timor. Pusat golongan *Tupas* ialah di Larantuka, Flores. Oleh karena itu, mereka sering juga disebut *Larantuqueiros* sesuai dengan nama tempat Larantuka. Sampai pertengahan abad ke-17 pada hakikatnya golongan *Tupas* memegang pimpinan politik di Timor. Untuk memperoleh kedudukan politik dan sosial, golongan *Tupas* sering mengadakan hubungan perkawinan dengan putri dari salah satu kerajaan, terutama yang letaknya di pesisir. Dengan cara ini mereka dapat menguasai perdagangan di daerah itu.

Pulau Timor termasuk Solor, resmi menjadi daerah jajahan Portugis pada tahun 1681. Selanjutnya, pada tahun 1702 kepala pemerintahan Portugis di Timor adalah Gubernur Antonio Coelho Guerreino. Lifau dipilih sebagai tempat pusat pemerintahan, perdagangan, dan militer. Ternyata golongan *Tupas* tidak menyenangi perubahan itu. Lifau dikepung dan diserang. Akhirnya, pusat pemerintahan dipindahkan sementara ke Manatuto yang diperkuat dengan sebuah benteng pada tahun 1705. Dalam serangan ini raja-raja membantu Portugis karena mereka merasa khawatir dengan meningkatnya kekuasaan *Tupas*.

Sebagai tanda terima kasih, Portugis memberikan gelar-gelar kepada raja-raja yang membantunya. Bahkan juga memberi pangakuan dengan memberikan surat pengangkatan (*carta patente*). Kebijakan itu membawa akibat bahwa walaupun raja-raja selalu dipilih sesuai dengan peraturan adat, tetapi pengesahan pemilihan dan pengangkatan dilakukan oleh Gubernur Portugis. Tindakan itu menunjukkan bahwa kedudukan raja tidak lagi seperti sebelumnya.

Gelar-gelar yang diberikan oleh Portugis adalah kolonel kepada *liurai* (raja), letnan kolonel kepada anak *liurai* yang akan menggantikan ayahnya, mayor kepada seorang *dato* (orang bangsawan), dan pangkat sersan mayor untuk seorang yang lebih rendah jabatannya. *Sonbai'i* mendapat pangkat brigadir.

Sejak kedatangan penguasa baru itu, rakyat Lifau dibebani berbagai macam ketentuan dan mengalami tindakan kekerasan. Rakyat dipaksa melakukan kerja paksa, yaitu mendirikan bangunan dan benteng. Rakyat juga diharuskan mengumpulkan makanan dan membayar pajak. Sejak itu, rakyat Timor mulai dibayangi oleh kekejaman penjajahan.

Kerja paksa yang diharuskan kepada penduduk ialah membangun benteng-benteng di Lifau. Pembangunan itu banyak menguras tenaga rakyat. Selain membangun empat buah benteng, dibangun pula tiga buah pos pengawasan. Benteng dan pos itu dibangun mengitari tempat pemukiman. Pembangunan ibu kota pemerintahan Portugis di Timor itu mengikuti pola pembangunan kota tertutup yang dilengkapi berbagai sarana seperti tempat pemukiman rakyat, rumah

gubernur, asrama tentara, gereja, rumah sakit, dan pos-pos pengawasan. Asrama tentara Portugis berada pada bagian muka pintu gerbang benteng.

Masuknya kekuasaan Portugis ke Timor Timur telah membawa pengaruh besar bagi rakyat dan daerah ini. Kebebasan yang semula dimiliki oleh tiap daerah (raja) berangsur-angsur mulai hilang. Sebaliknya, sedikit demi sedikit dan lama kelamaan kekuasaan penjajah Portugis bertambah kuat. Orang-orang Portugis tidak lagi sekadar mengadakan hubungan dagang, tetapi mulai mengatur jalannya pemerintahan daerah itu.

Pada umumnya penduduk Timor menganggap kehadiran Portugis sama benar atau sejalan dengan agama yang mereka anut. Akan tetapi, ketika menyadari bahwa kehadiran penguasa Portugis tampaknya akan menggantikan kedudukan misionaris Katolik (Dominikan), maka mereka menentang kenyataan itu. Berkali-kali terjadi perlawanan oleh para raja yang bekerja sama dengan Tupas. Keluarga Tupas yang utama adalah keluarga Hornay dan keluarga Costa. Sayangnya kedua keluarga itu juga sering berbeda pendapat dan saling bersaing.

Perebutan pengaruh kekuasaan oleh suatu negara di Timor juga tidak luput dari keterlibatan Belanda yang ingin mengusir Portugis dari daerah ini. Makin berkuasanya Belanda di Timor Barat dengan pusat pemerintahan di Kupang juga mencemaskan Tupas. Oleh karena itu, mereka mengadakan beberapa kali penyerbuan ke Kupang (tahun 1735 dan 1745). Serangan yang paling besar terjadi pada tahun 1749 yang dikenal sebagai *Perang Penfui*. Perang itu dipimpin oleh keluarga Tupas dan Costa dan dibantu oleh raja-raja dari Amarasi, Ambeno, Belu, Larantuka, dan sebagainya.

Meskipun Tupas didukung oleh kekuatan yang lebih besar, tetapi Belanda tetap dapat bertahan di Kupang. Belanda didukung oleh pasukan dari Sawu, Rote, dan Solor. Meskipun peperangan itu dimenangkan Belanda, perang belum berhenti. Pada tahun 1752, Amarasi dan Amakono menyerang Belanda di Kupang, tetapi gagal. Keadaan itu menurunkan pamor Portugis dan Tupas di mata rakyat. Sebaliknya, antara tahun 1756-1761 Belanda mengadakan berbagai

perjanjian dengan raja-raja sehingga makin memperkokoh kekuasaannya di Timor. Bahkan serangannya ke pusat kekuasaan Tupas di Naemuti adalah dalam rangka memenuhi perjanjian tersebut.

Pada tahun 1769 tempat kedudukan Gubernur Timor Portugis dipindahkan dari Oekusi ke Dili. Pemindahan itu tidak hanya karena adanya konflik politik di antara sesama Portugis, termasuk Tupas, tetapi juga karena pengaruh Belanda yang makin kuat di daerah Timor Barat. Selama tahun 1765-1768, misalnya, rakyat Oekusi di Lifau mengangkat senjata melawan Portugis. Dalam perlawanan itu Gubernur Dionisio Goncalves Galvao Rebelo mati terbunuh.

Ketika pemerintahan Portugis baru pindah ke Dili yang letaknya dianggap lebih strategis, perlawanan para raja (liurai) tetap muncul. Akan tetapi, dalam perkembangan kekuasaan pemerintahan jajahan Portugis itu tampak pula bahwa lambat laun para liurai kehilangan kemerdekaannya.

Persaingan antara Portugis dan Belanda di Timor diakhiri dengan diadakannya perjanjian perbatasan kekuasaan di antara kedua belah pihak pada tahun 1859. Dalam perjanjian itu disebut bahwa pulau Flores dan Solor diserahkan Portugis kepada Belanda. Sebaliknya, sebagai imbalan Belanda menyerahkan daerah Maubara dan uang 80.000 florins (uang Belanda). Sejak itu, daerah yang dikuasai Portugis di Timor adalah bagian timur pulau Timor dan daerah Oekusi (Lifau). Perjanjian perbatasan itu sekaligus memperlihatkan pula bahwa rakyat Timor telah dikotak-kotak oleh penjajah tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, tanggung jawab seorang Gubernur Portugis tidak lagi ke Goa di India tetapi ke Macao. Selanjutnya, karena perubahan konstitusi di Portugal, pada tahun 1870 Timor Portugis yang merupakan daerah koloni dijadikan suatu propinsi tersendiri. Gubernur Jose Celestino da Silva (1894-1904) mulai mencoba memperbaiki infrastruktur (prasarana) dan memperhatikan pendidikan untuk rakyat, baik pria maupun wanita. Pada masa pemerintahannya, pemerintah kolonial tidak lagi memerintah melalui kekuasaan tradisional yang dipimpin liurai. Menjelang akhir abad ke-19 mulai diusahakan suatu pemerintahan

kolonial dalam arti sesungguhnya. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 1896 Gubernur Portugis di Timor berada langsung di bawah pemerintah pusat di Lisboa.

Perubahan yang terjadi di Portugal, yang pada tahun 1910 menjadi republik, ternyata tidak berpengaruh positif pada rakyat. Penderitaan rakyat akibat penjajahan tidak mengalami perbaikan. Keinginan bebas dari kekuasaan penjajahan telah menimbulkan pemberontakan yang dipimpin raja Manufahi Dom Boaventura pada tahun 1911-1913. Pemberontakan itu, yang dikenal sebagai *Perang Manufahi*, dapat dipadamkan karena Portugis mendatangkan bala bantuan dari Mozambik. Di samping itu, Portugis melakukan pendekatan pada penduduk dengan melaksanakan taktik sumpah darah.

Usaha lain yang dilakukan Portugis untuk memperkokoh kekuasaannya adalah memanfaatkan kembali perjanjian perbatasan dengan Belanda pada tahun 1917. Perbatasan itu ternyata berlaku sampai sekarang sebagai perbatasan propinsi Timor Timur dengan propinsi Nusa Tenggara Timur (di Timur Barat).

Perkembangan lain yang terjadi dengan terbentuknya pemerintahan Republik Portugal ialah lahirnya gagasan politik integrasi (*politica integracao*). Integrasi dalam arti melalui asimilasi dan pendidikan memungkinkan penduduk pribumi menjadi anggota penuh di dalam masyarakat Portugis. Mungkin dalam rangka itu, maka antara tahun 1912-1914 ada putri para raja yang dahulu menentang Portugis dikawinkan dengan orang Portugis atau Cina. Dengan demikian, ada anggapan ras campuran itu akan menjadi pimpinan yang loyal kepada penjajah karena mereka keturunan Portugis. Di beberapa daerah hal itu memang terjadi.

Sehubungan dengan masalah penduduk tersebut di atas, dalam undang-undang kolonial tahun 1926 disebutkan bahwa di daerah jajahan Portugis (antara lain Timor Portugis) terdapat tiga golongan penduduk. Ketiga golongan tersebut tidak sama derajatnya. Mereka adalah sebagai berikut.

- a. golongan penduduk orang-orang Portugis dan orang-orang kulit putih lainnya.

- b. Golongan penduduk orang-orang Timor Asing dan Liurai-liurai yang menyokong Portugis.
- c. Golongan penduduk pribumi atau rakyat jelata.

Kenyataan ini hampir mirip dengan nasib pribumi di Hindia Belanda, yang sangat jelas merendahkan derajat rakyat Indonesia. Diskriminasi sosial ini sangat bertentangan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Rakyat yang tidak berdaya di Timor Portugis tidak bisa berbuat apa-apa!

Salah satu contoh lain dari diskriminasi yang sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat adalah dalam hal penentuan jumlah pajak. Pajak tanah per hektar hanya 12 escudo, sebab pemilik tanah sebagian besar orang Portugis. Sebaliknya pajak yang dikenakan terhadap penduduk asli lebih tinggi, misalnya pajak untuk tukang pangkas dan tukang jahit. Ketidakadilan itu tidak mungkin dihapus selama penjajah Portugis masih berkuasa.

Menjelang pecahnya Perang Dunia II, Dili diduduki oleh pasukan Gabungan Australia-Belanda. Pendudukan Sekutu tersebut bertujuan untuk membendung serbuan Jepang ke Australia. Pemerintah Portugis yang bersikap netral dalam Perang Dunia II memprotes tindakan tersebut.

Serbuan Jepang ternyata tidak terbendung oleh Sekutu. Pada tanggal 19 Februari 1942 Jepang mendarat di Dili dan Kupang. Pasukan Sekutu melarikan diri ke Australia setelah sebelumnya membunuh rakyat yang membenci penjajahan, seperti di Baucau. Selanjutnya, Jepang menguasai Timor sebagai daerah jajahannya.

Selama pendudukan Jepang rakyat juga sangat mengalami penderitaan. Penjajahan dari mana pun datangnya ternyata tetap menyengsarakan rakyat. Banyak di antara rakyat yang dijadikan *romusha* (pekerja paksa) seperti pekerja rodi, untuk membantu kelancaran perang. Rakyat dipaksa bekerja tanpa dibayar, seperti membuat jalan. Ada juga kejadian, rakyat yang dianggap bersalah dihukum dengan memakan gandum tanpa ditumbuk. Akibatnya tidak sedikit rakyat yang terbunuh oleh perlakuan semena-mena Jepang.



Ilustrasi kerja rodi

Setelah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, untuk sementara Australia mengambil alih pertanggungjawaban keamanan daerah itu. Setelah keadaan menjadi tenteram, Portugis kembali berkuasa di Timor. Untuk melanjutkan pemerintahan kolonial yang dilaksanakan lebih intensif dari sebelumnya.

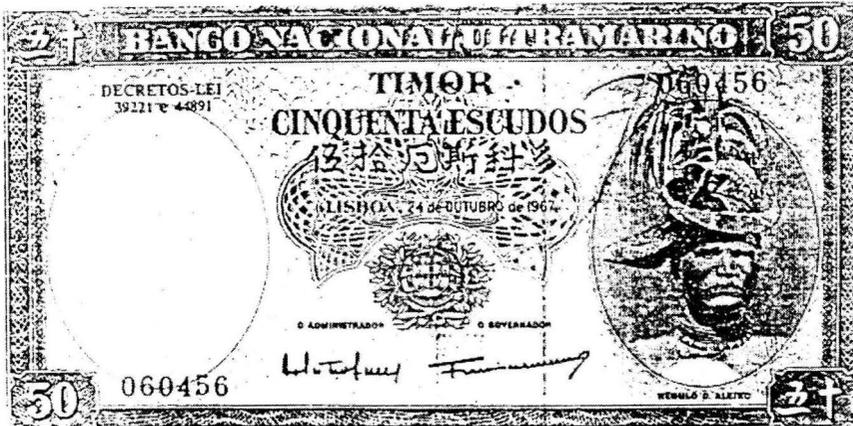
Sejalan dengan revolusi (Perang Kemerdekaan) Indonesia tahun 1945–1949 sesungguhnya di Timor juga timbul beberapa perlawanan atau pemberontakan terhadap kekuasaan kolonialisme Portugis. Pemberontakan itu bermula di Lospalos. Hanya dengan tindak kekejaman antara lain pembunuhan di depan umum yang memakan korban cukup besar, Portugis bisa berhasil memadamkan pemberontakan ini. Rakyat yang takut atas tindakan kejam itu pergi menghindari ke Pulau Kisar, yaitu wilayah Indonesia di Maluku bagian Selatan. Pemberontakan yang terkenal dengan sebutan *Massacre de Lospalos* itu telah berhasil memantapkan semangat rakyat Timor Portugis terutama di daerah Lospalos, Lautem, untuk merdeka dan bersatu dengan Republik Indonesia.

Dalam suasana demikian, polisi rahasia (*pide*) menangkap, menghukum, dan membuang setiap orang yang dicurigai menentang pemerintah kolonial ke Mozambik dan Angola di Afrika. Hampir 200 orang yang ditawan di Pulau Kambing. Dari jumlah itu hanya 20 orang yang kemudian masih hidup. Perlakuan kejam demikian ternyata tidak memadamkan benih-benih semangat kemerdekaan di kalbu rakyat. Hal itu terbukti beberapa tahun kemudian.

Kesewenang-wenangan penjajah Portugis terlihat juga ketika mereka menuntut rampasan perang kepada Jepang. Rakyat dipaksa menuntut ganti rugi dengan mengajukan daftar kerugian yang diderita. Akan tetapi, ketika pada tahun 1954 pemerintah Jepang memberikan pampasan sejumlah 800.000 dolar Amerika, tidak seorang pun rakyat menerimanya.

Penderitaan rakyat itu makin memuncak ketika Pemerintah Portugis menaikkan pajak terhadap rakyat. Umpamanya, pajak kepala yang sebelum Perang Dunia II besarnya 6 pataka, tetapi sesudah perang naik menjadi 9 pataka. Anehnya, ketika pada tahun 1952 dinyatakan bahwa semua penduduk sama statusnya, pajak rakyat bahkan naik menjadi 25 pataka per kepala. Di samping itu, rakyat diwajibkan bekerja bakti satu bulan dalam setahun tanpa gaji. Hal itu berlaku sampai tahun 1960. Rakyat yang tidak mampu melunasi pajak akan dihukum antara lain bekerja di kebun kopi milik orang Portugis. Sering juga hukuman itu berupa siksaan fisik, seperti pukulan pada telapak tangan.

Dalam hal pertahanan keamanan ada keharusan bagi pemuda yang sudah berusia 18 tahun, untuk mengikuti wajib militer selama dua tahun. Sebenarnya ada tentara asal pribumi yang sehari-harinya tidak memakai sepatu dan bergaji 3 pataka sebulan. Meskipun ia anggota tentara, pajak kepalanya tetap harus dibayar seperti juga dikenakan terhadap pegawai pemerintah lainnya.



Contoh mata uang escudo

Suatu kebijaksanaan lain yang merugikan rakyat adalah dalam hal alat tukar, uang. Pada tahun 1962, mata uang pataka diganti dengan uang escudo. Mata uang itu diedarkan tanpa jaminan yang memadai. Akibatnya, uang yang berlaku di Timor Timur tidak laku di daerah jajahan Portugis lainnya.

Perasaan anti penjajahan itu akhirnya meletus dalam suatu perlawanan yang di mulai pada tanggal 7 Juli 1959. Pemberontakan terjadi di Uatocarbau dan Uatolari di daerah Viqueque serta di Baguia terjadi kontak senjata selama satu hari. Para pemimpin pemberontakan itu adalah Jose Manuel Duarte, Gerson Pello, Amaro de Araujo, Albert Ndun, dan Fernando Pinto (dibuang ke Angola dan meninggal di Portugis tanggal 23 Maret 1990). Tujuan pemberontakan ialah ingin melepaskan diri dari penjajahan dan bergabung (integrasi) dengan Republik Indonesia. Pemberontakan itu baru berhasil dipadamkan setelah Portugis melakukan serangan balas yang kejam.

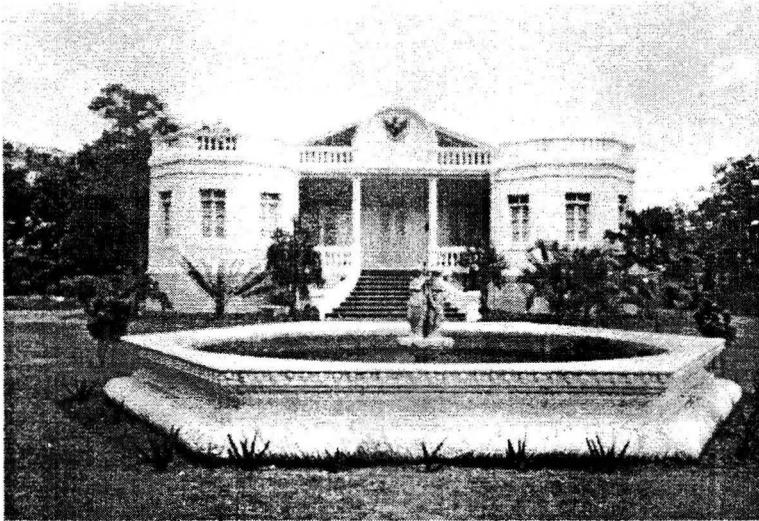
Pemerintah jajahan Portugis berharap agar tindakan keras itu dapat melemahkan keinginan untuk merdeka pada rakyat Timor Timur. Apakah harapan itu berhasil, sejarahlah yang akan membuktikan. Namun, harus diakui bahwa pengaruh Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung terhadap gerakan kemerdekaan di Timor Portugis belum begitu besar. Berbeda dengan beberapa daerah jajahan di Afrika, konferensi itu memang sangat berpengaruh.

Tidak lama sesudah pemberontakan yang terjadi di Timor Portugis, terjadi pula pemberontakan di Angola yang juga ingin merdeka tahun 1961. Pemberontakan itu membawa dampak pada pemerintahan Portugis. Sejak tahun 1962 dibentuk Kementerian Seberang Laut yang sebelumnya diberi nama Kementerian Daerah Jajahan. Kementerian itu berhak membentuk dewan administrasi pengadilan negeri dan perluasan pendidikan, penghapusan undang-undang kolonial (yang tidak sesuai lagi), dan memberi hak kepada penduduk pribumi untuk menjadi warganegara penuh dalam hukum Republik Portugis. Kesemuanya itu tentu disesuaikan dengan kepentingan penjajahan. Kepentingan rakyat tentu tetap terabaikan. Hal itu terbukti ketika pada tahun 1962 peraturan keuangan berubah dari pataka ke escudo, pajak rakyat tetap bertambah tinggi. Celaknya mata uang escudo itu tidak berlaku di daerah lain.

Dalam melaksanakan pemerintahan, Gubernur dibantu oleh badan-badan berikut.

- a. Dewan Legislatif (*Conselho Legislativo*) yang beranggotakan 14 orang. Sebelas orang dipilih dan tiga orang ditunjuk oleh Gubernur.
- b. Dewan Pemerintah (*Conselho do Governo*) yang beranggotakan tujuh orang ditunjuk pemerintah dan tiga orang mewakili raja, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Di samping itu pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh beberapa jawatan atau dinas yang disebut *Reparticao Provincial dos Servigos* seperti Dinas Administrasi Sipil, Dinas Keuangan dan Perbendaharaan, Dinas Bea Cukai, Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan dan Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Transpor, Dinas Ekonomi, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kehewanran.



Bangunan bekas Istana Gubernur Portugis

Pada tahun 1963 keluar peraturan tentang pembagian pemerintah daerah itu, yang menetapkan bahwa Propinsi Timor Portugis terdiri atas :

- a. Satu kota praja (kotamadya) di Dili yang terbagi-bagi dalam beberapa bagian kota (*bairaro*).
- b. Kabupaten (*concelho*) dan kabupaten masa peralihan yang kemudian berkembang menjadi kabupaten (*circunscricao administrativo*).
- c. Kabupaten dan kabupaten masa peralihan dibagi menjadi beberapa kecamatan (*posto administrativo*).
- d. Pos-pos administratif kecamatan dibagi lagi dalam *regedorias* yang selanjutnya dibagi lagi dalam kelompok perkampungan atau suku (*grupo de provoacoes*).

Adapun kabupaten dan kabupaten masa peralihan itu ialah sebagai berikut :

1. Kabupaten Dili (termasuk Aileu dan Liquisa)
2. Kabupaten Baucau
3. Kabupaten Bobonaro
4. Kabupaten Covalima (Suai)
5. Kabupaten Lautem (Lospalos)
6. Kabupaten Manatuto
7. Kabupaten Suro (Ainaro)
8. Kabupaten Manufahi (Same)
9. Kabupaten Viqueque
10. Kabupaten Ermera
11. Kabupaten Oekusi

Pada tahun 1975 menurut Diploma Legislativa No. 3/75 pembagian pemerintah daerah itu makin diperjelas lagi. Berdasarkan peraturan tersebut wilayah Timor Portugis dibagi dalam 13 kabupaten dan 63 kecamatan. Ini berarti bahwa Liquica dan Aileu yang semula termasuk Dili menjadi kabupaten tersendiri. Bersamaan dengan itu diputuskan juga bahwa kesatuan administratif yang lebih kecil adalah *regulox* (kerajaan), kemudian *suco* (desa) dan *provoacao* (kampung). Secara administratif pada akhir pemerintahan kolonial, propinsi di Timor Portugis terdiri atas 13 kabupaten, 63 kecamatan, 33 kerajaan, 473 desa, dan 1.718 kampung.

Betapa parahnya nasib rakyat Timor Portugis terlihat dari laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disiarkan pers tanggal Juli 1973. Laporan itu menyebutkan bahwa Timor Timur adalah :

- a Contoh kolonialisme terakhir abad ke-19 dengan pemerintahan yang sangat kasar.
- b Tanpa sistem pengajaran yang berarti
- c Ekonomi dikuasai sepenuhnya oleh penjajahan.

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) menyatakan bahwa:

- tidak ada tempat di seluruh dunia yang paling celaka dengan banyaknya penderita penyakit TBC seperti di Timor Timur.
- banyak berjangkit penyakit malaria
- situasi tahanan masih seperti abad ke-15
- angka kelahiran sangat rendah, padahal lebih dari 50% bayi meninggal sebelum berumur setahun sehingga angka kematian juga cukup tinggi.

3. Perkembangan Agama Katolik

Sumber Portugis menyebutkan bahwa pada tahun 1512 telah berkunjung dua orang misionaris ke Mahata (dekat Oekussi/Ambeno). Mereka adalah Fre Antonio Taveiro O.P. dan Fre Antonio da Cruz O.P. yang merupakan misionaris pertama ke Timor. Mereka memperkenalkan dan mengajarkan agama Katolik kepada penduduk. Ternyata penduduk menyambut baik agama tersebut sehingga berkembang amat pesat. Pada tahun 1556 diketahui bahwa penduduk Timor yang menganut agama Katolik berjumlah 5.000 orang.

Perkembangan agama itu semakin baik ketika pada tahun 1558 berdiri Diosis Malaka yang meliputi daerah, antara lain Timor, Solor, dan pulau-pulau sekitarnya. Tidak lama kemudian pada tahun 1561 mulai didirikan pusat-pusat karya misi dan asrama-asrama di pulau Timor dan Solor. Selanjutnya, Solor dan Larantuka (di Flores) menjadi pusat kegiatan misionaris Dominikan untuk wilayah Nusa Tenggara. Di Timor sendiri kegiatan misi berpusat di Baucau, Dili, Lifau, dan Kupang.

Sesudah tahun 1598, persaingan antara Portugis dengan Belanda meningkat menjadi peperangan antara kedua belah pihak. Dalam situasi demikian rakyat Solor dan Timor melakukan perlawanan terhadap Portugis untuk membebaskan diri dengan akibat yang sangat buruk sekali. Banyak bangunan gereja hancur dan ribuan umat Katolik di kedua pulau itu menjadi martir. Meskipun demikian penyebaran agama Katolik tetap berlanjut terus.

Ketika bandar Malaka jatuh ke tangan Belanda tahun 1641, Uskup Malaka pindah ke Kupang. Pada waktu itu dapat dikatakan bahwa antara kekuasaan sipil (pemerintah) dengan gerejani berada dalam satu tangan, yaitu para misionaris. Artinya seorang misionaris bukan saja sebagai pemimpin agama melainkan juga seorang pemimpin politik. Bahkan ia juga menjadi pejabat militer. Barulah ketika pusat kekuasaan Portugis pindah ke Lifau, kekuasaan sipil (pemerintah) terpisah dari kekuasaan gerejani.

Ketidak sesuaian kebijaksanaan antara pemerintah dengan gerejani telah menimbulkan pertentangan antara gubernur dengan uskup. Pertentangan itu bahkan melibatkan rakyat Timor ketika pada tahun 1731 Padre Manuel de Pillar dari Dili dan Frei Bortolomeu Pereira O.P. dari Batugede melawan Gubernur Portugis.

Untuk mempermudah penyebaran agama di Timor Portugis, maka para misionaris dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, Kelompok Utara meliputi Batugede, Maubara, Dili, Laclo, Manatuto, Laleia, dan Baucau. Kedua, Kelompok Selatan meliputi Suai, Bubususo, Barilque, Viqueque, dan Luca. Hasilnya sangat menggembirakan karena ajaran agama makin meresapi hati umat. Pada tahun 1734, raja Portugis memerintahkan untuk membangun sebuah seminar di Oekusi untuk mendidik penduduk setempat menjadi tenaga-tenaga karya misi di antara penduduk pribumi sendiri. Tahun 1747 berdiri lagi sebuah seminari di Manatuto. Mungkin karena perkembangan itu, pada tahun 1748 seorang misionaris Timor diangkat menjadi Uskup Malaka. Sebuah sumber menyebutkan bahwa dalam pengembangan agama itu di Timor Portugis pada tahun 1780 di Timor telah berdiri 50 gedung gereja, tidak terhitung kapela-kapela.

Pertentangan antara pemerintah dengan gerejani masih berlanjut. Tahun 1787 Gubernur menuduh Padre Vikjen membujuk raja Manatuto untuk melawan Portugis. Ia dipenjara dan dihukum ke daerah lain. Pada waktu itu karya misi mengalami krisis karena misionaris asing dikembalikan. Pelayanan umat terlantar. Pada tahun 1811 hanya tinggal empat buah gereja dan tiga misionaris asing (bukan warga negara Portugal).

Pada tahun 1859 antara Portugis dan Belanda diadakan suatu perjanjian baru. Perjanjian itu antara lain berbunyi: "...orang Katolik di mana pun mereka berada boleh dilayani dengan izin pemerintah". Perjanjian itu merupakan suatu masa baru bagi gereja di Timor. Begitulah pada tahun 1875 atas persetujuan Paus di Roma, Timor menjadi bagian yurisdiksi (kekuasaan) Diosis Macao. Pada tahun 1875 Padre Antonio Juaqueim de Medeiros ditugaskan untuk membuat visitasi pastoral ke tempat-tempat kegiatan misi di seluruh Timor. Berdasarkan laporan itu, pada tahun 1877 Uskup Macao mengangkat pastur de Medeiros menjadi Vikaris Jenderal (Vikjen) dan Pimpinan Karya Misiones (Superior Gereja Timor) di Timor dengan dibantu oleh tujuh orang imam. Vikjen tinggal di Lahane, Dili, yang menjadi pusat misi.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, untuk pengembangan agama, tempat karya pastora para missionaris dibagi sebagai berikut.

- a. Padre Francisco Xavier de Mello mendapat tugas di Oekussi dan mengambil alih tugas-tugas di Noemut (Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur)
- b. Padre Jose Antonio Pires bertugas di Batugede.
- c. Padre Carlos Pareira Batista bertugas di Dili.
- d. Padre Manuel Maria Alves da Silva bertugas di kerajaan Lacro, Laleia, Venasse, dan Cuirui.
- e. Padre Sebastian Maria Aparicio da Silva bertugas di daerah Lacluta, Dilor, Barique, Viqueque, Bililotu, Samoro, Alos, dan Bubusuro.

Di samping itu, atas perintah Vikjen, dibangun sekolah-sekolah yang dipimpin langsung oleh para misionaris dan dibantu para tenaga muda yang dibina sekolah tersebut. Selain beberapa sekolah di Dili juga didirikan sekolah di Manatuto, Barique, Liquica, dan Bazartete. Murid-murid sekolah tersebut adalah putra-putri para pemuka masyarakat.

Ada berita dari Diosis Dili menyebutkan antara lain bahwa ada:

- a. usaha untuk mempelajari bahasa-bahasa daerah bagi kepentingan agama.
- b. upaya merangkul raja dan keturunan untuk mengirim putra-putrinya ke sekolah-sekolah misi dalam rangka pendekatan terhadap mereka; dan
- c. tindakan bijaksana dari para misionaris apabila berhadapan dengan praktik kehidupan masyarakat antara lain praktik animisme dan kepercayaan terhadap benda-benda kuna yang memiliki kekuatan gaib. Benda-benda sakral (suci) itu sering dikeluarkan bagi kepentingan upacara keagamaan pada masyarakat tradisional.

Ketika Padre Jose da Costa Nunes diangkat menjadi Uskup Macao, dan Timor pada tahun 1920, kegiatan-kegiatan karya misi di Timor memasuki proses instensifikasi. Perhatian dipusatkan kepada kunjungan berkala ke tengah umat di tempat-tempat misi. Sekolah-sekolah misi dibangun secara meluas, sedangkan gereja kapela dan pusat-pusat misi baru mendapat perhatian. Tampaknya pemerintah mendukung kegiatan karya misi gereja Katolik di Timor Timur. Hal itu terbukti ketika pendirian sebuah seminari diosesan yang pertama di Soibada tahun 1936. Tahun 1950 seminari itu di pindahkan ke Dili. Tahun 1951 dipindahkan lagi ke Dare dengan nama *Seminario de Nossa Senhora de Fatima*.

Saat proses integrasi berlangsung, umat Katolik terpecah-belah dalam partai-partai politik. Pihak gereja Katolik berusaha untuk tidak terlibat atau memihak. Pihak gereja mengimbau agar persatuan dan kesatuan umat tetap terpelihara. Begitu pula pada masa integrasi. Ketika pembangunan giat dilaksanakan, Gereja Katolik bersama pemerintah dan ABRI bekerja sama untuk meningkatkan kehidupan rakyat dalam berbagai bidang.

Perkembangan agama Katolik yang tetap berlanjut itu dibuktikan lagi oleh pengangkatan Mgr. Carlos Filippe Ximenes Belô SDB sebagai Uskup Titularis Lorium oleh Paus Paulus pada tanggal 19 Juni 1988 di Dili. Dalam tugas sehari-hari Uskup dibantu oleh seorang Vikaris Jenderal dan seorang Sekretaris Keuskupan. Di samping itu, dibentuk sejumlah komisi untuk memperlancar kegiatan karya misi gereja lokal di Diosis Dili

RANGKUMAN

1. Seiring dengan kedatangan para pedagang Portugis datang pula ke Timor para misionaris agama. Sambutan rakyat pada tiap daerah terhadap kedatangan mereka tidaklah sama. Keinginan Portugis untuk menguasai daerah dan perdagangan ditentang keras oleh rakyat. Sebaliknya, untuk kegiatan misionaris, rakyat menerima dengan tangan terbuka sehingga banyak yang meninggalkan kepercayaan aslinya untuk selanjutnya memeluk agama Katolik.
2. Di mana-mana tujuan imperialis dan kolonialis adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Untuk mencapai itu mereka tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan, bahkan kalau perlu membunuh dan membuang rakyat ke daerah yang jauh sekali dari kampungnya.

Untuk mendukung penjajahannya, Portugis membentuk suatu pemerintahan kolonial di Timor Portugis. Pelaksanaan pemerintahan itu selalu merugikan rakyat karena diiringi dengan berbagai peraturan seperti pajak yang tinggi, kerja paksa (rodi), dan penyerahan bahan makanan.

Kemajuan zaman, terutama sesudah Perang Dunia II pada saat tuntutan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa terjajah sangat menonjol, ternyata tidak menyadarkan pemerintah kolonial Portugis. Tampaknya hanya perlawanan rakyatlah yang akan membuat mereka angkat kaki dari bumi Timor Timur.

A. Pertanyaan

1. Apa pendapatmu tentang tujuan kedatangan Portugis ke Timor?
2. Di daerah mana pertama kali Portugis mendirikan bandar dan benteng di Nusa Tenggara?
3. Dalam usaha menguasai daerah Nusa Tenggara, termasuk Timor Timur, Portugis mendapat perlawanan dari dua pihak. Siapakan pihak-pihak tersebut dan mengapa demikian?

4. Coba kami ceritakan tentang kekuasaan para liurai pada masa penjajahan Portugis.
5. Menurut pendapatmu apakah ada usaha perbaikan pemerintahan yang menguntungkan rakyat Timor Timur?
6. Coba kamu sebutkan penggolongan penduduk pada masa penjajahan, Apa pendapatmu tentang hal itu?
7. Ceritakanlah bagaimana nasib rakyat pada masa penjajahan Jepang!
8. Mengapa polisi rahasia (pide) pada masa penjajahan sangat ditakuti oleh penduduk?
9. Coba kamu jelaskan apa beda kerja gotong royong dengan kerja rodi!
10. Mengapa mata uang escudo itu merugikan rakyat?
11. Coba kamu sebutkan beberapa dinas dalam pemerintahan waktu dulu!
12. Apa yang kamu ketahui tentang laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kesehatan Sedunia?
13. Coba kamu ceritakan perkembangan awal agama Katolik di Timor!
14. Coba kamu terangkan mengapa sekolah-sekolah mendapat perhatian dari kegiatan misi!
15. Coba kamu sebutkan upaya Diosis Dili untuk mendekatkan diri dengan rakyat!

B. Tugas

1. Coba kamu buat suatu karangan ringkas tentang penderitaan rakyat pada masa penjajahan!
2. Buatlah suatu lembaran catatan yang isinya tentang peristiwa-peristiwa penting di Timor Timur sebelum integrasi!
3. Coba buat karangan singkat tentang suatu bangunan bersejarah yang dibangun pada masa penjajahan Portugis di daerahmu!

BAB III

PERLAWANAN RAKYAT TERHADAP PORTUGIS

Sejak semula kehadiran kolonialis Barat di Indonesia sudah disambut dengan sikap permusuhan dari rakyat Indonesia. Sikap permusuhan itu ada yang dilakukan secara diam-diam, tetapi sering juga dilakukan secara terbuka. Akibatnya, di mana-mana di Nusantara ini timbul berbagai perang sebagai tanda tidak senang dan usaha mengusir penjajah Barat. Di timor juga terjadi hal yang sama terhadap penjajah Portugis. Tindakan semena-mena yang dilakukan penjajah tidak terderitakan lagi oleh rakyat.

Dari berbagai sumber diperoleh data bahwa perlawanan rakyat tersebut cukup banyak terjadi di berbagai daerah. Ada yang menyatakan lebih dari 100 kejadian. Tentu saja kejadian itu tidak mungkin diuraikan semua dalam buku ini. Misalnya :

- a. Perlawanan Raja Laga dan Raja Ermera tahun 1863.
- b. Perlawanan Raja Laleia dan Raja Laclubu tahun 1879.
- c. Perlawanan Raja Cota Baba dan Raja Cova tahun 1881-1882.
- d. Perlawanan Raja Motael dan Raja Bidau tahun 1887.
- e. Perlawanan Raja Simao Vessaru tahun 1892.
- f. Perlawanan Rakyat Cailaco tahun 1892.
- g. Perlawanan Rakyat Maubara tahun 1893.
- h. Perlawanan Raja Daurte Manufahi tahun 1897.
- i. Perlawanan Ambeno tahun 1912.

Beberapa dari perlawanan rakyat itu dapat diuraikan di sini sebagai berikut.

1. Perjuangan Rakyat Oekusi (1765-1768)

Usaha Portugis untuk memantapkan kekuasaannya di daerah Oekusi dilakukan tanpa mengindahkan kepentingan rakyat. Rakyat dipaksa bekerja untuk mendirikan berbagai bangunan untuk kepentingan

Portugis. Mereka juga dipaksa membayar pajak, sejumlah yang diinginkan Portugis. Bahkan mereka juga diwajibkan untuk menyerahkan bahan makanan. Perlakuan kejam itu telah mempertebal rasa benci pada penjajah.

Rakyat tidak berdaya karena kondisinya tidak mengizinkan. Mereka harus memperhitungkan kemampuan persenjataan Portugis yang jauh lebih hebat. Namun, mereka berharap suatu ketika akan datang masa pembalasan itu.

Pemberontakan itu bermula dari adanya keinginan Portugis untuk membuat kanal dari benteng ke laut. Meskipun jaraknya tidak terlalu jauh, karena dikerjakan dengan alat sederhana tentu membuat rakyat sengsara. Apalagi daerah yang akan dilalui kanal ada yang berbatu keras. Perlakuan yang kasar terhadap pekerja akhirnya meletus dalam suatu pemberontakan. Pemimpin pemberontakan adalah Ornai dan Domingos da Costa. Pemberontakan itu baru berhasil dipadamkan setelah Portugis mendatangkan bantuan pasukan dari Goa.



Pemberontakan Oekusi

Pemberontakan tidak melemahkan sikap Portugis. Penindasan terhadap rakyat tetap berlangsung. Pada tahun 1768 rakyat Oekusi berontak kembali. Pemberontakan itu berlangsung lebih besar karena mendapat dukungan raja Kupang, Rote, dan Alor. Meskipun dengan susah payah, akhirnya Portugis dapat memadamkan pemberontakan itu. Rakyat yang takut terhadap pembalasan Portugis, banyak yang melarikan diri ke daerah kekuasaan Belanda.

Bagi Portugis, pemberontakan itu membuat mereka tidak merasa aman lagi di Oekusi. Pada tahun 1769, pusat pemerintahan dipindahkan ke Dili. Sejak itu, perhatian Portugis di pulau Timor mulai diarahkan ke bagian timur pulau itu.

2. Perjuangan Raja Luca (1779 – 1785)

Penderitaan akibat penindasan penjajahan Portugis membangkitkan keinginan berontak di mana-mana. Setelah pemberontakan di Oekusi berakhir, timbul lagi pemberontakan yang dipimpin oleh Raja Luca di Viqueque tahun 1779.

Ada sesuatu yang menarik dalam pemberontakan itu. Orang Portugis menyebutnya sebagai "perang orang gila" (*a guerra dos doidos*). Sebuahan demikian diberikan karena:

- 1) pemimpinnya menganggap dirinya sebagai "nabi" (semacam "Ratu Adil"), dan
- 2) mendapat dukungan rakyat dan raja-raja dengan keyakinan bahwa roh-roh nenek moyang mereka akan membantu mengusir Portugis.

Pemberontakan yang diyakini mendapat dukungan roh nenek moyang itu berlangsung sampai tahun 1785. Selama enam tahun Portugis harus bersusah payang memadamkannya.

3. Perjuangan Manufahi (1911 - 1913)

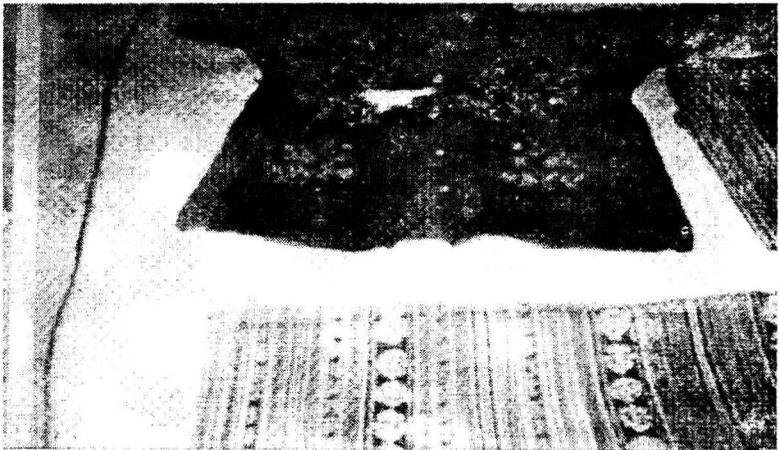
Perubahan sistem pemerintahan yang terjadi di negeri Portugis menjadi republik ternyata tidak membawa perubahan nasib rakyat di negeri jajahannya termasuk Timor Portugis.

Rakyat mengerti bahwa negeri jajahan adalah tempat penjajahan mengeruk keuntungan. Timor-Timur tidak kaya dengan sumber daya alam. Namun, rakyatnya tetap dibebani oleh berbagai pajak yang tinggi. Perbaikan yang dilakukan dalam pemerintahan awal abad itu tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Kehidupan rakyat betul-betul menyedihkan.

Yang juga menyakitkan hati rakyat adalah perlakuan Portugis terhadap kehidupan norma-norma adat-istiadat, termasuk perusakan struktur pemerintahan kerajaan. Menyuruh seorang raja bekerja di perkebunan Portugis dengan perlakuan yang tidak pantas sungguh menyakitkan hati rakyat.

Penderitaan rakyat yang tidak tertahankan lagi itu akhirnya meletus dalam suatu pemberontakan. Raja-raja, yang setiap tahun harus menghadap Gubernur di Dili, menggunakan kesempatan itu untuk bersepakat melakukan suatu pemberontakan yang dipimpin oleh raja Manufahi, Dom Boaventura.

Pemberontakan yang bertujuan membebaskan kerajaan dari kolonialis Portugis dirancang pada tanggal 24 November 1911. Pemberontakan direncanakan akan dilakukan pada awal tahun baru 1912.



Peninggalan raja Boaventura

Di luar rencana, seorang rakyat telah diperkosa oleh seorang Tropas (tentara Portugis). Suaminya menuntut agar Raja Boaventura mengambil tindakan tegas terhadap pemerkosa itu. Raja disindir, "bila tidak berani membela rakyat lebih baik ia tidak lagi memakai celana laki-laki". Demi membela hak asasi dan kehormatan rakyatnya, Raja membunuh tentara berkulit putih itu. Akhirnya pemberontakan meletus.

Gubernur Filomeno da Camara sangat terkejut dengan peristiwa itu. Ia segera menyiapkan pasukan. Dalam menghadapi serangan tentara Portugis, Raja Boaventura membuat benteng pertahanan di gunung Manufahi (gunung Reimera, gunung Riak, dan gunung Kablaki). Para pejuang dikepung dari segala penjuru sehingga benteng itu dapat direbut Portugis. Hampir dua tahun lamanya para pejuang dapat bertahan. Namun, karena kekuatan benteng-benteng pertahannya makin berkurang dan logistik serta persenjataan makin menipis, maka perlawanan pun makin lemah. Apalagi beberapa tokoh pejuang banyak yang tewas, seperti Domingos Ornai, dan menyerah karena tidak kuat lagi berjuang di Betano Resoko (pantai selatan Same).

Raja Boaventura tetap belum mau menyerah. Ia melanjutkan perjuangannya di Loilere, Ermera. Akhirnya, karena kekurangan senjata dan logistik, iapun tertangkap di Same. Selanjutnya ia di bawa ke Dili dan dihukum mati di sana.

Dalam menyelesaikan Pemberontakan Manufahi, pemerintah kolonial Portugis mengalami kesulitan menghadapi tekad rakyat. Dengan licik ia menggunakan taktik sumpah adat. Sumpah itu adalah suatu bagian dari adat-istiadat rakyat Timor yang dilakukan sebagai suatu cara untuk mengikat tali kerukunan atau persahabatan. Sering juga hal itu dilakukan untuk memulai dan mengakhiri perang antarkerajaan atau antarsuku. Dengan adanya sumpah itu, dapat terjalin hubungan yang erat, saling menghormati dan saling membantu dalam keadaan darurat atau pada saat dibutuhkan.

Sumpah adat yang dimanfaatkan Portugis dengan para Liurai di daerah perlawanan rakyat jelas bertujuan menyelamatkan

kekuasaannya. Di samping itu, untuk menambah kekuatannya, Portugis mendatangkan bala bantuan dari Mozambik, Afrika.

Banyak di antara pejuang Timor, yang ingin mengusir penjajah itu, ditawan dan dibuang ke Afrika. Biasanya pembuangan berarti tidak mungkin kembali lagi ke tanah air. Menurut catatan ratusan orang yang tewas dan ribuan orang yang ditangkap. Perang ini mempengaruhi kekuasaan Portugis di Timor. Tidak hanya daerah kekuasaan makin diperluas, tetapi juga daerah-daerah pelosok di pegunungan mendapat perhatian pemerintah. Sejalan dengan itu, daerah-daerah pegunungan yang subur dimanfaatkan untuk menjadi tempat penanaman kopi. Tidak mengherankan jika kemudian kopi menjadi komoditi utama bagi ekspor Timor Timur.

4. Perjuangan Viqueque tahun 1959

Tindakan keras dan kejam yang dilakukan penjajahan Portugis terhadap rakyat Timor Timur telah merangsang lahirnya benih-benih pemberontakan dengan tujuan menggabungkan Timor Portugis ke dalam Republik Indonesia yang sudah merdeka. Oleh karena itu, para pemuda mulai berpikir membentuk suatu organisasi untuk melawan penjajah Portugis. Pada waktu itu, Timor Timur belum mempunyai seseorang yang mampu memimpin organisasi tersebut dan mampu pula mewakili rakyat mengajukan keinginan mereka pada pemerintah Indonesia bahkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila diperlukan. Kontak yang dilakukan dengan Konsul Indonesia di Dili, Lasut Yunus Suwarno menumbuhkan bahkan mempertebal semangat kemerdekaan pada sejumlah nasionalis Timor Timur. Pembicaraan tentang kemerdekaan dan integrasi itu bermula di Dili. Beberapa orang raja atau tokoh masyarakat dengan tegas menyokong ide tersebut, seperti Amaro de Araujo (semula tokoh masyarakat yakni Raja Viqueque), Anthonio da Costa Soares (Raja Uatolari), Joaquim Pareira (Raja Quelikai), Jose Maria Maia (Raja Ermera), dan Fernando Pinto (Raja Uatocarbau).

Pada akhir tahun 1958 dukungan rakyat untuk berintegrasi sudah meluas ke Aileu, Same, Ermera, Dili, Manatuto, Baucau, Viqueque, dan daerah-daerah lain. Rakyat di daerah-daerah itu

menyadari bahwa sesungguhnya mereka bersaudara dengan rakyat di Timor Barat. Hanya penjajahan yang menyebabkan mereka berpisah, walau mereka tidak rela.

Pada bulan Mei 1959 mulailah diorganisasikan kelompok-kelompok perlawanan. Menurut rencana, pemberontakan akan dilakukan serentak pada malam pergantian tahun 1959 ke 1960. Saat peralihan tanggal tersebut biasanya masyarakat di Timor Portugis, termasuk anggota pasukan Portugis, lengah karena akan mengadakan perayaan menyambut tahun baru.

Pada tahap pertama menurut rencana akan diadakan perebutan senjata di semua markas tentara Portugis. Perebutan senjata diawali di Dili.

Persiapan untuk mencetuskan suatu pemberontakan rakyat mulai ditingkatkan. Dengan harapan akan dibantu dari belakang oleh sukarelawan yang datang dari Kefa, Kalabai, dan Kisar yang dikoordinasi oleh Mayor Mustamin. Sementara itu, ada empat belas orang militer masuk ke Oekusi dan minta suaka politik kepada pemerintah Portugis. Permintaan itu diterima dan mereka dibawa ke Baucau. Di sana mereka bergaul akrab dengan penduduk setempat, dan mereka berjanji akan membantu rakyat kalau mau memberontak melawan penjajahan Portugis. Itu merupakan tanda bantuan pertama yang disiapkan di tempat tersebut.

Karena masih kurang pengalaman, pemuda-pemuda semakin galak. Mereka berani berbicara "nyaring" di mana-mana, khususnya ketika minum di restoran, menonton film di bioskop, dan bermain sepak bola. Mereka mulai memakai badge atau lencana Merah Putih sebagai tanda keinginan berintegrasi atau menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Bendera Merah Putih juga disiapkan untuk dikibarkan pada waktunya.

Adanya rencana pemberontakan rakyat itu akhirnya tercium oleh pemerintah kolonial Portugis karena laporan seorang mata-matanya di Dili. Pemerintah kolonial mengetahui bahwa basis utama kekuatan perlawanan rakyat terdapat di wilayah Viqueque, yaitu di Uatocbau dan Uatolari. Banyak tokoh pejuang di Dili, Aileu,

Ermera, Manututo, Baucau, Lautem, dan lain-lain ditangkap oleh pemerintah pada tanggal 1, 2, dan 3 Juni 1959.

Di Viqueque mulai terdengar berita bahwa di Dili terjadi kerusuhan-kerusuhan besar dan penangkapan tokoh-tokoh pejuang di mana-mana. Dengan adanya kejadian tidak terduga itu, para pejuang Timor Timur di Viqueque memutuskan untuk bertindak sesuai dengan rencana yang sudah disepakati di Dili, yaitu suatu pemberontakan.

Serangan pertama tanda dimulainya pemberontakan rakyat ditujukan ke kantor Kabupaten Viqueque pada tanggal 7 Juni 1959. Lebih kurang 60 orang pemuda di bawah pimpinan Jose Duarte, Gerson Pello, dan Jobert Moniaga dalam serangan itu berhasil merebut sekitar 47 pucuk senjata laras panjang "Krapache" serta amunisi. Sementara itu, di Uatocarbau berhasil direbut 12 senjata dan di Uatolari juga 12 senjata. Di beberapa tempat juga terjadi hal yang sama.

Pemberontakan yang berujung melepaskan diri dari penjajahan dan bergabung dengan Indonesia dipimpin oleh sejumlah pemimpin. Misalnya, di daerah Viqueque terdapat Jose Manuel Duarte, Amaro Jordao de Araujo (Raja Viqueque). Mateus J. De Araujo, Joaquim Amaral, Gerson Pello, Jermis Pello, dan Jubert Moniaga. Di daerah Uatocarbau dan Uatolari terdapat Fernando Pinto (Raja Uatocarbau), Antonio da Costa Soares (Raja Uatolari). Luis Gamboa, Liurai Abilio, Gaspar Mascarehas, Alberto Mean, Liurai Estevaeo, Liurai Gregorio, Joao Fernandes, dan Fernando Amaral. Dari daerah Baucau dan Manututo - Dili adalah tokoh Abel da Costa Belo, Frederico da Costa Almeida, Fransisco Pereira da Silva, Germano Pereira da Silva, Jose Benny Joaquim, Venancio da Costa Soares, dan Joaquim Pereira (Raja Quilicai).

Untuk memadamkan pemberontakan itu, pemerintah kolonial Portugis pimpinan Gubernur Serpa Rosa memperkuat lagi pasukannya dengan mendatangkan secara darurat satu kompi Tropas dari Goa, India. Pasukan itu tiba di bandara Baucau pada tanggal 11 Januari 1959. Pasukan itu sudah terlatih dan memiliki persenjataan lengkap. Rakyat yang tidak terlatih kemiliteran dan tidak memiliki persenjataan

yang cukup tentu tidak mampu bertahan lama. Banyak raja dan kepala suku yang ikut memberontak ditangkap dan disiksa. Banyak pula perkampungan di Bauguia, Uatolari, dan Uatocarbau dibakar habis.

Dalam membasmi orang-orang yang dianggap berani melawan Portugis itu, pemerintah kolonial juga melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat di sungai Uebui. Perlakuan kejam tidak hanya terjadi di daerah di sungai Uebi. Perlakuan kejam tidak hanya terjadi di daerah Viqueque, tetapi juga di daerah lain seperti di Ermera dan Aileu. Terhadap tokoh-tokoh pejuang yang belum tertangkap di janjikan hadiah bagi siapa yang dapat menemukan. Misalnya, bagi tokoh Jose Manuel Duarte disediakan hadiah 500 pataka bagi yang berhasil menangkapnya.

Ketika perjuangan makin terdesak, beberapa tokoh pejuang seperti Fernando Pinto dan Jose Manuel Duarte mencoba menyeberang ke Atambua di Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi, pasukan Tropas sudah menghadang di perjalanan, sehingga mereka tertawan.

Pemberontakan itu, walau hanya berlangsung kurang dari sebulan, ternyata telah menggoncangkan Timor Portugis dan memakan korban kira-kira 1.500 orang. Keluarga para pemimpin pemberontak ditumpas habis, termasuk anak-anaknya. Para pemimpin yang dinilai berpengaruh dan tertangkap dalam perjuangan itu dibuang ke Angola di Afrika. Mereka dibuang tanpa melalui proses pengadilan. Begitulah pada tanggal 4 Oktober 1959 Amaro de Araujo, dan Jose Manuel Duarte beserta kira-kira 68 tokoh lainnya dibuang ke Angola.

Sebagian kecil kemudian dikembalikan ke Timor Portugis seperti Saleh Sagran. Sebagian tidak kembali lagi untuk selamanya karena meninggal di sana, seperti Amaro de Araujo, dan sebagian lain tetap dihukum sampai tahun 1975 seperti Jose Manuel Duarte dan Jermano Soares Amaral.

Yang tidak dibuang ke Angola dikirim ke Pulau Atauro. Mereka ditahan di sana selama tiga tahun. Sebagian dipenjarakan di Baucau selama satu tahun.

RANGKUMAN

1. Tindakan semena-mena yang dilakukan pihak penjajah Portugis terhadap penduduk akhirnya berakibat meledaknya berbagai pemberontakan. Ada yang dilakukan oleh sekelompok kecil masyarakat secara spontan, tetapi ada juga yang dilakukan oleh kalangan luas di masyarakat, bahkan sekaligus di beberapa daerah. Akibatnya pemerintah kolonial memerlukan tenaga bantuan pasukan dari daerah jajahan Portugis lainnya, misalnya dalam perjuangan Manufahi dan Viqueque. Oleh karena itu, akibat politik pemberontakan itu pun bagi pemerintah kolonial berbeda-beda.
2. Pada umumnya perjuangan yang dilakukan rakyat itu belum memenuhi rencana yang mereka kehendaki. Dengan kata lain, perjuangan itu mengalami kegagalan. Kekalahan yang diderita lebih disebabkan oleh tidak sebandingnya persenjataan, dan logistik serta kurang kompaknya lapisan masyarakat pendukung. Terutama sekali karena kurang matangnya rencana pemberontakan itu sendiri. Walaupun sering kali gagal, setiap ada kemungkinan untuk melawan penjajah, rakyat tetap menggunakan kesempatan itu, meski nyawa tantangannya.

LATIHAN

A. Pertanyaan

1. Coba kamu ceritakan, mengapa rakyat selalu melakukan perlawanan terhadap penjajah Portugis !
2. Coba kamu sebutkan beberapa perlawanan yang pernah dilakukan rakyat Timor Timur !
3. Coba sebutkan beberapa tokoh pejuang yang pernah melawan Portugis !
4. Apa akibat perang Manufahi itu bagi pemerintah jajahan ?

5. Coba kamu jelaskan mengapa para pejuang itu selalu dibuang jauh dari daerahnya !
6. Apakah menurut pendapatmu, ada campur tangan pihak lain dalam perlawanan itu ? Coba tunjukkan !
7. Apakah ada hubungan antara perlawanan rakyat di Timor Portugis dengan perlawanan rakyat di Mozambik dan Angola ?
8. Mengapa pembuangan ke Afrika adalah suatu hal yang sangat menakutkan ?

B. Tugas

1. Coba kamu buat karangan singkat tentang suatu perlawanan rakyat terhadap penjajah yang kamu dengar dari cerita rakyat di daerahmu !
2. Coba kamu diskusikan bersama apa yang pantas kamu teladani dari suatu kisah perjuangan rakyat !
3. Coba kamu buat suatu peta Timor Timur dan cantumkan tempat - tempat perjuangan rakyat itu. Setelah itu, kamu bicarakan bersama !

BAB IV

PROSES PENENTUAN NASIB SENDIRI

1. Masalah Dekolonisasi

Awal terjadinya integrasi wilayah Timor Timur ke dalam Republik Indonesia sesungguhnya merupakan kelanjutan pergolakan politik di Eropa, terutama di Portugal sendiri. Perubahan sistem pemerintahan yang terjadi di Portugal juga berpengaruh pada daerah jajahannya. Sejak tahun 1961 ketika pemberontakan meletus di Angola, daerah jajahan Portugal menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak itu, Sidang Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi-resolusi yang mengecam politik kolonial Portugal dan menyerukan agar diadakan perubahan-perubahan. Akan tetapi, sampai terjadinya kudeta militer tahun 1974, Pemerintah Portugal selalu menolak resolusi dengan dalih bahwa negeri-negeri yang dikuasainya di Afrika dan Asia bukanlah koloni melainkan bagian integral wilayahnya.

Politik dekolonisasi PBB yang tertuang di dalam berbagai resolusinya tidak hanya didukung oleh negara-negara Asia-Afrika tetapi juga oleh negara-negara Barat seperti Australia. Pemerintah dan rakyat Australia, antara lain Gabungan Gereja Katolik dan Protestan menentang politik kolonial Portugis di Timor Portugis. Begitu juga negara-negara Non-blok, termasuk RI, yang mengadakan aksi bersama dengan cara mengisolir negara-negara kolonial yang masih kaku dan hampir tidak menunjukkan toleransinya terhadap perjuangan bangsa terjajah. Seperti diketahui, Indonesia adalah salah satu negara pendiri dari Gerakan Non Blok bersama-sama negara pendiri lainnya yaitu Mesir, India, Yugoslavia, dan Ghana. Akibatnya, hubungan diplomatik RI-Portugis pernah putus sejak tahun 1964.

Hubungan bersahabat yang ditunjukkan oleh Indonesia diwujudkan dengan kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Timur, El Tari, ke Dili pada tanggal 28 Februari - 2 Maret 1974. Gubernur Timor-Portugis Fernando Alves Aldeia menyambut baik kunjungan

itu sehingga terjadi saling mengunjungi. Salah satu hasilnya ialah peningkatan perdagangan pada kedua belah pihak. Selanjutnya juga ada kunjungan pimpinan tentara Portugis di Timor, Mayor Arnao Mitello, ke Kupang pada pertengahan Mei 1974 untuk menjelaskan perubahan politik di Lisboa. Yang jelas, kunjungan El Tari telah membuka isolasi Timor Portugis yang selama ini ditutup rapat-rapat oleh pihak pemerintah Portugis.

Pada pihak Portugis sendiri adanya masalah dekolonisasi telah menimbulkan pergolakan di dalam negeri. Situasi itu berakhir dengan suatu kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Spínola di ibu kota Portugal pada tanggal 25 April 1974. Pergolakan kudeta itu dikenal sebagai *Revolusi Bunga (Revolução des Flores)*. Revolusi ini mempunyai dua tujuan:

- a menegakkan demokrasi di Portugal, dan
- b melaksanakan dekolonisasi semua jajahannya di seberang lautan, termasuk Timor Portugis.

Dekolonisasi menurut Spínola dituangkan dalam bukunya *Portugal do Futuro* (Portugal di Masa Depan). Konsepsinya pada dasarnya adalah usaha pembentukan negara federal yang terdiri atas Portugal dan negeri-negeri jajahannya, yang masing-masing memiliki otonomi intern secara penuh. Setiap anggota negara federal mempunyai wewenang penuh mengatur urusan dalam negeri masing-masing. Pemerintah federal di Lisboa akan menguasai bidang pertahanan dan hubungan luar negeri. Dengan perkiraan bahwa penduduk negeri-negeri jajahan akan memilih persatuan dengan Portugal dalam bentuk federasi, maka Spínola mengusulkan agar diadakan referendum di negeri masing-masing. Tujuannya ialah memberi kesempatan kepada rakyat untuk menentukan masa depan negerinya.

Penentuan nasib sendiri menurut konsepsi Spínola ternyata kurang disetujui oleh Movimento (Gerakan Angkatan Bersenjata), yaitu kelompok perwira radikal. Movimento menghendaki dekolonisasi dilaksanakan secara konsekuen, tidak melalui gagasan federasi. Perbedaan pandangan itu kemudian tercermin dalam sikap politik partai-partai politik yang lahir di Timor Portugis. Dengan demikian,

bagi rakyat ada dua alternatif (pilihan) untuk menentukan nasibnya, yaitu:

- a. tetap dalam lingkungan Portugal, dan
- b. merdeka sendiri, lepas dari Portugal.

Khusus untuk Timor Portugis ada lagi alternatif ketiga, yaitu berintegrasi dengan Republik Indonesia. Alternatif itu dipertegas sejak tanggal 27 Mei 1974 ketika terjadi perpecahan dalam ASDT. Waktu itu di Timor Portugis muncul partai ketiga yaitu AITI.

Bagi Timor Portugis dekolonisasi memberi kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai-partai politik. Dengan cara itu diharapkan aspirasi rakyat dapat disalurkan sehingga perjuangan untuk kepentingan rakyat mendapat perhatian lebih serius.

2. Pembentukan Partai-Partai

Sistem penjajahan Portugis selama ini memang tidak mengizinkan berdirinya partai-partai politik. Satu-satunya partai yang boleh, dan itu pun merupakan alat kolonial ialah "*Uniao Nacional*" (Uni Nasional). Kemudian, namanya berubah menjadi Aksi Nasional Rakyat. Perserikatan buruh pun dilarang di daerah jajahan. Yang boleh didirikan hanyalah organisasi-organisasi sosial seperti Sporting Club Dili, Benfica Club, Uniao Club, Aileu Club, dan Ermera Club. Pada umumnya kegiatan klub-klub itu sangat terbatas pada kegiatan sosial dan olah raga saja. Itu pun semuanya dipimpin oleh orang-orang Portugis. Organisasi kepramukaan juga ada, tetapi pembinaannya dipegang oleh tentara Portugis. Jadi, tidaklah mungkin lahir partai politik apabila tidak ada perubahan kebijaksanaan politik dari pemerintah pusat di Lisboa. Apalagi gerak-gerik rakyat diawasi dengan ketat oleh polisi rahasia (Pide) Portugis.

Partai politik pertama di Timor Portugis adalah *Uniao Democratica Timorese (UDT)*, yang lahir pada tanggal 11 Maret 1974. Partai politik itu bertujuan memperoleh otonomi yang lebih luas. Caranya ialah dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada rakyat Timor pada berbagai sektor dan tingkatan di bawah naungan Portugis. Partai itu semula banyak mendapat dukungan dari pejabat pemerintah.

Partai UDT menolak kemerdekaan penuh secara langsung atau menginginkan kemerdekaan secara progresif seperti yang diinginkan Fretilin. Hal itu dapat dimengerti karena:

- a. Timor Portugis masih lemah dipandang dari sudut ekonomi, dan
- b. tidak memiliki cukup tenaga terdidik untuk memimpin suatu negara.

Adapun susunan pengurus partai UDT adalah sebagai berikut.

Presiden	:	Francisco Xavier Lopes da Cruz
Wakil Presiden	:	Agusto Cesar da Costa Mousinho
Sekretaris Jenderal	:	Domingos de Oliveira
Anggota	:	Joao Carrascalao Ir. Mario Viegas Carrascalao Antonio de Sousa dos Nasimento Jacinto da Costa dos Reis Tito dos Anjos Fausto do Carino Soares



Dua orang Pemimpin Partai UDT



Dua orang Pimpinan Apodeti yaitu Jose Osorio Soares (sebelah kiri) dan Arnaldo Dos Reis Araujo (sebelah kanan)

Selain ketiga partai politik tersebut masih terdapat beberapa partai politik lainnya, seperti *Klibur Oan Timor Aswain (KOTA)* = Kelompok Orang Timor Yang Berani. KOTA (berasal dari bahasa Tetum), dipimpin oleh Tomas Ximenes dan Francisco Diaz Ximenes. Semula KOTA berkeinginan agar Timor menjadi merdeka di bawah protektorat Portugal - Indonesia - Australia.

Kemudian, KOTA berhasil memperoleh kedudukan sebagai salah satu unsur penting dalam lingkungan kekuatan anti-Fretilin. KOTA mencari pendukung kekuatannya pada unsur-unsur pribumi dan berusaha memelihara identitas Timor Timur. Partai itu menjelaskan bahwa mereka akan merupakan kawan perjuangan partai Apodeti.

Selanjutnya, Partai *Trabalhista* yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Tokoh utamanya ialah Domingos C. Pareira.

Sesuai dengan kebijaksanaan dekolonisasi, pemerintah Portugis merencanakan akan mengadakan pemilihan umum (referendum)

d. Permusyawaratan perwakilan

e. Keadilan sosial

Adapun susunan Dewan pengurus partai Apodeti terdiri atas:

a. Presidium Apodeti:

Presiden (ketua) : Arnaldo dos Reis Araujo
Wakil ketua : Hermenegildo Martins
Penasihat : Guilherme Maria Goncalves
Abel da Costa Bello
Joao Assuncao Oliveira Carvalho
Ximenes
Alexandrino Boromeu
Sekretaris : Casmiro Assuncao de Araujo
Wakil Sekretaris : Ermina da Costa dos Reis Araujo

b. Komite Sentral Apodeti:

Sekretaris Jenderal : Jose Fernando Osorio Soares
Sekretaris Umum Politik
dan Administrasi : Jose Antonio Boifacio dos Reis
Araujo
Sekretaris Penerangan : Armindo Soares Mariano
Sekretaris Hubungan
Sosial : Domingos Pinto Soares
Sekretaris Urusan
Keuangan : Antonio Freitas Parada
Sekretaris Pembantu
Hubungan Sosial : Albuquerque Maria Borges
Bendahara : Gaspar da Silva
Sekretaris urusan
Olah raga : Moises Martins

beraliran kiri merubah ASDT menjadi Fretilin. Yang tidak setuju aliran komunis kemudian keluar dari partai. Dalam perkembangan yang terjadi kemudian sebagian dari mereka yang keluar itu masuk ke partai UDT. Oleh sebab itu, tidaklah aneh apabila partai Fretilin yang semula berkobar-kobar untuk merdeka dan menentang Portugis, ternyata kemudian justru dimanfaatkan oleh Portugis. Oleh karena itu, mereka menentang adanya integrasi dengan RI, bahkan berusaha mencemarkan nama baik Indonesia di mata internasional.

Partai politik ketiga adalah *Associacao Popular Democratica de Timor (Apodeti)*, yang lahir tanggal 27 Mei 1974. Semula partai ini bernama *Associacao Integracao de Timor na Indonesia (AITI)* yang berarti Perhimpunan Integrasi Timor di Indonesia. Sejak lahir partai Apodeti sudah dijiwai oleh semangat pemberontakan tahun 1959. Oleh karena itu, Apodeti dengan tegas menyatakan tujuan ingin bergabung dengan Indonesia sesuai dengan tata cara hukum internasional.

Prinsip perjuangan Apodeti selain tercermin dalam namanya juga tertera dalam manifesto politiknya tanggal 27 Mei 1974. Isi lengkap manifesto tersebut adalah sebagai berikut:

Manifesto Politik Apodeti

Mengingat bahwa untuk mengakhiri kebebasan yang diberikan itu, maka Timor Portugis akan memilih secara konkret :

- a. Integrasi ke dalam masyarakat Indonesia
- b. Kebebasan-keadilan sosial
- c. Integrasi yang berdasarkan Hukum Internasional, berstatus propinsi otonomi.

Dalam Anggaran Dasar Apodeti dijelaskan bahwa perjuangannya senantiasa berlandaskan kepada:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Kesatuan Culture dan Genealogis serta persamaan historis dan persamaan nasib

Partai politik kedua yang lahir adalah *Associacao Social Democratica Timorese (ASDT)*. Partai politik itu dibentuk tanggal 20 Mei 1974. Ketika partai itu menjadi semakin radikal, timbul perpecahan. Partai politik itu berasaskan sosialisme dan demokrasi dengan tujuan akhir mencapai kemerdekaan penuh tanpa ikatan dengan negara mana pun. Kemudian, ia berubah nama menjadi *Frente Revolucionarie de Timor-Leste Independente* atau lebih dikenal sebagai *Fretilin* pada pertengahan September 1974. Mereka mengikuti pola gerakan revolusioner dijajahan Portugis lainnya, yaitu *Frente de Libertacao de Mozambique (Frelimo)* di Mozambik dan *Movimento Populer de Libertacao de Angola (MPLA)* di Angola, yang condong beraliran ke kiri.

Partai ASDT dimasuki pengaruh komunis ketika 5 orang mahasiswa kader komunis (Marxisme) datang dari Lisboa pada bulan Agustus 1974. Mereka itu membawa misi khusus untuk menggarap ASDT agar dapat menjadi organisasi wadah perjuangan dan gerakan-gerakan komunis di Timor Portugis. Usaha mahasiswa itu dibantu oleh pembina dan pendukung *Fretilin* yang ada di pemerintahan Portugis di Timor dan di Australia.

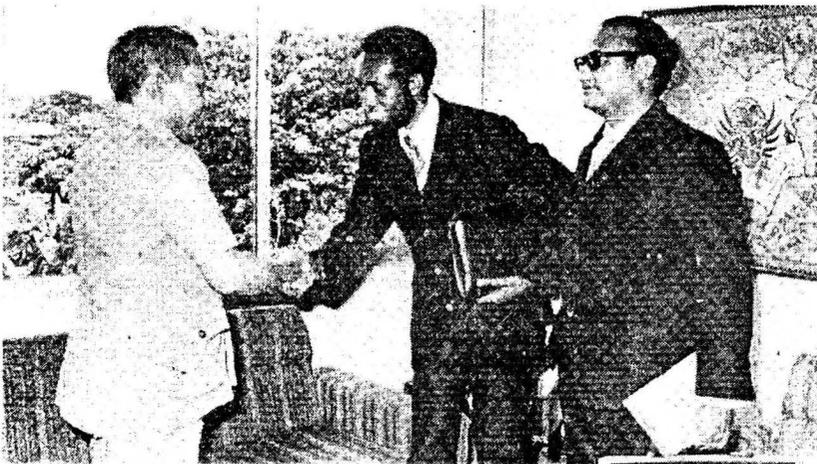
Adapun susunan pengurus partai itu adalah sebagai berikut.

Sekretaris Jenderal (Ketua)	: Francisco Xavier do Amaral (Pegawai bea-cukai di Dili)
Wakil ketua	: Nicolau Lobato
Sekretaris Urusan Luar Negeri	: Jose Ramos Horta
Sekretaris Urusan Pendidikan	: Antonio Carvarino
Anggota	: Nataline Leitao Leopoldo Alfonso Retentor Eduardo dos Anjos Joaquim Saldanha Justino Mota Guide Valadares Carapinha

Usaha para mahasiswa beraliran komunis itu berakibat pecahnya para pendukung ASDT. Sejak pertengahan September 1974 yang

pada bulan Maret 1978. Tujuannya adalah untuk menentukan nasib Timor Portugis selanjutnya. Partai-partai politik yang sudah lahir diharapkan menjadi penyalur aspirasi rakyat lewat referendum tersebut. Oleh karena itu, sejak kelahirannya semua partai politik sibuk mengadakan konsolidasi dan membuka cabang di seluruh wilayah Timor Portugis. Pada waktu itu sepak terjang partai-partai cukup terkendali. Begitu juga pemerintah Portugis cukup mengendalikan situasi Timor Portugis.

Di samping kegiatan di Timor Portugis, partai-partai itu juga mengirim utusannya ke berbagai negara, terutama Indonesia dan Australia, untuk menjelaskan keinginan mereka masing-masing. Umpamanya, pada akhir Mei dan bulan Juni 1974 telah datang ke Indonesia Ketua Umum UDT, Francisco Xavier Lopes da Cruz. Pada saat yang bersamaan juga datang ke Jakarta Sekretaris Luar Negeri Fretilin, Ramos Horta.



Utusan Partai UDT ke Jakarta,
antara lain menemui Menteri Penerangan Ali Murtopo

3. Pendekatan Melalui Perundingan

Perubahan yang terjadi di Timor Portugis ditanggapi oleh pemerintah RI dengan hati-hati. Penjajakan dilakukan melalui jalur diplomatik. Dalam rangka menghadiri sidang-sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Menteri Luar Negeri Adam Malik mengadakan pertemuan khusus dengan Menteri Luar Negeri Portugal Mario Soares pada tanggal 21 September 1974. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa kedua menteri luar negeri akan mengadakan kerja sama dan konsultasi dalam penentuan nasib Timor - Portugis (Timur). Juga disepakati untuk memulihkan hubungan diplomatik kedua negara, menetapkan kepala perwakilan kedua negara di PBB untuk mewakili kedua menteri luar negeri dan mengirim utusan khusus Indonesia ke Lisboa untuk menjelaskan sikap Indonesia mengenai Timor Portugis.

Sikap resmi Pemerintah Indonesia pertama kali diumumkan seusai sidang Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan pada tanggal 8 Oktober 1974. Pernyataan itu pada dasarnya berisi hal-hal berikut:

- a. Bahwa Indonesia tidak mempunyai ambisi teritorial.
- b. Bahwa Indonesia menghormati hak rakyat Timor - Portugis untuk menentukan nasib sendiri.
- c. Apabila rakyat Timor Portugis ingin bergabung dengan Indonesia, maka penggabungan itu tidak dapat dilakukan atas dua negara, tetapi Timor harus menjadi bagian dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Sikap resmi itu disampaikan kepada Pemerintah Portugal di Lisboa oleh misi Ali Murtopo, beranggotakan A. Tahir (Duta Besar RI di Perancis) dan Frans Seda (Duta Besar RI di Belgia). Dalam pertemuan yang dilakukan dengan pemerintah Portugal pada tanggal 14-15 Oktober 1974 juga dibicarakan beberapa kemungkinan bagi masa depan Timor Portugis setelah referendum dilaksanakan. Ada beberapa kemungkinan yang dilontarkan:

- a. Merdeka di bawah payung Portugis. (Bagi Portugis kemungkinan ini sulit dilaksanakan karena Timor Timur secara ekonomis tidak menguntungkan sehingga dapat memberatkan keuangan Portugis).

- b. Merdeka dan berdiri sendiri (kemungkinan ini juga sulit karena Timor Timur tidak memiliki potensi ekonomi yang cukup sehingga Timor Timur tidak dapat membiayai diri sendiri).
- c. Bergabung dengan Republik Indonesia.

Pemerintah Portugis kemudian mengirimkan utusan balasan ke Jakarta, yang dipimpin oleh Dr. Antonio de Almeida Santos (Menteri Seberang Lautan). Dalam kunjungan itu, tanggal 16-19 Oktober 1974, Santos menjelaskan bahwa apa pun yang menjadi keinginan rakyat Timor Portugis, Pemerintah Portugis akan menghormatinya. Untuk itu, pemerintah akan menyiapkan undang-undang yang mengatur keinginan kepartaian di Timor Portugis.

Dalam kunjungan ke Dili setelah ke Jakarta, Dr. Santos menyatakan bahwa sebelum referendum diadakan, rakyat memilih lebih dahulu wakil-wakil mereka untuk suatu dewan yang dinamakan "dewan konstituante". Dewan itulah yang akan menentukan segala sesuatu mengenai referendum. Padahal dewan konstituante itu tidak pernah disebut-sebut dalam perundingan dengan pihak Indonesia di Jakarta. Hal itu menunjukkan bahwa kebijaksanaan Portugis tidak konsisten (tetap) dalam masalah dekolonisasi ini. Bahkan ia mengatakan bahwa kemerdekaan Timor Portugis saat itu adalah sesuatu yang tidak realistis atau tidak sesuai dengan kenyataan.

Sementara itu, di Portugal terjadi pergantian Presiden dari Spinola kepada Francisco da Costa Gomes yang beraliran sosialis radikal. Di Timor Portugis sendiri terjadi pula pergantian Gubernur pada tanggal 18 November 1974 dari Fernando Alves Aldeia kepada Letkol Lemos Pires. Pejabat itu dinilai masuk kelompok radikal. Gubernur Portugis Lemos Pires merencanakan Dewan Konstituante itu akan terdiri atas sepuluh orang wakil partai dan swasta yang **ditunjuk** pemerintah. Jabatan ketua dewan akan dipegang oleh Gubernur. Adapun susunan dewan tersebut adalah:

- Satu orang wakil pemerintah
- Satu orang wakil pegawai pemerintah
- Satu orang wakil Apodeti
- Satu orang wakil UDT

Satu orang wakil Fretilin
Satu orang wakil golongan swasta
Satu orang ahli soal-soal Portugis
Tiga orang wakil yang ditentukan oleh pemerintah.

Rencana (konsepsi) Gubernur itu semula ditolak oleh Fretilin dan Apodeti karena dianggap tidak demokratis dan tidak dipilih rakyat. Akhirnya hanya Apodeti yang tidak setuju sehingga rencana pembentukan dewan terkatung-katung.

Pergantian pejabat ternyata membawa pengaruh pada perkembangan situasi di Timor Portugis. Pengaruh Partai Komunis Portugal terhadap kebijaksanaan pemerintah daerah Timor Portugis sangat terasa. Staf Gubernur Mayor Francisco de Mota, yang beraliran komunis, mengeluarkan edaran yang isinya bertentangan dengan rencana pemerintah semula. Edaran itu menyebut bahwa Pemerintah Portugis merencanakan akan membentuk pemerintahan peralihan pada bulan Oktober 1975. Sejalan dengan itu, akan dibentuk dewan konsultatif (10 orang) yang beranggotakan wakil-wakil partai dan orang-orang pemerintah. Tugas dewan itu adalah:

- a. Membuat undang-undang kepartaian
- b. Pembagian kedudukan di antara partai-partai, kecuali yang disediakan bagi pemerintah.
- c. Pemilihan umum bagi anggota dewan konstituante nasional rakyat Timor Portugis dilaksanakan pada bulan Oktober 1976.
- d. Kemerdekaan Timor Portugis baru akan dilakukan setelah rapat-rapat dewan konstituante dilaksanakan.

Rencana de Mota ini berarti bahwa masa depan Timor akan ditentukan lebih dahulu oleh dua dewan bukan melalui referendum seperti rencana semula. Timbul reaksi dari partai-partai politik. Fretilin menuduh rencana itu tidak demokratis karena anggotanya tidak dipilih oleh rakyat tetapi diangkat oleh pemerintah. Bahkan ia menuduh rencana itu menguntungkan UDT.

Dalam suasana yang makin hangat, para tentara pribumi dalam dinas militer Portugis membentuk suatu organisasi. Pada tanggal 11 Januari 1975 *Komisi Sersan Timor* terbentuk, yang diketuai oleh Sersan Inacio dos Santos. Pengurus organisasi adalah pendukung

Fretilin. Dalam surat edaran resmi tanggal 18 Januari 1975 dinyatakan bahwa pembentukan komisi atas izin Panglima Angkatan Bersenjata Timor.

Ada dugaan komisi Sersan itu adalah permainan pemerintah untuk mengimbangi partai politik. Akan tetapi, kekuatan yang diharapkan pemerintah dari komisi tidak berhasil. Kekuatan komisi terpecah karena orientasi atau haluan politik mereka terpecah sesuai dukungan terhadap salah satu partai yaitu UDT, Fretilin, atau Apodeti. Dari 75 orang Sersan yang ada waktu itu, ternyata 11 orang telah menyatakan mendukung Apodeti.

Dalam suasana yang semakin kacau, Fretilin dan UDT bersatu dalam suatu wadah koalisi pada tanggal 20 Januari 1975. Kedua partai berharap dengan kerja sama itu perjuangan mereka makin kuat. Mereka mendesak pemerintah Portugal agar segera membentuk pemerintahan sementara yang disusul kemerdekaan penuh dengan bahasa pengantar bahasa Portugis.

Akan tetapi, lima bulan kemudian (Mei 1975), koalisi bubar. Kedua partai politik itu tidak lagi saling mempercayai dalam perjuangannya, terutama karena UDT menentang aliran politik yang dianut Fretilin. Komunisme dan aksi-aksi Fretilin yang radikal banyak merugikan perjuangan UDT maupun rakyat Timor Portugis seluruhnya.

Sementara itu, perundingan untuk mencari penyelesaian masalah Timor Portugis berjalan terus. Pemerintah Portugal kembali mengajak Indonesia untuk berunding. Pada tanggal 9 Maret 1975 di London, Inggris, diadakan perundingan di antara kedua pihak. Pemerintah Portugal mengajukan dua usul:

- Pertama : agar dibentuk suatu pemerintah peralihan (*provisional government*) yang terdiri atas unsur pemerintah dan partai politik.
- Kedua : pemerintahan tetap berada di tangan Portugal dengan dibantu oleh suatu badan yang disebut *consultative body* (badan penasihat) yang beranggotakan wakil tiga partai politik berpengaruh (UDT, Fretilin dan Apodeti).

Sebaliknya pemerintah Indonesia tetap pada sikap semula, yaitu proses dekolonisasi di Timor Portugis harus dilaksanakan sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat setempat. Bahkan Indonesia setuju dengan pendapat pemerintah Portugal bahwa rakyat Timor Portugis belum matang dalam politik untuk menentukan kehendaknya. Oleh karena itu, Indonesia berpendirian bahwa integrasi dengan Indonesia adalah jalan terbaik bagi masa depan rakyat Timor itu sendiri. Indonesia mengusulkan agar dibentuk suatu badan penasihat setempat antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugal. Tugas badan penasihat itu adalah memberi nasihat kepada Gubernur Portugis di Timor Timur dalam rangka menyiapkan rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri yang diarahkan ke integrasi dengan Indonesia.

Suasana baik dan saling pengertian yang muncul antara dua negara ini memungkinkan hubungan diplomatik antara dua negara dipulihkan kembali. Sejak 10 Mei 1975 pemerintah Indonesia telah mengangkat seorang duta besar yang berkuasa penuh RI di Portugal. Sebaliknya Portugal juga mengangkat seorang duta besar untuk Republik Indonesia di Jakarta. Sementara itu, Indonesia juga mengirimkan suatu tim khusus ke Timor Portugis untuk menjajaki kebijaksanaan lebih lanjut dari pemerintah Portugal dan pendapat partai-partai dalam menghadapi perkembangan terakhir masalah dekolonisasi.

Untuk lebih memahami sikap Indonesia, tokoh-tokoh partai politik di Timor Portugis, atas inisiatif sendiri datang ke Jakarta. Pada pertengahan bulan April 1975, Ketua dan Sekjen UDT berkunjung ke Indonesia untuk membicarakan masa depan Timor Portugis. Terutama untuk menjelaskan program partai UDT yaitu tetap mempertahankan Timor Timur di bawah naungan Portugis. Selanjutnya berkunjung pula utusan partai Fretilin, juga untuk menjelaskan program partainya, yaitu merdeka sebagai negara sendiri.

Kunjungan Lopes da Cruz ke Indonesia memungkinkan para pemimpin UDT lebih memahami sikap Indonesia. Di samping itu, UDT menyadari bahwa koalisinya dengan Fretilin banyak merugikan perjuangannya maupun Apodeti. Itulah sebabnya tidak lama kemudian,

yaitu tanggal 27 Mei 1975, koalisi itu pecah. Bahkan UDT berusaha dapat bekerja sama dengan Apodeti untuk melakukan penumpasan terhadap komunis.

Langkah selanjutnya bagi proses dekolonisasi itu adalah pertemuan Macao tanggal 26-28 Juni 1975. Pertemuan itu dihadiri juga oleh UDT dan Apodeti, selain delegasi Portugal dan Indonesia. Fretilin memboikot pertemuan itu karena tidak menyukai kehadiran Apodeti. Sikap Fretilin ini dikecam oleh semua pihak. Wakil pemerintah Portugal yang diketuai oleh Mayor Vitor Alves menuduh Fretilin telah merugikan proses dekolonisasi. Salah satu keputusan pertemuan itu ialah perkiraan waktu pelaksanaan referendum (pemilihan umum) sekitar bulan Oktober 1976. Dua tahun sesudah itu (1978), Portugis direncanakan akan meninggalkan Timor Portugis.

Sementara itu, naskah Undang-Undang yang berdasarkan pada hasil pertemuan Macao dan telah memperoleh pengukuhan dari Dewan Revolusioner Militer Portugal, diumumkan pada tanggal 12 Juli 1975. Isinya menetapkan bahwa Timor Portugis akan tetap menjadi daerah Portugal sampai bulan Oktober 1978. Naskah Undang-Undang itu menetapkan pembentukan sebuah "Majelis Rakyat" yang dipilih dalam pemilihan umum tahun 1976. Tugas Majelis Rakyat adalah menentukan kebijaksanaan politik dan administrasi daerah itu.

4. Perang Saudara

Kelompok masyarakat pendukung Partai Apodeti, KOTA dan Tralabista yang sejak semula bercita-cita melakukan integrasi secara damai dengan Indonesia, segera menjadi sasaran intimidasi atau teror dari pihak Fretilin. Sementara itu, para pengikut Fretilin yang berhaluan radikal, mendapat dukungan dari pemerintah. Di samping itu, pengikut Fretilin memperoleh kesempatan untuk mengikuti latihan kemiliteran yang diberikan oleh pihak yang berhaluan kiri dalam pemerintahan kolonial di Timor Portugis.

Dalam kemelut yang terjadi, pimpinan UDT mengambil suatu kesimpulan bahwa pihak Fretilin sedang mempersiapkan suatu perebutan kekuasaan dengan sepengetahuan dan dukungan para penguasa kolonial. Kenyataan itu sangat mengkhawatirkan UDT.

Mungkin karena itu UDT bermaksud untuk mendahului aksi pihak Fretilin.

Dalam menunggu saat referendum tersebut, pada tanggal 11 Agustus 1975, UDT melancarkan Gerakan Revolusioner Anti Komunis. Mula-mula persenjataan polisi di Dili berhasil dirampas. Kemudian, UDT berhasil menguasai Dili dan menangkap sejumlah tokoh Fretilin. Ketika itu sejumlah pejabat teras Portugis sedang keluar kota. UDT menegaskan bahwa keinginan rakyat adalah kemerdekaan dan pemerintahan sendiri oleh rakyat.

Tanggal 11 Agustus 1975 pagi, Radio Dili mengumumkan bahwa seluruh kota berada dalam kekuasaan UDT. Komandan pasukan UDT, Joao Carascalao menyampaikan penjelasan kepada Gubernur Timor Portugis, bahwa mereka terpaksa harus bergerak dengan tujuan, "... membina persatuan, menentukan nasibnya sendiri, dan menolak paham komunisme". Untuk mewujudkan tekad itu, UDT mengusir dua perwira berhaluan kiri, Mota dan Jonatas dari Dili. Hari itu juga kedua perwira tersebut terbang ke Darwin, Australia.

Gerakan UDT itu gagal karena pada tanggal 21 Agustus 1975, Fretilin mengadakan serangan balik dan bahkan berhasil mendesak UDT. Dengan dukungan sejumlah oknum militer Portugis dan pasukan kolonial Tropas, massa Fretilin menyerbu dari perbukitan sekeliling kota Dili. Selanjutnya terjadilah "perang saudara" di Timor Portugis yang tentu sangat merugikan perjuangan mereka, dan menghantui kehidupan seluruh warga masyarakat non-Fretilin.

Kekacauan yang terjadi menyebabkan keamanan dan ketertiban tidak terkendali lagi. Banyak terjadi penangkapan, seperti terhadap Raja Atsabe, tokoh Apodeti, oleh Fretilin pada tanggal 13 Agustus 1975. Sementara itu, rumah-rumah pemimpin UDT di Dili dihancurkan oleh Fretilin. Rakyat banyak yang mengungsi ke daerah aman termasuk perwakilan asing yang ada di Dili. Sebagian ada yang ke Australia dan tempat-tempat lain. Bahkan tidak sedikit yang mengungsi ke daerah Indonesia di Timor Barat (NTT), terutama ke daerah Atambua. Mereka yang tidak sempat lari, banyak yang terpaksa menderita karena segera disekap oleh para pendukung Fretilin.

Perkembangan di wilayah Timor Portugis terbukti memang terus bertambah buruk. Ketika perselisihan sudah meningkat menjadi bentrokan bersenjata, pada tanggal 19 Agustus 1975, Gubernur Lemos Pires mengajukan permintaan intervensi segera pasukan-pasukan internasional karena situasi makin memburuk. Kemungkinan untuk mengadakan penyelesaian politis, dikatakannya makin menipis. Ia mengingatkan bahwa korban terus saja berjatuhan dan penduduk Dili terancam kekurangan makanan dan bahaya penyakit. Ketika itu kota Dili praktis terbagi dalam tiga wilayah kekuasaan, yaitu wilayah massa UDT, wilayah Fretilin, dan wilayah pasukan Portugis. Namun pasukan Portugis, hanya menguasai wilayah sekitar pelabuhan Dili.

Enam hari kemudian, yaitu tanggal 25 Agustus 1975, Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan permintaan kepada pemerintah Australia dan Indonesia. Isi permintaan itu antara lain, "..... agar membantu melancarkan arus pengungsi dari wilayah Timor Timur yang semakin meningkat jumlahnya". Menanggapi perang saudara di Timor Portugis itu, Perdana Menteri Australia berpendapat, "hanya Indonesia yang mampu mengatasi keadaan itu". Pendapat itu beralasan karena Indonesialah yang paling banyak dilibatkan secara langsung alih keadaan di wilayah itu.



Para Pengungsi

Kekacauan yang terjadi di Timor Portugis telah menarik perhatian internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyerukan agar Indonesia dan Australia ikut membantu kehidupan para pengungsi tersebut, yang jumlahnya mencapai 40.000 orang. Bagi Indonesia mengurus pengungsi sebanyak itu bukanlah hal mudah. Dana yang besar diperlukan untuk menolong kehidupan mereka. Apalagi keamanan mereka sering diganggu oleh Fretilin.

Pemerintah pusat Portugal sendiri meminta agar Indonesia mengirim kapal ke Dili untuk membantu membawa para pengungsi ke tempat aman. Pemerintah Indonesia segera mengirim sebuah kapal untuk melaksanakan hal itu. Selama 4 hari (27-30 Agustus 1975) ketika kapal itu ada di Dili, terjadi gencatan senjata oleh semua pihak untuk membantu pengungsian. Sayang sekali situasi yang baik itu tidak dimanfaatkan oleh pemerintah Portugal untuk menyelesaikan masalah dekolonisasi.

Ketidakmampuan pemerintah kolonial untuk mengendalikan situasi yang makin memburuk terbukti ketika Gubernur Lemos Pires memindahkan pusat pemerintahan dari Dili ke Pulau Atauro pada tanggal 27 Agustus 1975. Garnisun Portugis dan tenaga kesehatan juga ikut berpindah. Pindahan tempat ini tampaknya merupakan tanda mulai lenyapnya kekuasaan *de facto* pemerintahan Portugal di Timor Portugis. Nasib rakyat Timor diserahkan kepada mereka sendiri.

Dalam keadaan kacau itu, gudang persenjataan dan amunisi ditinggalkan begitu saja. Pengikut Fretilin memanfaatkan kesempatan itu untuk membongkar gudang tersebut. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi. Pembantaian massal segera berlangsung tanpa Portugis merasa bertanggungjawab. Mula-mula di Dili lalu meluas ke berbagai daerah.

Meningkatnya ketegangan, kekacauan, dan makin berkuasanya Fretilin membuat semua pihak waspada. Keamanan perbatasan Indonesia dan Timor Portugis sangat terganggu oleh tindakan Fretilin yang dipengaruhi komunis itu. Sementara itu, UDT mulai menyadari bahwa Portugal tidak dapat lagi dijadikan pegangan. Harapan UDT beralih kepada Indonesia. Bersama Apodeti, KOTA, Trabalhista,

maka UDT bersepakat untuk bersatu memperjuangkan integrasi dengan Indonesia.

Untuk menghadapi situasi kacau itu, Apodeti melakukan beberapa hal:

- Pertama : melatih kemiliteran para pengikutnya, antara lain di perbatasan dengan Atambua (NTT).
- Kedua : melakukan kampanye radio (mula-mula radio "Raimala" kemudian "Larosae") yang berisi pernyataan bahwa Apodeti akan segera membebaskan rakyat dari penjajahan dan menguasai Dili.



Pasukan gabungan Apodeti, UDT dkk

Kegiatan Apodeti ini ternyata mendapat dukungan luas dari rakyat. Banyak yang bersedia dilatih kemiliteran untuk persiapan perjuangan yang akan datang. Tidak sedikit pula yang bergerilya untuk membangkitkan semangat rakyat di berbagai daerah. Api revolusi betul-betul sedang bergelora di Timor Portugis. Tidak mungkin lagi ada yang mampu membendungnya.

Memasuki bulan September 1975, Fretilin sudah mulai mengambil alih peranan UDT. Di beberapa tempat, UDT dilumpuhkan. Tindakan balas dendam yang dilakukan Fretilin seringkali sadis dan kejam. Tidak hanya kepada orang-orang UDT tetapi juga kepada orang-orang Apodeti.

Hampir sebagian besar wilayah Timor Portugis pada pertengahan September 1975 telah dikuasai Fretilin. Satu per satu daerah UDT dikuasai Fretilin seperti Liquica, Batugede, Maliana, dan Suai.

Sementara itu, pada 1 September 1975, sejumlah tokoh UDT berkumpul di suatu tempat dekat Maliana. Setelah mempelajari situasi yang mereka hadapi, mereka menyadari bahwa integrasi dengan Indonesia adalah jalan yang paling baik untuk masa depan Timor Timur. Banyak hal yang dapat menguntungkan rakyat bila integrasi itu ditempuh. Keputusan ini disetujui oleh ketua UDT Lopes da Cruz. Sejak itu ketua UDT sering berkonsultasi dengan pejabat-pejabat pemerintah Indonesia. Selanjutnya bersama Apodeti, KOTA dan Tralabista, maka UDT bersepakat untuk bersatu memperjuangkan integrasi dengan Indonesia.

Begitulah, pada tanggal 7 Desember 1975, tokoh-tokoh UDT, Apodeti, KOTA dan Tralabista setelah bermusyawarah untuk mufakat bersepakat untuk mengajukan petisi kepada Pemerintah Indonesia. Petisi itu diajukan melalui Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur. Petisi memuat 31 masalah yang secara umum mengajukan permohonan integrasi Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, juga meminta bantuan persenjataan bahkan kalau mungkin sukarelawan-sukarelawan dari Indonesia.

Untuk memperkuat pasukan gabungan, para pemuda pengungsi yang umumnya adalah anggota UDT dan Apodeti mulai dimobilisir. Mereka dilatih keprajuritan untuk dapat maju ke medan tempur. Untuk pemuda UDT, latihan dipimpin oleh Joao Carrascalao. Pemuda Apodeti, KOTA, dan Tralabista dilatih sendiri oleh kelompoknya.

Pagi hari tanggal 7 Desember 1975 pasukan UDT, Apodeti, KOTA dan Tralabista bersama para sukarelawan Indonesia

membebaskan kota Dili dari cengkeraman Fretilin. Untuk membendung kegiatan yang menentangnya, Fretilin melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap lawan-lawannya. Antara lain yang menjadi korban adalah tokoh Sekretaris Jenderal Apodeti Jose Ozorio Soares (kakak Gubernur Timtim ke-3 bersama enam orang lainnya), dibunuh di Same pada tanggal 27 Januari 1976. Sebelum itu, telah terjadi pembunuhan massal (ribuan orang) di Ailiu oleh Fretilin pada tanggal 25-26 Desember 1975. Tidak sedikit pula yang dipenjarakan di penjara Dili (sekarang Markas Kodim Dili). Sejalan dengan itu, mereka mengejar lawan-lawannya sampai ke perbatasan Indonesia. Akibatnya, sering terjadi kontak senjata dengan pasukan TNI yang menjaga perbatasan dan para pengungsi. Pada waktu itu Lopes da Cruz, pemimpin UDT, mencoba bertahan di daerah Batugede, dekat perbatasan NTT.



Korban pembunuhan massal oleh Fretilin

RANGKUMAN

1. Masalah masa depan Timor Portugis mencuat ke atas setelah pemerintah pusat Portugal mengeluarkan Undang-undang Dekolonisasi tahun 1971. Dengan dasar undang-undang tersebut, muncullah beberapa partai politik seperti UDT, Fretilin dan Apodeti. Tiap partai politik mempunyai keinginan tersendiri dalam menentukan masa depan Timor Portugis, bahkan seringkali bertolak belakang. Krisis yang timbul akibat persaingan partai telah melibatkan Indonesia ikut campur menyelesaikan. Ternyata masalahnya tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa pertemuan di tempat netral seperti London dan Roma telah dilaksanakan untuk mencari jalan terbaik, tetapi gagal walaupun PBB juga turun tangan membantu menyelesaikan. Namun, persaingan antar partai telah meningkat menjadi bentrokan bersenjata.
2. Tindakan kejam Fretilin yang tidak memikirkan lagi persaudaraan sebangsa makin memperjelas aliran politiknya. Dalam situasi demikian UDT melihat bahwa bersatu dengan partai lainnya untuk bergabung dengan Indonesia adalah jalan yang terbaik bagi masa depan Timor Timur. Kekompakan yang lahir antara UDT, Apodeti, KOTA, dan Tralabista dan didukung oleh semangat juang tinggi, akhirnya mengantarkan Timor Timur ke gerbang integrasi yang ditandai dengan Proklamasi Balibo.

LATIHAN

A. Pertemuan

1. Apa pengaruh Revolusi Bunga bagi masa depan rakyat Timor Timur ?
2. Apa arti dekolonisasi itu menurut Jenderal Spinoza ?
3. Sebutkan beberapa orang tokoh UDT dan Apodeti !

4. Mengapa UDT tidak bersedia lagi bekerjasama dengan Fretilin ?
5. Sejak kapanakah UDT menyetujui untuk integrasi dengan Indonesia ?
6. Coba kamu jelaskan langkah-langkah apa yang ditempuh Portugal untuk menyelesaikan masalah Timor Timur !
7. Coba kamu jelaskan isi perundingan London !
8. Pemberontakan manakah yang menjiwai semangat Apodeti ?
9. Mengapa Gubernur Timor Portugis memindahkan pusat kekuasaannya ke Pulau Atauro ?
10. Apa usaha PBB untuk membantu penyelesaian proses penentuan nasib sendiri rakyat Timor Timur ?
11. Apakah yang dilakukan kelompok Apodeti-UDT dalam menggalang semangat dan kekuatan rakyat sebelum merebut kembali kota Dili ?
12. Apa pendapatmu tentang sikap akhir pemerintah kolonial Portugis di Timor Timur ?

B. Tugas

1. Coba kamu buat sebuah karangan singkat apa yang terjadi saat penentuan nasib sendiri itu di daerahmu ! Untuk itu tanyalah orang-orang tua yang kamu kenal di lingkunganmu !
2. Buatlah sebuah laporan tentang peringatan hari bersejarah yang kamu ikut memperingatinya !
3. Coba kamu diskusikan bersama apa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam perjuangan integrasi itu !

BAB V

KEMBALI KE PANGKUAN IBU PERTIWI

1. Proklamasi Balibo

Perang Saudara yang melanda Timor Portugis sudah tidak mungkin lagi dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah Portugal. Usaha untuk mengadakan perundingan dengan partai-partai telah mengalami jalan buntu. Tampaknya hanya Indonesia yang dapat diminta bantuannya untuk menyelesaikan masalah Timor Portugis. Akan tetapi, Indonesia telah menegaskan sikapnya bahwa Indonesia akan masuk ke Timor Portugis hanya apabila diminta sendiri oleh Portugal.

Sehubungan dengan hal tersebut, ketika menghadiri sidang PBB Menteri Luar Negeri (Menlu) Portugal, Melo Antunes menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Menlu Adam Malik. Pemerintah Indonesia menyambut baik keinginan tersebut karena sudah terdesak pada pilihan harus menerima keinginan beberapa pihak di Timor Portugis untuk bergabung dengan Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia adalah dapat atau baru bisa mempertimbangkan keinginan itu bilamana sesuai dengan prosedur hukum internasional.

Begitulah pertemuan itu dilangsungkan di Roma pada tanggal 2-3 November 1975. Beberapa hal yang menonjol dari hasil pertemuan Roma itu adalah sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak menyadari bahwa tanggung jawab mengenai dekolonisasi Timor Portugis terletak di tangan Portugis. Pemerintah Indonesia sudah menegaskan bahwa Indonesia menyadari kedaulatan Portugis di Timor sampai masyarakat Timor berhasil melaksanakan nasib sendiri. Untuk maksud itu kedua belah pihak berusaha menghindari campur tangan luar terhadap proses dekolonisasi tersebut.
- b. Dalam pelaksanaan dekolonisasi itu kedua belah pihak sepakat untuk mengusahakan ketertiban dan keamanan yang

memungkinkan masyarakat Timor untuk menentukan masa depan mereka.

- c. Kedua belah pihak akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk meyakinkan para pihak yang bersengketa di Timor untuk segera maju ke meja perundingan dengan pihak Portugal guna mencari penyelesaian yang sesuai dengan kehendak sebagian besar rakyat Timor.
- d. Pemerintah Portugal menyadari bahwa Indonesia adalah pihak yang sangat berkepentingan dengan masalah Timor. Untuk maksud itu pemerintah Portugal akan berusaha secara terus-menerus untuk berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia dalam setiap usaha dan tahapan proses dekolonisasi.
- e. Pemerintah Portugis menyadari kesulitan yang dihadapi pihak Indonesia sehubungan dengan banyaknya pengungsi yang membanjiri Indonesia. Oleh karena itu, masalah itu termasuk masalah yang harus diselesaikan sesegera mungkin bersamaan dengan masalah-masalah lain yang mendesak seperti perlunya penciptaan dan pemeliharaan cease fire (penghentian tembakan-menembak) di Timor, pemecahan masalah tawanan orang Portugis yang berada di tangan UDT, dan masalah lainnya.
- f. Pemerintah Portugal tidak berniat menginternasionalkan masalah Timor.

Ternyata hasil pertemuan Roma seperti pertemuan-pertemuan terdahulu, tidak memberikan hasil yang memuaskan. Fretilin tidak mau menyetujui hasil pertemuan tersebut. Waktu itu ia masih merasa kuat di Timor Portugis sehingga berpendapat keputusan akhir ada di tangannya. Oleh karena itu, secara sepihak Fretilin mengumumkan berdirinya "*Republik Demokrasi Timor*" pada tanggal 28 November 1975 dengan Xavier do Amaral sebagai presidennya. Beberapa hari kemudian diumumkan pula susunan "pejabat negara" yang mereka bentuk, antara lain Nikolau Lobato sebagai "Perdana Menteri" dan Jose Ramos Horta sebagai "Menteri Luar Negeri".

Reaksi dari berbagai pihak muncul. Pemerintah Indonesia sangat menyesalkan tindakan sepihak tersebut karena bertentangan

dengan usaha yang sedang dilakukan. Indonesia tetap pada pendirian semula bahwa nasib Timor Portugis harus ditetapkan oleh seluruh rakyat Timor Portugis sendiri.



Menlu RI Adam Malik sedang menandatangani naskah hasil Pertemuan Roma

Gabungan Apodeti, UDT, KOTA, dan Tralalhista setelah melakukan musyawarah dan mufakat, akhirnya mengumumkan *Proklamasi Balibo* pada tanggal 30 November 1975. Adapun bunyi Proklamasi tersebut adalah sebagai berikut.

PROKLAMASI

Kami, rakyat Timor Portugis, yang diwakili oleh Apodeti-Associacao Popular Democratica de Timor, UDT - Uniao Democratica de Timor, KOTA - Klibur Oan Timor Aswain, dan Partindo Tralalhista, setelah mempertimbangkan dengan seksama aksi sepihak Fretilin yang terwujud melalui "proklamasi kemerdekaan", mengenai wilayah Timor Portugis, yang dinyatakan disetujui oleh Pemerintah Portugis; kenyataannya semacam itu bertentangan dengan keinginan nyata dari rakyat Timor Portugis.

Menimbang, bahwa persyaratan untuk menentukan nasib sendiri secara bebas dari rakyat Timor Portugis tidak sesuai dengan tindakan tersebut.

Mengingat kenyataan, bahwa beberapa inisiatif telah ditempuh untuk memperoleh penyelesaian politik secara damai dalam masalah Timor, terutama :

- Pertemuan Makao, di mana dengan sengaja Fretilin tidak hadir walaupun Pemerintah Portugis mengundang wakil mereka.
- Kesediaan Pemerintah Australia untuk mengusahakan keadaan yang memungkinkan bagi pembicaraan tentang masalah Timor di wilayahnya.
- Pertemuan Roma untuk saling konsultasi antara Menteri-menteri Luar Negeri Portugis dan Indonesia. Yang telah menghasilkan Memorandum saling pengertian di antara kedua negara.
- Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan kedatangan Menlu Adam Malik ke daerah perbatasan untuk menyampaikan semangat Pertemuan Roma.

Akibatnya, tercapailah kesimpulan bahwa Fretilin dengan sengaja tidak mau tahu semua usaha-usaha tersebut.

Tambahan lagi Fretilin telah mempertunjukkan sikap salah, bahwa dengan tindakan kriminalitasnya telah menghalangi rakyat Timor Portugis untuk menyatakan kehendak berdasarkan hukum yang syah;

Mengingat suasana yang disebabkan oleh Fretilin dengan pernyataan sepihak kemerdekaan Timor Portugis telah menggagalkan segala kemungkinan ke arah pemecahan damai seperti yang diinginkan oleh rakyat;

Merasakan, bahwa aksi kolonialis Portugis dan Belanda yang selama hampir 500 tahun telah memisahkan hubungan darah, ikatan moral bangsa dan kebudayaan antara Bangsa Indonesia dan Timor Portugis;

Mengingat, bahwa saat ini adalah kesempatan yang paling baik menyambungkan secara kokoh hubungan tradisi dengan Bangsa

Indonesia; atas nama Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan alasan-alasan di atas, kami dengan khidmat menyatakan penyatuan seluruh wilayah bekas koloni Portugis di Timor dengan Negara Indonesia; Proklamasi ini adalah pernyataan paling sungguh dari keinginan rakyat Timor Portugis.

Berhubung dengan isi dari Proklamasi penyatuan ini, Pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia diminta untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk melindungi kehidupan rakyat, yang ingin merupakan bagian Bangsa Indonesia, yang berada di bawah teror dan fasis yang dilakukan oleh Fretilin dan direstui oleh Portugis.

Balibo, 3 Nopember 1975

Atas nama Apodeti
ttd.

Guilherme Maria Goncalves
ttd.

Alexandrino Borromeu
Anggota Presidium

Atas nama KOTA
ttd.

Jose Martins
Presiden

Atas nama UDT
ttd.

Francisco X. Lopes da Cruz
Presiden
ttd.

Domingus de Oliveira
Sekretaris Jenderal

Atas nama Partai Trabalhista
ttd.

Domingos C. Pereira
Anggota Direktur

Pemerintah Portugal mengeluarkan pernyataan bahwa ia masih tetap sebagai penguasa yang sah di Timur Portugis. Oleh karena itu, Portugal tidak dapat menerima kedua proklamasi tersebut. Padahal kita tahu bahwa semua itu adalah akibat lemahnya pemerintahan di Timor Portugis yang sudah melarikan diri ke Atauro.

Sebaliknya bagi Indonesia perkembangan baru di Timor Portugis membuat posisinya sulit. Menerima Proklamasi Balibo, maka dunia international dengan mudah akan menyebutnya sebagai negara yang punya ambisi teritorial. Tidak menerima keinginan keempat partai itu berarti membiarkan mereka dihancurkan Fretilin yang sudah terlihat kecenderungan komunisnya. Oleh karena itu,

Indonesia secara hati-hati mengeluarkan pernyataan tanggal 4 Desember 1975 yang antara lain menyatakan bahwa pemerintah bersama rakyat Indonesia mempunyai kewajiban moral melindungi rakyat di wilayah Timor Portugis agar proses dekolonisasi terwujud sesuai dengan cita-cita dan keinginan seluruh rakyat Timor Portugis.

Sementara itu, Apodeti, UDT, KOTA, dan Tralabalista tetap berupaya meyakinkan pemerintah Indonesia tentang maksud Proklamasi Balibo. Bahkan kepada dunia internasional mereka mengirimkan telegram dan mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan keinginan rakyat tersebut.

Sejalan dengan itu, peperangan dan bentrokan senjata antara kedua belah pihak meningkat dengan cepat. Para sukarelawan Indonesia membantu perjuangan rakyat Timor Portugis. Satu per satu kota-kota jatuh ke tangan Apodeti-UDT dan kawan-kawan. Fretilin berusaha bertahan di Dili. Ketika itu pemerintah Portugis setempat berusaha menghindari dari tanggung jawabnya dan membiarkan rakyat begitu saja menyelesaikan masalahnya sendiri.

Tanggal 7 Desember 1975, Fretilin tersingkir dari Dili. Tiga hari kemudian kota Baucau, kota kedua pertahanan kuat Fretilin, juga dikuasai UDT, Apodeti dan kawan-kawan. Perkiraan waktu itu kekuatan militer Fretilin sekitar 20.000 tentara, termasuk tentara reguler eks. Portugis yang memihak mereka. Kekuatan militer tersebut, yang mulai hancur berantakan, kemudian menyebar ke berbagai daerah. Tidak lama sesudah itu kekuatan Fretilin tinggal hanya sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) di daerah-daerah pegunungan atau hutan.

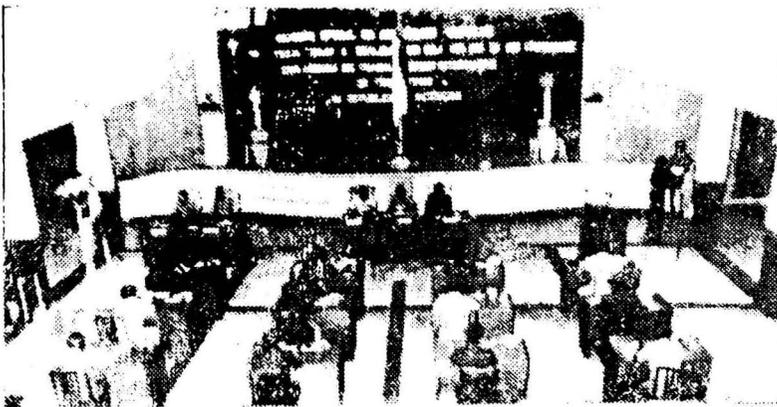
2. Pemerintahan Sementara Timor-Timor

Kemenangan rakyat Timor-Timur dalam memperjuangkan perbaikan nasibnya ditandai dengan terbentuknya Pemerintahan Sementara Daerah Timor Timur (PSTT) pada tanggal 17 Desember 1975. Dalam pernyataan yang disebut "Proklamasi" dijelaskan bahwa Pemerintahan Sementara ini didirikan atas dasar tertib pemerintahan, tertib administrasi, tertib hukum dan keamanan sehingga kehidupan normal rakyat Timor Timur dapat dipulihkan. Terpilih

sebagai ketua, dan wakil ketuanya yaitu Arnaldo Dos Reis Araujo (Apodeti) dan Franscisco Xavier Lopes da Cruz (UDT). Badan ini sesuai dengan keinginan PBB bersifat otonom.

Di samping itu, dibentuk pula Dewan Perwakilan Rakyat Timor-Timur yang para anggotanya berjumlah tiga puluh orang. Mereka terdiri atas para liurai dan tokoh masyarakat di seluruh Timor Timur. Terpilih sebagai ketuanya adalah Guilherme Maria Goncalves (dari Apodeti). Untuk melancarkan dan melengkapi jalannya pemerintahan, pada tanggal 18 Desember 1975 ditetapkan oleh PSTT tentang Struktur Pemerintahan Peralihan, Garis Kebijaksanaan Pemerintahan Peralihan, dan Perincian Program Kerja. Selanjutnya, juga ditetapkan personel PSTT. Begitu juga diatur kemudian pemerintah daerah kabupaten termasuk penentuan para bupati bagi tiga belas daerah.

Pada tanggal 31 Mei 1976, DPR Timor- Timur melakukan sidang paripurna (lengkap) terbuka. Acara tunggal yang telah disetujui bersama ialah "Integrasi Timor Timur dengan Republik Indonesia"



Sidang paripurna DPR Timor Timur

Keinginan rakyat untuk berintegrasi sudah tidak dapat dibendung lagi. DPR Timor Timur mengeluarkan petisi yang mendesak Pemerintah Indonesia segera mewujudkan secara nyata keinginan rakyat itu. Petisi itu dikeluarkan tanggal 31 Mei 1976. Adapun isi petisi tersebut adalah sebagai berikut.

Dewan Perwakilan Rakyat
Wilayah Timor Timur

PETISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Kami atas nama seluruh rakyat Timor-Timur setelah memberikan kesaksian atas Keputusan Sidang Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah Timor-Timur pada tanggal 31 Mei 1976 di Dili, yang pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kehendak rakyat sebagaimana tertuang dalam Proklamasi Integrasi Timor Timur pada tanggal 30 November 1975 di Balibo. Dengan ini mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia agar dalam waktu sesingkat-singkatnya menerima dan mengesahkan integrasi rakyat serta wilayah Timor-Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sepenuhnya tanpa referendum.

DILI, 31 MEI 1976

KEPALA PEMERINTAHAN
SEMENTARA

TIMOR TIMUR

ttd.

ARNOLDO DOS REIS
ARAUJO

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT

TIMOR TIMUR

ttd.

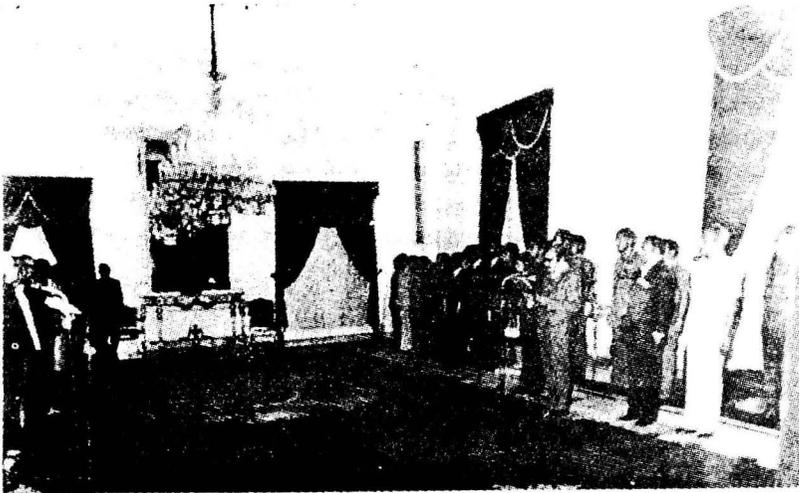
GUIHERME MARIA
GONCALVES

Pada tanggal 7 Juni petisi diserahkan secara resmi kepada Presiden RI Soeharto di Istana Merdeka, Jakarta, oleh para pemimpin eksekutif dan legislatif PSTT. Pada saat penyerahan petisi itu, Ketua

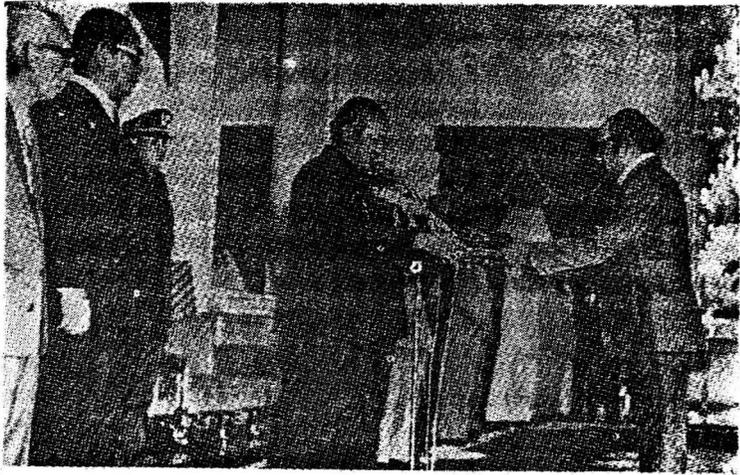
eksekutif PSTT Arnaldo dos Reis Araujo mengundang para pejabat eksekutif dan legislatif Indonesia untuk berkunjung ke Timor Timur meninjau perkembangan wilayah itu serta meneliti keinginan rakyat.

Presiden Republik Indonesia Soeharto dalam menyambut keinginan tersebut antara lain mengatakan:

"Dengan ini saya terima petisi mengenai pengintegrasian ini. Kami terima dengan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan rakyat Timor Timur kepada Indonesia. Kami juga menerimanya atas tanggung jawab kemanusiaan, tanggung jawab terhadap sejarah, tanggung jawab terhadap dasar-dasar dan cita-cita kemerdekaan kami serta tanggung jawab terhadap hati nurani kami".



Para pemimpin rakyat Timor Timur dalam Upacara Penyerahan Petisi di Istana Merdeka



Penyerahan Petisi kepada Presiden RI
oleh Pemimpin PSTT di Jakarta

3. Pembentukan Propinsi ke-27

Pemerintah Indonesia tidak menerima begitu saja permintaan rakyat Timor Timur hasil sidang wakil rakyat di DPR Timor Timur. Suatu delegasi Indonesia dikirim ke Timor Timur untuk meneliti secara langsung keinginan rakyat tersebut. Delegasi yang terdiri atas unsur pejabat eksekutif, legislatif, dan organisasi massa, diketuai oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud. Delegasi juga diikuti oleh beberapa duta besar dan konsul asing serta sejumlah wartawan dalam dan luar negeri.

Dalam kunjungan yang dilakukan tanggal 23 - 24 Juni 1976 itu, telah ditinjau beberapa daerah yaitu Dili, Viqueque, Ermera, Balibo, Baucau, dan Oekusi.

Hasil peninjauan dibahas dalam sidang kabinet RI tanggal 29 Juni 1976. Pada tanggal 30 Juni 1976 pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang penyatuan Timor Timur kepada DPR RI. Pada tanggal 5 Juli 1976 Menteri Dalam Negeri

Amir Machmud menyampaikan keterangan Pemerintah tentang rancangan undang-undang tersebut.

Sidang pleno DPR RI tanggal 15 Juli 1976 menyetujui rancangan tersebut menjadi undang-undang. Keputusan itu memiliki kekuatan hukum setelah Presiden RI mengesahkannya menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1976, tanggal 17 Juli 1976. Keputusan itu berarti permintaan rakyat Timor Timur disetujui oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Dengan demikian, daerah Timor Timur menjadi propinsi yang ke-27.

Sebagai Gubernur Timor Timur pertama ditunjuk Arnaldo dos Reis Araujo. Pemerintahan otonomi diatur dalam 13 kabupaten dan 62 kecamatan. Keputusan tentang Timor Timur itu kemudian dikukuhkan lagi pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dengan Ketetapan No. VI/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978.



Saat-saat pelantikan Arnaldo Dos Reis Araujo sebagai Gubernur dan Lopes da Cruz sebagai Wakil Gubernur Propinsi DT. I Timor Timur

RANGKUMAN

1. Tindakan kejam Fretilin yang tidak memikirkan lagi persaudaraan sebangsa, makin memperjelas aliran politiknya. Dalam situasi demikian UDT melihat bahwa bersatu dengan partai lainnya untuk tujuan bergabung dengan Indonesia adalah jalan yang terbaik bagi masa depan Timor Timur. Kekompakan yang lahir antara UDT, Apodeti, KOTA dan Trabalhista dan didukung oleh semangat juang yang tinggi, akhirnya mengantarkan Timor Timur ke gerbang integrasi yang ditandai dengan Proklamasi Balibo.
2. Keinginan keras rakyat Timor Timur untuk bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia tidak mungkin ditunda lagi. Wakil-wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Timor Timur meyakinkan pemerintah dan rakyat Indonesia bahwa integrasilah satu-satunya hal yang paling mendesak untuk direalisasikan saat itu. Untuk membuktikan hal itu, pemerintah Indonesia dengan disaksikan oleh beberapa duta besar negara asing meninjau secara langsung keinginan rakyat Timor Timur. Akhirnya, pemerintah dan rakyat Indonesia menyetujui dan menetapkan Timor Timur sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia sebagai propinsi ke-27

LATIHAN

1. Pertanyaan

1. Coba sebutkan isi pokok Pertemuan Roma!
2. Mengapa proklamasi yang diumumkan Fretilin ditentang?
3. Coba sebutkan apa isi pokok Proklamasi Balibo!
4. Sebutkan siapa yang menjadi pemimpin Pemerintahan Sementara Daerah Timor Timur (PSDTT)!
5. Siapa yang menjadi anggota DPR Timor Timur sebelum integrasi?

6. Apakah keinginan rakyat Timor Timur untuk berintegrasi diterima begitu saja oleh pemerintah dan rakyat Indonesia?
7. Coba sebutkan siapa yang memutuskan untuk menerima keinginan rakyat Timor Timur untuk berintegrasi!
8. Siapakah tokoh yang diangkat sebagai Gubernur Timor Timur pertama dan Ketua DPR Tk I Timor Timur oleh Pemerintah RI?

2. Tugas

1. Coba kamu diskusikan bersama proses kembalinya Timor Timur ke pangkuan Ibu Pertiwi!
2. Coba kamu buat catatan singkat tentang kronologi proses integrasi tersebut!

BAB VI

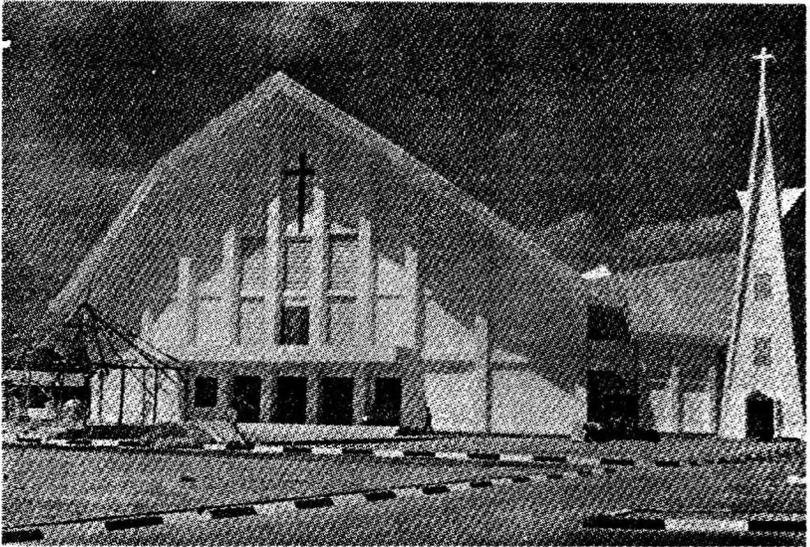
PEMBANGUNAN TIMOR TIMUR

1. Bidang Pemerintahan

Hari esok yang aman dan sejahtera mulai terbentang bagi rakyat Timor Timur. Pemerintah daerah Timor Timur mulai menata pemerintahan dan merencanakan pembangunan bagi rakyat. Tentu saja pembangunan disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat yang sudah dituangkan dalam rencana pembangunan lima tahun yang bertahap. Di samping itu, peran serta rakyat akan menentukan cepat atau lambatnya hasil pembangunan itu dapat dirasakan.

Pembangunan itu tidak hanya dalam arti fisik seperti pembangunan gedung-gedung pemerintahan, gedung-gedung pertemuan, sekolah-sekolah, gereja-gereja, sarana transportasi seperti jalan dan jembatan, sarana komunikasi seperti telepon, pabrik-pabrik, irigasi dan sebagainya, tetapi juga pembangunan mental spiritual seperti pendidikan, agama dan pemantapan ideologi. Pembangunan itu yang dilakukan berlanjut, tidak hanya di kota-kota tetapi juga sampai ke pelosok desa. Pemerintah berusaha keras agar pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di bidang pemerintahan daerah, para putra daerah diberi tanggung jawab untuk jabatan Kepala Daerah Tingkat I sampai kecamatan dan kelurahan. Sampai tahun 1987 terdapat 10.527 pegawai negeri yang bekerja pada berbagai instansi, dengan putra daerah diberi kemudahan persyaratan. Di samping itu, pemerintah daerah telah memberi kesempatan bagi aparaturnya dan para pelajar serta mahasiswa untuk memperdalam pengetahuan di berbagai lembaga pendidikan, baik di Timor Timur maupun di luar daerah ini.



Pembangunan Gereja Katolik Dili

Sampai tahun 1985/1986 setelah sepuluh tahun berintegrasi, sejumlah 909 pelajar, mahasiswa, dan pegawai telah memperoleh beasiswa. Lima puluh satu orang di antaranya telah lulus dari perguruan tinggi. Di antara 909 orang itu, 140 pegawai negeri belajar di berbagai lembaga pendidikan di berbagai daerah di Indonesia, yang sekaligus juga bertujuan untuk memperkenalkan wawasan yang lebih luas tentang Indonesia. Dalam tahun 1986/1987 diberikan pula tunjangan belajar untuk 40 orang pegawai yang mengikuti pendidikan di beberapa Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di luar daerah itu.

Untuk kelancaran pemerintahan, semua tingkat pemerintah daerah dilengkapi dengan dinas pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Begitu pun pergantian pimpinan berjalan lancar seperti pergantian gubernur yang pada tahun 1982 terpilih Ir. Mario Carascalao.

Sesuai dengan gerak pembangunan di pedesaan, desa-desa juga mendapat perhatian besar. Pada tahun 1984/1985 diadakan kembali penataan desa sehingga yang semula berjumlah 1717 desa menciut menjadi 442 desa. Hal itu dilaksanakan untuk lebih meningkatkan hasil guna dan daya guna dana dan sarana yang tersedia dalam menuju desa swasembada.

Sejalan dengan konsolidasi aparaturnya daerah, di propinsi Timor Timur juga dibentuk badan-badan perwakilan rakyat. Dalam pemilihan umum, rakyat ikut langsung terlibat. Bila pada pemilu 1982 hanya memilih wakil-wakil rakyat untuk tingkat pusat dan propinsi, maka pada tahun 1987 juga dipilih wakil rakyat untuk DPR daerah tingkat II. Suatu hal yang belum pernah terjadi semasa penjajahan Portugis, rakyat daerah ikut menentukan apa yang terbaik untuk kehidupan daerahnya.

Dewan-dewan perwakilan rakyat tersebut telah menghasilkan berbagai peraturan daerah untuk mengelola daerah tersebut secara baik dan teratur sesuai dengan kemajuan zaman dan keinginan rakyat. Sejalan dengan gerak pembangunan itu, anggaran pembangunan Timor Timur setiap tahun juga makin tinggi. Misalnya untuk tahun 1986/1987 anggaran daerah itu berjumlah Rp 340.009.232.380,00.

Salah satu faktor yang menunjang terlaksananya usaha pembangunan itu adalah semakin mantapnya situasi keamanan. Dalam hal ini kesadaran rakyat cukup tinggi untuk bekerja sama dengan aparat pemerintah dan militer. Apalagi pada tahun 1977 Presiden RI memberikan amnesti umum bagi mereka yang dulu memperlihatkan sikap memusuhi Indonesia. Ganjalan memang masih terasa dengan aktivitas sisa-sisa Fretilin. Namun, kepada mereka yang tidak ingin tinggal di Timor Timur (Indonesia) diberi kesempatan untuk pergi ke negara yang mereka inginkan, antara lain ke Portugal dan Australia.

Untuk lebih memahami laju perkembangan bidang pemerintahan, kita dapat melihat dalam tabel di bawah ini :

HASIL PEMBANGUNAN
s.d. PELITA-III
(1976-1984)

Aparatur Pemerintah

No.	Tingkat	1976	1984
1.	Desa	Suco dan Povoacao	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Desa diangkat - Sebagian besar Buta Aksara
2.	Kecamatan	4-5 orang	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata 5-10 orang - Sebagian besar belum terdidik
3.	Kabupaten	20 orang	<ul style="list-style-type: none"> - 6.480 orang - 80 % Golongan I
4.	Provinsi	< 1.000 orang	<ul style="list-style-type: none"> - 2.466 (Pemda TK I) - 3.359 (Sektoral) 5.825 - 75 % Golongan I

HASIL PEMBANGUNAN
s.d. PELITA -IV
(1984-1988)

Aparatur Pemerintah

No.	Tingkat	1984	1988
1.	Desa	- Kepala Desa diangkat - Sebagian besar Buta Aksara	- Kepala Desa dipilih - Yang Buta Aksara tinggal sedikit
2.	Kecamatan	- Rata-rata 5-10 Orang - Sebagian besar belum terdidik	- Rata-rata 15 Orang - sebagian besar APDN
3.	Kabupaten	- 6.480 orang - 80% Gol. I	- 7.728 orang - 70% Golongan I
4.	Provinsi	- 2.466 (Pemda Tk I) 3.359 (Sektoral) 5.825 - 75% Gol. I	- 3.308 (Pemda Tk I) 6.217 (Sektoral) 9.525 - 75% Gol. I

2. Bidang Ekonomi

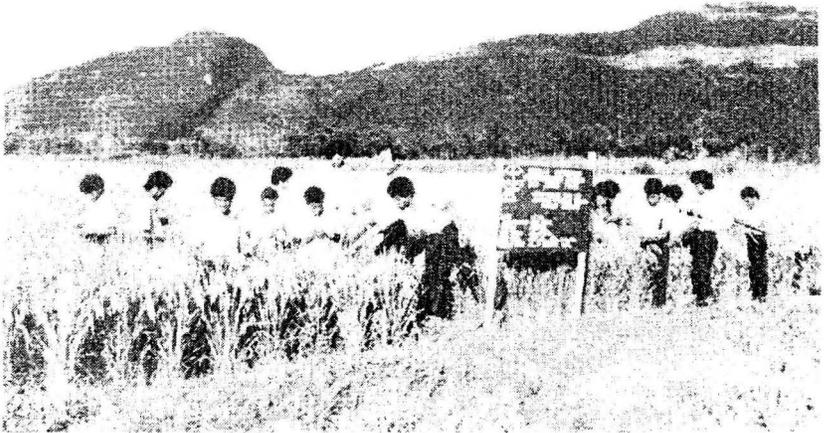
Di bidang ekonomi berbagai kebijaksanaan telah dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan daerah. Koperasi, pemanfaatan bank, bimas pertanian, bimbingan pembangunan industri kecil, dan intensifikasi pertanian digalakkan di kalangan rakyat. Pengembangan ekonomi itu juga didukung dengan berbagai kursus keterampilan dan pelatihan bagi rakyat yang membutuhkannya, seperti petani, industri rumah tangga atau pengrajin.

Sektor pertanian menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam pembangunan daerah Propinsi Timor Timur. Hal itu disebabkan

oleh mata pencaharian utama penduduk sebagai petani. Menurut sensus terakhir tahun 1990, sebanyak 74,6 % penduduk bekerja di sektor pertanian. Makanan pokok penduduk adalah jagung, terutama di pedesaan, dan beras.

Pemerintah daerah telah mengambil berbagai kebijaksanaan dalam sektor pertanian antara lain:

- a. mengusahakan perluasan areal tanah pertanian (ekstensifikasi) yang diolah oleh masyarakat atau petani;
 - b. meningkatkan pemanfaatan potensi lahan pertanian dengan cara membangun irigasi. Umpamanya, pembangunan sistem irigasi di Maliana untuk meningkatkan hasil padi dan jagung;
 - c. meningkatkan penyuluhan pertanian untuk mengubah cara bertani yang masih bersifat tradisional. Umpamanya, penyuluhan bimas dan penggunaan petugas penyuluh lapangan (PPL);
 - d. meningkatkan penggunaan pupuk dan obat-obatan agar produktivitas luas areal pertanian yang diolah menjadi meningkat (intensifikasi).
-



Siswa sedang praktik penelitian pertanian di lapangan

Dari seluruh produksi pertanian hanya sub-sektor perkebunan yang dapat dipasarkan antarpulau dan diekspor. Produksi utama yang dipasarkan adalah kopi dan cendana.

Selain sektor pertanian, sektor lainnya seperti perdagangan, industri, keuangan, dan jasa juga memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan perekonomian Timor Timur. Pengembangan sektor-sektor tersebut telah memberikan pengaruh positif seperti terciptanya kerja baru, terserapnya tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dapat ditambahkan bahkan di beberapa daerah terdapat beberapa bahan tambang yang belum diusahakan sebagaimana mestinya. Misalnya, minyak di Suai dan celah Timor, emas di Lacro dan Elena, serta marmer hampir di seluruh Timor Timur. Pertumbuhan ekonomi Propinsi Timor Timur sesungguhnya sangat menggembirakan bila dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia atau secara nasional.

Untuk lebih memahami hasil pembangunan, dapat dilihat contoh tabel di bawah ini.

HASIL PEMBANGUNAN
s.d. PELITA-IV
(1984-1988)

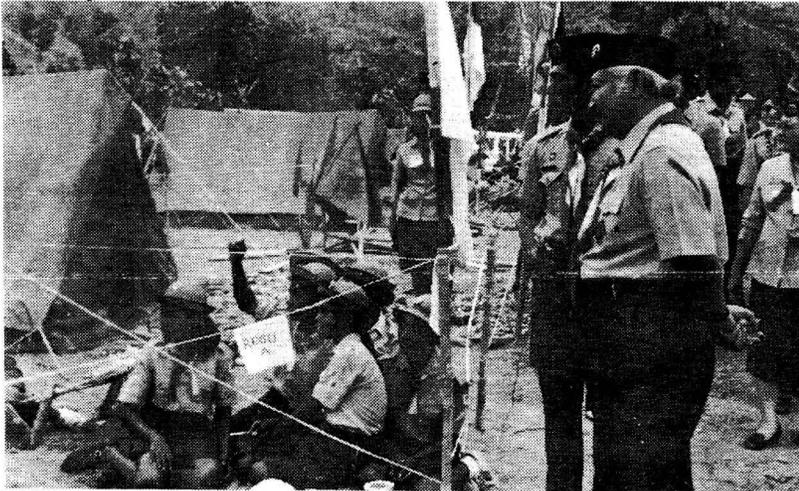
Pertanian

No.	Tingkat	1984	1988
1	Tanaman pangan - Tanaman pangan a. Luas b. Produksi - Jagung a. Luas b. Produksi	20.981 ha 35.247 ton 44.031 ha 44.472 ton	17.247 ha 37.246 ton 46.401 ha 58.701 ton
2	<u>Perkebunan</u> - Kopi a. Luas b. Produksi - Kelapa a. Luas b. Produksi	48.648 ha 6.901 ton 47.889 ha 8.114 ton	49.570 ha 9.427 ton 50.035 ha 8.385 ton
3	<u>Peternakan</u> a. Sapi b. Kerbau c. Kuda	49.946 ekor 33.832 ekor 23.015 ekor	57.139 ekor 36.995 ekor 24.117 ekor
4	Perikanan	483,7 ton	674,28 ton
*	Pangan	Tinggal beberapa Daerah Rawan Pangan	Tidak ada lagi Daerah Rawan Pangan
*	Tingkat Pendapatan	Rp. 125.000 per jiwa	Rp. 240.000 per jiwa

3. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Bagaimanapun kecerdasan rakyat turut menentukan juga tingkat kemajuan rakyat. Oleh karena itu, bidang pendidikan mendapat perhatian besar, tidak hanya tingkat sekolah dasar tetapi juga sekolah menengah dan tinggi. Pada masa kolonial Portugis, pendidikan tinggi belum pernah ada. Apabila ingin ke pendidikan tinggi harus pergi ke Portugal, terutama untuk jurusan pertanian dan teknik atau ke Mozambik dan Angola. Waktu itu hanya ada dua sarjana (pertanian dan ekonomi) yang berasal dari Timor Timur. Salah satu di antaranya adalah yang pernah menjadi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur, yaitu Ir. Mario Viegas Carascalao. Sebagai contoh lain di Kabupaten Bobonaro, pada masa penjajahan di bidang pendidikan hanya memiliki 6 Sekolah Dasar, pada tahun 1986 menjadi 76 SD, 6 SMP Negeri, 2 SMP Misi, 1 SMA Negeri dan 1 SPG Misi.

Pemberantasan buta huruf juga dilakukan. Kita mengetahui pada masa penjajahan Portugis tahun 1974, 90,8% dari penduduk berusia 10 tahun ke atas masih buta huruf. Pembinaan generasi muda juga ditingkatkan, antara lain melalui Karang Taruna dan pramuka.



Jambore Pramuka yang disaksikan Presiden R.I.

Sampai akhir Repelita III, dalam upaya menunjang pendidikan di Timor Timu,, telah dibangun 407 SD, 35 SLTP dan 7 SLTA. Dalam tahun 1984/1985 jumlah SD 466, SLTP meningkat menjadi 43 dan SLTA menjadi 8. Pada tahun 1985/1986 meningkat lagi menjadi 71 SLTP, 9 SMA dan 9 sekolah kejuruan setingkat SLTA. Bahkan di Kabupaten Dili telah dibangun asrama pelajar. Dari gambaran tersebut terlihat betapa pesatnya kemajuan pendidikan sesudah daerah ini berintegrasi.

Masalah utama yang dihadapi pada masa awal pembangunan di sektor pendidikan itu menyangkut pengadaan tenaga pengajar. Oleh karena itu, sejalan dengan kebijaksanaan pendidikan di Timor Timur, maka pengadaan tenaga pengajar diprioritaskan dengan mendatangkan guru-guru dari Jawa dan Sulawesi. Di samping itu, pengadaan perpustakaan dan buku-buku pelajaran dan bacaan juga mendapat perhatian.



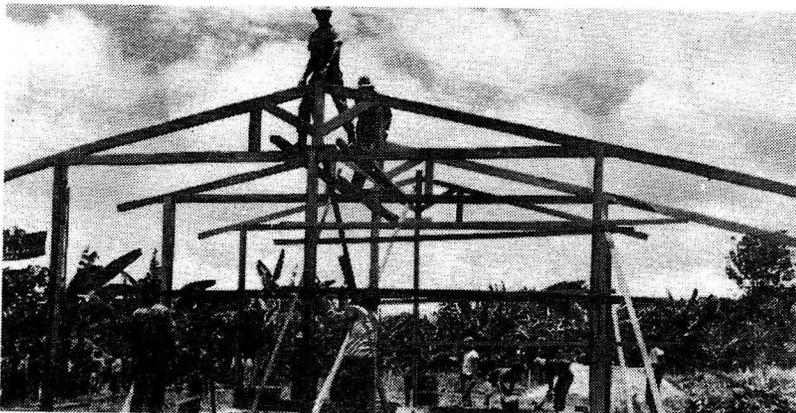
Gedung Perpustakaan Wilayah

Pada tahun 1979 untuk pertama kalinya didirikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG), baik negeri maupun swasta Katolik di Dili. Untuk meningkatkan keterampilan para guru Sekolah Dasar,

pada tahun 1979 didirikan Kursus Pendidikan Guru (KPG) di Dili. Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) didirikan pada tahun 1980 di Dili dan kemudian juga didirikan di Manatuto, Liquica, dan Ambeno. Pada tahun 1985 berdiri pula SPG Katolik di Maliana dan Sekolah Guru Olah Raga (SGO) di Baucau.

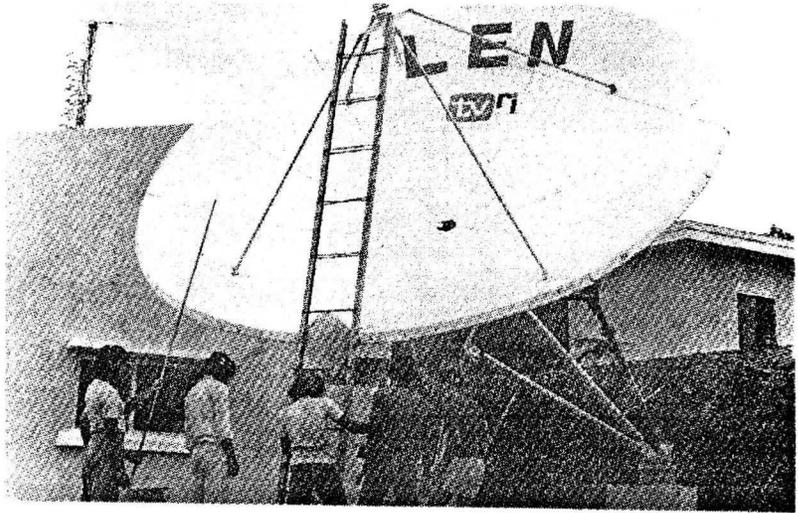
Program perbaikan kesehatan rakyat telah dilakukan sejak tahun 1977. Pada mulanya direhabilitasi sarana-sarana kesehatan yang telah ada. Barulah pada tahun-tahun berikutnya dibangun prasarana dan sarana kesehatan disertai dengan penyediaan tenaga kesehatan. Begitulah mulai tahun 1978 direhabilitasi pusat-pusat kesehatan di beberapa kabupaten dan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat di Dili. Di samping itu rehabilitasi pabrik farmasi, pengadaan alat-alat kesehatan seperti peralatan laboratorium, poliklinik dan sebagainya. Di tiap kecamatan dibangun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Puskesmas Pembantu di desa.

Pembangunan prasarana dan sarana yang menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat terus dilakukan di semua bidang. Bahkan untuk memotivasi rakyat dalam pembangunan di daerah-daerah, sesuai dengan perannya sebagai stabilisator dan dinamisator, ABRI pun ikut melakukan pembinaan wilayah (teritorial) antara lain dalam program ABRI Masuk Desa (AMD). Peranserta ABRI dalam pembangunan daerah sangat besar sehingga mendapat sambutan positif dari rakyat.



Pelaksanaan AMD di Kabupaten Lautem

Bidang komunikasi dan telekomunikasi juga mendapat perhatian pemerintah. Tidak hanya pos dan telepon, tetapi juga radio dan televisi. Untuk memperlancar komunikasi itu telah dibangun "satelit" yang diresmikan oleh Presiden RI pada tahun 1988. Dengan pembangunan alat itu, penduduk Timor Timur dapat berkomunikasi ke seluruh penjuru dunia.



Satelit

Dalam hal transportasi seperti perhubungan darat, pada masa Portugis sangat tidak mendapat perhatian. Dari panjang jalan yang ada, yaitu 2.986 km, hanya beberapa kilometer yang diaspal. Itupun hanya jalan yang ada di kota Dili dan tidak pula boleh dilalui oleh pribumi. Jalan antardaerah tidak satu pun yang diaspal dan hanya dapat digunakan pada musim panas. Bila musim hujan, jalan tanah itu berubah menjadi kubangan lumpur yang sulit dilewati. Sekarang setelah integrasi semua jalan negara, propinsi, dan kabupaten telah diaspal sehingga memudahkan transportasi dan komunikasi, sekaligus memudahkan jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah Timor Timur. Ternyata berhasilnya pembangunan di daerah ini, telah menyebabkan unsur-unsur anti integrasi yang masih ada, kehilangan daya untuk menarik rakyat melawan pemerintah seperti yang dilakukan

sisasisa Fretilin. Sebaliknya, partisipasi rakyat makin meningkat dalam pembangunan daerah sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan kesejahteraan rakyat pun makin meningkat pula.

Untuk lebih memahami hasil pembangunan bidang kesejahteraan sosial itu dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

HASIL PEMBANGUNAN

s.d. PELITA-IV

(198-1988)

Pendidikan

No.	Tingkat	1984	1988
1.	Buta Aksara	65 %	40 %
2.	TK a. Gedung b. Murid c. Guru	11 1.156 33	26 1.720 82
3.	SD a. Gedung b. Murid c. Guru	410 100.637 2.614	656 105.058 4.894
4.	SLTP a. Gedung b. Murid c. Guru	43 9.836 250	90 28.342 1.173
5.	SLTA a. Gedung b. Murid c. Guru	6 2.765 246	32 12.101 4.061
6.	Universitas a. Gedung b. Murid c. Guru	Univ. Terbuka 111 -	UNTIM 660 91
7.	Sarjana a. Murid b. Guru	Masih Belajar di luar Timtim 1.156 33	+ 100 orang 1.720 82

HASIL PEMBANGUNAN
s/d PELITA-III
(1976-1984)

Kesehatan

No.	Tingkat	1976	1988
I	<u>Sarana Pelayanan</u>		
1.	RSU/Militer	3	5
2.	Puskesmas	9	28
3.	Puskesmas Pembantu	47	101
4.	Posyandu	-	362
5.	Apotik	-	6
6.	Gudang Farmasi	-	3
II	<u>Tenaga Kesehatan</u>		
1.	Dokter Umum	12	51
2.	Dokter Gigi	2	7
3.	Dokter Spesialis	2	4
4.	Dokter Ahli Kesehatan Masyarakat	-	4
5.	Perawat	21	297
6.	Bidan	2	5
7.	Apoteker	3	2
III	<u>Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Penduduk</u>		
1.	Dokter	1: 30.000	1:12.340
2.	Perawat	1: 3.750	1: 1.870
3.	Bidan	-	1:80.000
IV	<u>Derajat Kesehatan</u>		
1	Angka Kematian		
	a. Kasar	-	15,59%
	b. Bayi	-	118 %
2	Harapan Hidup	-	52,8 thn
3	Angka Kesakitan	-	48,4 %

HASIL PEMBANGUNAN
s.d. PELITA-IV
(1984-1988)

Kesehatan

No.	Tingkat	1984	1988
I	<u>Sarana Pelayanan</u>		
1.	RSU/Militer	5	10
2.	Puskesmas	28	65
3.	Puskesmas Pembantu	101	131
4.	Posyandu	362	721
5.	Apotik	6	12
6.	Gudang Farmasi	3	6
II	<u>Tenaga Kesehatan</u>		
1.	Dokter Umum	51	98
2.	Dokter Gigi	7	15
3.	Dokter Spesialis	4	6
4.	Dokter Ahli Kesehatan Masyarakat	4	5
5.	Perawat	297	462
6.	Bidan	5	122
7.	Apoteker	2	9
III	<u>Ratio Tenaga Kesehatan Terhadap Penduduk</u>		
1.	Dokter	1:12.340	1:7.000
2.	Perawat	1: 1.870	1:1.436
3.	Bidan	1:80.000	1:5.000
IV	<u>Derajat Kesehatan</u>		
1.	Angka Kematian		
	a. Kasar	15,59%	3%
	b. Bayi	118%	89,2%
2.	Harapan Hidup	52,8 thn	57 thn
3.	Angka Kematian	48,4%	48,36%

HASIL PEMBANGUNAN
s.d. PELITA-III
(1976-1984)

Perhubungan

No.	Tingkat	1976	1984
I	<u>Darat</u>		
1	Jalan Aspal	2 Km	237 Km
2	Jumlah Kendaraan		
	a. Sedan	171	389
	b. Pick-up/Jeep	215	854
	c. Truk	47	811
	d. Bus	15	118
	e. Sepeda Motor	878	4.228
II	<u>Laut</u>		
	a. Kapal Samudera	-	-
	b. Kapal Nusantara	-	73
	c. Kapal Lokal	-	66
	d. Kapal Tanker	-	13
	e. Kapal Rakyat	-	103
	f. Kapal Perintis	-	31
	g. Kapal lain-lain	-	29
III	<u>Udara</u>		
	Pesawat Udara	-	965 Penerbangan
IV	<u>Telepon</u>	Dili - Kabu- paten - Keca- matan	Dalam kota Dili

HASIL PEMBANGUNAN
s.d. PELITA-IV
(1984-1988)

Perhubungan

No.	Tingkat	1984	1988
I	<u>Darat</u>		
1	Jalan Aspal	237 Km	1.017 Km
2	Jumlah Kendaraan		
	a. Sedan	389	619
	b. Pick-up/Jeep	854	2.176
	c. Truk	811	1.459
	d. Bus	118	454
	e. Sepeda Motor	4.228	6.108
II	<u>Laut</u>		
	a. Kapal Samudera	-	-
	b. Kapal Nusantara	73	51
	c. Kapal Lokal	66	78
	d. Kapal Tanker	13	25
	e. Kapal Rakyat	103	49
	f. Kapal Perintis	31	28
	g. Kapal lain-lain	29	44
III	<u>Udara</u>		
	Pesawat Udara	965 Penerbangan	950 Penerbangan
IV	<u>Telepon</u>	Dalam Kota Dili	- Dili : SLJJ - Kabupaten sedang dibangun

RANGKUMAN

1. Tujuan kemerdekaan adalah mencapai masyarakat adil dan makmur. Untuk mencapai itu, Pemerintah RI memberikan perhatian besar sehingga di Timor Timur dilakukan pembangunan secara besar-besaran. Pembangunan di segala bidang itu tentu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah. Bagaimanapun dalam pelaksanaan pembangunan ini sangat diperlukan peran serta rakyat.
2. Secara bertahap rakyat mulai menikmati hasil kemerdekaan dalam berbagai bidang. Tidak hanya kesejahteraan lahiriah mereka meningkat, tetapi juga kebahagiaan batiniah mereka. Suatu kemajuan yang tidak mungkin diperoleh semasa penjajahan Portugis.

LATIHAN

A. Pertanyaan

1. Apakah yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan kemampuan aparat pemerintah di Timor Timur?
2. Menurutmu, mengapa pemerintah menaruh perhatian besar pada bidang pendidikan rakyat?
3. Coba kamu ceritakan kemajuan yang diperoleh di bidang komunikasi!
4. Apa buktinya bahwa rakyat ikut menentukan pembangunan didaerahnya!
5. Sebutkan beberapa kemajuan di bidang kesehatan!

B. Tugas

1. Coba kamu diskusikan bersama tentang isi tabel-tabel yang ada dalam buku ini!
2. Coba kamu buat suatu karangan pendek tentang kemajuan pembangunan di daerahmu!
Kemudian diskusikan bersama!

SUMBER PENULISAN

I. BUKU

- Bemmelen, R.W. Van, *The Geology of Indonesia*, vol. IA. General Geology, The Hague: Martinus Nijhoff, 1970.
- Budhisantoso, S, "Kehidupan Ekonomi Penduduk di Timor Timur" dalam *Berita Antropologi*, Tahun XI No. 36 Januari-Maret 1980.
- Djenen Bale, dkk. *Atlas Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Diplomasi Tentang Timor Timur*, Jakarta: CSIS, 1984.
- 2 Tahun Propinsi ke-27. Daerah Tingkat I/Propinsi Timor Timur*, Departemen Penerangan RI
- Encyclopedia Britannica. Inc, *Britannica Atlas*, 1979.
- Encyclopedia Indonesia*. Jilid XVI. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1991.
- Fretilin Massacres : Festimonies of the survivors from Fretilin Massacres*, Singapura, n.d.
- Hick, David,. *Roh Orang Tetum* (diterjemahkan oleh Tim SH), Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1985.
- Himpunan Dokumen Tentang Timor Timur*, Pusjarah ABRI.
- Himpunan Materi Muatan Daerah Pada Orientasi Pengenalan Tugas Bagi Anggota DPRD I dan DPRD II Hasil Pemilihan Umum 1992*. Buku V. Direktorat Sosial Politik Propinsi Dati I Timor Timur.
- Integrasi Timor Timur*, 1976 (I), Jakarta: CSIS, 1983.
- Integrasi Timor Timur*, Departemen Penerangan R.I, 1982.
- Julius Pour, *Benny Moerdani. Profil Prajurit-Negarawan*. Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Soedirman, Jakarta, 1993.
- Lapian A.B. dan Paramita Abdurachman, "Sejarah Timor Timur" dalam *Berita Antropologi*, Tahun XI No. 36 Januari-Maret 1980.

- Lapian Dr. A.B., dan JR Chaniago, *Timor Timur Dalam Gerak Pembangunan*, Jakarta: Depdikbud, Ditjen Kebudayaan, Dit. Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional, Proyek IDSN, Jakarta, 1988.
- Noor, Drs. Machmuddin dkk., *Lahirnya Propinsi Timor Timur*, Jakarta: Badan Penerbit Almanak Republik Indonesia/BP. Alda,, 1977.
- Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat 15 Agustus 1987, Pelaksanaan Tahun ke III Repelita IV (1 April 1986 s/d 1 Maret 1987)*, Departemen Penerangan RI, 1987.
- Mangindaan, B, "Sejarah Timor Timur", dalam buletin *Inaka Baladika*, No. XI tahun 1976, Dep. Hankam, Pusat Pembinaan Mental.
- Monografi Daerah Timor Portugis*, Disusun oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Kupang, 1975.
- Neonbasu, SVD, P. Drs. Gregor, *Keadilan dan Perdamaian di Diosis Dili, Timor Timur. (Dalam Terang Ajaran Resmi Gereja Katolik)*. Diterbitkan oleh : Komisi Komunikasi Sosial Diosis Dili, Timor Timur.
- Pembangunan Timor Timur 1977 s/d 1982*, Biro Informasi dan Data, CSIS, Jakarta, 1984.
- Pembantaian di Timor Timur*, (Brosur) 1976.
- Pra Integrasi Timor Timur*, Jakarta: CSIS, 1983.
- Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur*, Departemen Penerangan RI.
- Proses Perkembangan Sosial, Politik, Ekonomi, dan Kultural Dalam Rangka Integrasi Nasional di Timor Timur*. Laporan Penelitian. Jakarta : LEKNAS - LIPI, 1983
- Suparlan, Parsudi, "Orang Timor Timur" dalam *Berita Antropologi*, Tahun XI No. 36 Januari-Maret 1980.

Sejarah Perkembangan Timor Timur, Diterbitkan oleh staf teritorial KASAD, 1979.

Soekanto, *Integrasi Kebulatan Tekad Rakyat Timor Timur*, Yayasan Penerbit, 1976.

Soares, Abilio Jose Osorio, *Pembangunan Timor Timur*, Disampaikan dalam rangka menyambut Peserta Kursus Reguler Lemhannas Angkatan III ke Propinsi Timor Timur, Juli 1993.

II. Majalah/Surat kabar/Makalah

Joao Da Silva Tavares, "Sambutan : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bobonaro pada tanggal 12 Juli 1986 dalam rangka Sidang Paripurna Istimewa DPRD Tk. II Bobonaro dalam memperingati HUT ke X Propinsi Timor Timur", di dalam Buletin *Bobonaro Membangun*, No. 3 Tahun 1986/1987, Kandeppen/Puskesmas, Bobonaro, 1986/1987.

III. Statistik

BPS. *Daftar Nama, Kode & peta Wilayah Administrasi Indonesia 1989*, Jakarta, 1990.

BPS. *Statistik Indonesia 1989*, Jakarta, 1990

BPS. *Statistik Indonesia 1990*, Jakarta, 1991.

BPS. *Penduduk Indonesia, Hasil Sensus Penduduk 1990*. Jakarta 1991.

IV. Wawancara/Sumber Lisan

Wawancara dengan Abilio Jose Osorio Soares, Gubernur Prop. Timor Timur, Desember 1992.

Wawancara dengan Alexandrino Boromeo, Tokoh Apodeti, November 1992 di Dili.

Wawancara dengan Jose Manuel Duarte, Pelaku Perlawanan di Viqueque tahun 1959, Desember 1992 di Dili.

Keterangan Lisan Liurai Lautem, disampaikan kepada Drs. Juit Tadeus, 21 September 1993 di Los Palos.

Keterangan Lisan Jaunairo, Anggota DPRD Tk. II Bobonaro dan *Askis Dos Santos*, Camat Balibo, disampaikan kepada Drs. S. Hadi Pranata pada 21 September 1993 di Bobonaro.

Keterangan Lisan Abel Gomes, (60 th), Pelaku Integrasi Suai/ Anggota DPRD Tk. II Covalima, disampaikan kepada Gunadi Iskandar, 20 September 1993 di Suai, Covalima.

Keterangan Lisan Fransico A.R. Gusmao, Raja Baucau (60 th), disampaikan kepada Ben S. Galus, SH, 22 September 1993 di Baucau.

Keterangan Lisan Antonio Vicente M. Soares, Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Kabupaten Viqueque (50 th) dan *Hipalito da Carvalho*, mantan anggota DPRD Tk. II Viqueque (55 th), disampaikan kepada Ekanto Heru Subroto, 21-22 September 1993 di Viqueque.

Keterangan Lisan Jaime Da Costa, Ketua DPRD Tk. II Manufahi dan *Antoni da Costa*, anggota DPRD Tk. II disampaikan kepada Drs. Emanuel Wahyu Saptomo, 22 September 1993 di Same.

Keterangan Lisan Lambarto Gauvia Liete, Wakil Ketua I DPRD TK II Bobonaro, *George Tavares*, Wakil Ketua II DPRD TK. II Bobonaro, *Kintiliano Lorenha Cardoso*, dan *Daniel Bareto Lopes Eks.* Tokoh Apodeti Bobonaro, *Francisco Soares Dos Reis* eks. guru di Maliana di sampaikan kepada Drs. E. Wahyu Saptomo, Desember 1992 di Maliana

Keterangan Lisan dari beberapa pelaku sejarah, selama seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Timor Timur, Januari 1993 dan November 1993

LAMPIRAN 1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1976
TENTANG
PENGESAHAN PENYATUAN TIMOR TIMUR
KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMBENTUKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
TIMOR TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa delegasi Rakyat dan Pemerintah Sementara Timor Timur telah mengajukan petisi kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang menyatakan kehendaknya secara resmi untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia di wilayah Timor Timur, telah diperoleh keyakinan bahwa Rakyat Timor Timur benar-benar mempunyai kehendak yang kuat dan bebas menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa kehendak Rakyat dan Pemerintah Sementara Timor Timur tersebut dalam huruf a telah diterima oleh Pemerintah dan Rakyat Indonesia dan karena itu perlu ditetapkan undang-undang yang mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang membentuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Penetapan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN
PENYATUAN TIMOR TIMUR KE DALAM
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMBENTUKAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I TIMOR TIMUR.

Pasal 1

Mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Membentuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor- Timur yang wilayahnya meliputi wilayah bekas koloni Portugis di Timor.

Pasal 3

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-

undangan tersendiri, dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan di wilayah Timor Timur.

Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

S O E H A R T O

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 1976
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

SUDHARMONO, SH.

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35
TAHUN 1976**

LAMPIRAN 2

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

Umum

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945) menegaskan dalam Pembukaannya, “bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Oleh karena itu, kehendak rakyat Timor Timur untuk membebaskan diri dari penjajahan Portugis memperoleh simpati dan dukungan dari Pemerintah dan Rakyat Indonesia.
2. Dalam rangka dekolonisasi wilayah bekas koloni Portugis di Timor itu, Rakyat Timor Timur telah menyatakan kehendaknya untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dinyatakan dengan tegas baik dalam Proklamasi Rakyat Timor Timur di Balibo tanggal 30 November 1975 maupun dalam Petisi Rakyat dan Pemerintah Sementara Timor Timur di Dili tanggal 31 Mei 1976 yang telah disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 7 Juni 1976.

Untuk menyaksikan serta memperoleh gambaran secara langsung tentang kenyataan-kenyataan yang sebenarnya di wilayah Timor Timur, maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengirim Delegasi ke Timor Timur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/LN/1976, tanggal 22 Juni 1976 yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan unsur organisasi masyarakat. Hasil peninjauan itu telah memberi keyakinan kepada Pemerintah dan Rakyat Indonesia, bahwa Rakyat Timor Timur benar-benar mempunyai kehendak yang kuat dan yang dinyatakan secara bebas untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah

sepantasnya apabila kehendak Rakyat Timor Timur diterima oleh Pemerintah dan Rakyat Indonesia, sehingga oleh karenanya Presiden Republik Indonesia telah menyetujui dan menerimanya yang didasarkan atas rasa tanggung jawab terhadap perikemanusiaan, tanggung jawab terhadap sejarah, tanggungjawab terhadap dasar-dasar dan cita-cita kemerdekaan, serta tanggung jawab terhadap hati nurani Rakyat dan Bangsa Indonesia, yang kesemuanya itu didasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

3. Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk mengesahkan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Republik Indonesia, agar supaya penyatuan tersebut menjadi sah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Dengan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan sendirinya wilayah Timor Timur menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Rakyat Timor Timur menjadi Rakyat dan Warganegara Republik Indonesia, dan semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berlaku juga bagi wilayah Timor Timur.
5. Sebagai tindak lanjut dari penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dibentuk Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur yang wilayahnya meliputi bekas koloni Portugis di Timor. Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur adalah sesuai dengan sistem tata negara dan tata pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan. Di samping pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur berarti memberikan otonomi kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sama halnya dengan Propinsi Daerah Tingkat I di bagian-bagian lain dari wilayah Republik Indonesia.
6. Namun demikian, perlu kiranya disadari, bahwa sebelum penyatuannya dengan Negara Republik Indonesia, Timor Timur selama ini telah mempunyai sejarah dan pertumbuhan yang berlainan dengan wilayah-wilayah lain dalam lingkungan Republik Indonesia. Keadaan masyarakatnya, sistem hukumnya, sistem

pemerintahannya, sistem perekonomiannya, sistem pendidikannya, serta sistem pertahanan dan keamanannya mempunyai latar belakang, sifat, dan perkembangan yang berlainan, segera perlu diatur secara khusus. Hal-hal tersebut memerlukan penyesuaian dengan keadaan-keadaan Republik Indonesia. Usaha penyesuaian ini harus dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan, namun harus pula terlaksana dalam waktu yang tidak terlalu lama.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Mengenai pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, perlu diatur lebih lanjut dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan yang khusus di Wilayah Timor Timur.

Sambil menunggu penyesuaian-penyesuaian lebih lanjut, maka aparaturnya yang sekarang ada menjalankan pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kepala Pemerintah Sementara Timor Timur menjadi Gubernur Kepala Daerah Timor Timur. Demikian juga badan-badan Perwakilan Rakyat yang ada di Timor Timur menjadi Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3084 TAHUN 1976.

**Perpustakaan
Jenderal Ke**

959.

YU

S